



BUPATI SUMENEP



**LAPORAN
KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI
SUMENEP
TAHUN 2024**

KEPADA :

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMENEP**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Akhir Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Penyampaian LKPj ini adalah untuk memenuhi kewajiban konstitusional selaku Kepala Daerah kepada DPRD, sebagaimana diamanatkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 19 menyebutkan :

- (1) Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rapat Paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir ;
- (2) Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh wakil kepala daerah selaku pelaksana tugas kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna.
- (3) Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2024 adalah gambaran hasil penyelenggaraan urusan pembangunan dan pelaksanaan APBD Kabupaten Sumenep pada Tahun Anggaran 2024 yang merupakan bagian dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026. Efektivitas pelaksanaan pembangunan Pemerintah Daerah dapat diukur berdasar capaian sasaran pembangunan yang tertuang dalam indikator kinerja utama (IKU) Pemda, indikator Program Pemda, dan indikator kinerja utama terhadap pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) selalu menjadi komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dalam memandang bahwa setiap proses pembangunan harus dapat dilihat dari tingkat keberhasilannya, obyektif, dan sekaligus sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan selanjutnya. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan daerah serta berbagai prestasi yang telah dicapai pada tahun 2024 merupakan hasil kerja bersama dari seluruh stakeholders pelaksana pembangunan, segenap Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, aparat keamanan, termasuk jajaran Pemerintahan Desa dan masyarakat Kabupaten Sumenep secara keseluruhan, serta pihak swasta yang telah memberikan dukungan. Catatan strategis hasil rekomendasi dari DPRD Kabupaten Sumenep terhadap LKPJ merupakan masukan penting bagi Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Sumenep pada masa yang akan datang.

Akhirnya, kami berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan untuk lebih baik di masa mendatang. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati, kami menyampaikan terimakasih, apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sumenep serta kepada semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, atas segala dukungan/partisipasi, kolaborasi, dan sinergitas, serta nasihat, kritik dan saran kepada kami beserta seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam proses penyusunan LKPj ini. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi dan memberikan petunjuk kepada kita semua agar selalu ikhlas dan amanah dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Sumenep demi pembangunan di Kabupaten Sumenep. Amiin...

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Sumenep, 7 Maret 2025



Dr. H. ACHMAD FAZLI WONGSOJUDO, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL viii

BAB I PENDAHULUAN **I-1**

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Dasar Hukum I-2

1.3 Visi dan Misi Kepala Daerah..... I-5

1.3.1 Visi I-5

1.3.2 Misi I-7

1.3.3 Tujuan dan Sasaran I-11

1.4 Data Umum Daerah I-12

1.4.1 Data Geografis Wilayah I-12

1.4.2 Jumlah Penduduk..... I-16

1.4.3 Pertumbuhan Penduduk I-18

1.4.4 Jumlah ASN I-19

1.4.5 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis

Pendapatan..... I-22

1.4.6 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja..... I-23

1.4.7 Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis

Pembiayaan I-24

1.4.8 Realisasi Belanja masing-masing SKPD..... I-25

BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

KABUPATEN SUMENEP II-1

2.1 Perubahan Penjabaran Pendapatan Daerah	II-3
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	II-4
2.1.2 Pendapatan Transfer	II-5
2.1.3 Lain- lain Pendapatan Daerah Yang Sah	II-5
2.2 Perubahan Penjabaran Belanja Daerah	II-6
2.2.1 Belanja Operasi	II-7
2.2.2 Belanja Modal.....	II-7
2.2.3 Belanja Tidak Terduga.....	II-8
2.2.4 Belanja Transfer	II-8
2.3 Perubahan Penjabaran Pembiayaan Daerah.....	II-10
2.3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah	II-10
2.3.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah	II-10

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH

YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH III-1

3.1 Tingkat Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah	III-2
3.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	III-3
3.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	III-5
3.1.3 Persentase Penduduk Miskin	III-6
3.1.4 Indeks Reformasi Birokrasi	III-7
3.1.5 Indeks Kesalehan Sosial	III-8

3.2 Tingkat Capaian Indikator Kinerja Daerah	III-9
3.2.1 Pendapatan per Kapita (ADHB)	III-12
3.2.2 Pegeluaran per Kapita Riil disesuaikan	III-12
3.2.3 Persentase Pengurangan wilayah Kantong Kemiskinan	III-13
3.2.4 Indeks Pendidikan	III-14
3.2.5 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	III-15
3.2.6 Indeks Kesehatan dan Persentase Pravelensi Stunting.....	III-16
3.2.7 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	III-17
3.2.8 Indeks Pembangunan Pemuda	III-19
3.2.9 Indeks Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan (Pertanian, Perikanan, Perindustrian Dan Perdagangan)	III-19
3.2.10 Nilai realisasi investasi	III-20
3.2.11 Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD.....	III-21
3.2.12 Indeks SPBE, Capaian Akuntabilitas Keuangan dan Capaian Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	III-22
3.2.13 Indeks BerAKHLAK dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	III-25
3.2.14 Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Tematik.....	III-27
3.2.15 Indeks Infrastruktur	III-28
3.2.16 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	III-29
3.2.17 Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	III-30

3.2.18 Indeks Kesalahan Sosial	III-31
3.3 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....	III-32
3.4 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan.....	III-138
3.5 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya	III-150

BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS

PEMBANTUAN DAN PENUGASAN..... IV-1

4.1 Urusan Pemerintah yang Ditugas Pembantuan.....	IV-2
4.1.1 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diterima dari Pemerintah Tingkat di atasnya	IV-4
4.1.2 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan Pemerintahan dibawahnya.....	IV-7
4.2 Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian	IV-27

BAB V PENUTUP V-1

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Sumenep	I-14
Tabel 1.2 Topografi Kabupaten Sumenep.....	I-15
Tabel 1.3 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk se Kabupaten Sumenep	I-17
Tabel 1.4 Perkembangan Kependudukan Kabupaten Sumenep Tahun 2019-2023	I-18
Tabel 1.5 Aparatur Sipil Negara Menurut Jenis Kelamin	I-20
Tabel 1.6 Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Usia	I-20
Tabel 1.7 Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Golongan	I-21
Tabel 1.8 Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Jenjang Pendidikan	I-21
Tabel 1.9 Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Eselon.....	I-21
Tabel 1.10 Tabel Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023	I-22
Tabel 1.11 Tabel Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja	I-23
Tabel 1.12 Tabel Realisasi Pembiayaan	I-25
Tabel 1.13 Tabel Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022	I-26
Tabel 2.1 Perubahan Penjabaran Pendapatan Daerah Tahun 2023	II-4
Tabel 2.2 Perubahan Penjabaran Belanja Daerah Tahun 2023.....	II-9
Tabel 2.3 Perubahan Penjabaran Pembiayaan Daerah	

Tahun 2023	II-11
Tabel 3.1 Capaian Indikator Makro Kabupaten Sumenep	III-2
Tabel 3.2 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia antara nasional, provinsi dan kabupaten	III-3
Tabel 3.3 Dimensi Penyusun Indeks Pembangunan Manusia ..	III-4
Tabel 3.4 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumenep	III-5
Tabel 3.5 Persentase Penduduk Miskin	III-6
Tabel 3.6 Kinerja bidang ketenagakerjaan	III-7
Tabel 3.7 Capaian TPT dibandingkan antara Nasional, Provinsi dan Kabupaten.....	III-8
Tabel 3.8 Capaian Indikator Gini Kabupaten Sumenep	III-9
Tabel 3.9 Perbandingan Capaian Indikator Gini Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Sumenep.....	III-9
Tabel 3.10 Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2024	III-10
Tabel 3.11 Pendapatan per Kapita (ADHB).....	III-12
Tabel 3.12 Pengeluaran per Kapita Riil Disesuaikan.....	III-13
Tabel 3.13 Persentase Pengurangan wilayah Kantong Kemiskinan	III-14
Tabel 3.14 Indeks Pendidikan.....	III-14
Tabel 3.15 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	III-15
Tabel 3.16 Indeks Kesehatan dan Persentase Pravelensi Stunting	III-16
Tabel 3.17 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	III-18
Tabel 3.18 Indeks Pembangunan Pemuda	III-19

Tabel 3.19 Laju Pertumbuhan PDRB sektor unggulan.....	III-20
Tabel 3.20 Nilai realisasi investasi.....	III-21
Tabel 3.21 Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	III-22
Tabel 3.22 Indeks SPBE, Capaian Akuntabilitas Keuangan dan Capaian Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	III-23
Tabel 3.23 Indeks BerAKHLAK dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	III-26
Tabel 3.24 Indeks Reformasi Birokrasi Tematik.....	III-27
Tabel 3.25 Indeks Infrastruktur.....	III-29
Tabel 3.26 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	III-30
Tabel 3.27 Indeks Reformasi Birokrasi	III-31
Tabel 3.28 Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Sumenep	III-32
Tabel 3.29 Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Sumenep 2021-2024	III-32
Tabel 3.30 Capaian Program Dan Kegiatan Kabupaten Sumenep Tahun 2024.....	III-34
Tabel 3.31 Kebijakan Strategis Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2024.....	III-138
Tabel 3.32 Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran 2024	III-151
Tabel 4.1 Alokasi dan Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program Urusan Pertanian Tahun 2024	IV-5
Tabel 4.2 Alokasi dan Realisasi Anggaran Dana Desa di Kabupaten Sumenep Tahun 2024	IV-9

Tabel 4.3 Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi Dana Desa
di Kabupaten Sumenep Tahun 2024 IV-19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pertanggungjawaban kinerja terhadap kewenangan yang diberikan, Pemerintah Kabupaten Sumenep menyampaikan Laporan keterangan pertanggungjawaban hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan serta penugasan, meliputi capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan, kebijakan strategis yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan pelaksanaannya serta tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya, sesuai ketentuan pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya mempunyai kewajiban, “menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir”. Dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LEPPD).

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, pada Tahun 2024 Bupati berkewajiban untuk menyampaikan LKPJ Bupati Sumenep Tahun 2024 kepada DPRD. LKPJ dimaksud disusun berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-RKPD) Kabupaten Sumenep dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-ABBD) Kabupaten Sumenep Tahun 2024. Pelaksanaan kebijakan tersebut tidak terlepas dari perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2025.

LKPJ Bupati Sumenep Tahun 2024, selanjutnya akan dibahas oleh DPRD dan hasil pembahasan tersebut diharapkan dapat ditetapkan menjadi keputusan DPRD Kabupaten Sumenep, yang dijadikan sebagai rekomendasi untuk dasar perbaikan penyelenggaraan pemerintahan diwaktu yang akan datang.

1.2. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum penyusunan LKPJ Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembarana Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 01);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
24. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 Nomor 26);
25. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

1.3. Visi dan Misi Kepala Daerah

1.3.1. Visi

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Capaian keberhasilan penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Sumenep yang sudah dilaksanakan selama ini, harus terus dipelihara dan ditumbuhkembangkan, sebagai modal dasar untuk meraih capaian dan prestasi pembangunan yang lebih baik pada masa mendatang.

Dalam upaya melaksanakan pembangunan yang lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya saing, dengan mempertimbangkan potensi daerah, tantangan maupun ancaman di masa mendatang Pemerintah Kabupaten Sumenep bersama dengan DPRD telah menetapkan visi, misi, dan strategi dalam mencapai harapan yang ingin diwujudkan dalam Peraturan Daerah (PERDA) No. 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026, untuk mendorong perkembangan usaha masyarakat yang

makin mandiri, kesejahteraan rakyat, dan mengurangi kesenjangan atau disparitas antara wilayah kepulauan dan wilayah daratan dengan didukung berbagai fasilitas layanan publik yang sesuai dengan standart pelayanan minimal (SPM), serta kinerja aparat pemerintahan yang bersih, kreatif, inovatif, disiplin, dan akuntabel.

Visi adalah rumusan general berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dengan adanya visi, maka segala sumber daya dapat digunakan secara terarah, guna mewujudkan kondisi akhir yang dicita-citakan melalui serangkaian tahapan kegiatan. Oleh karena itu, visi pembangunan mempunyai berbagai fungsi diantaranya:

- a. sebagai arah bagi semua kebijakan pembangunan;
- b. sebagai tujuan dan sasaran akhir yang hendak dicapai oleh kebijakan pembangunan;
- c. sebagai acuan dalam penyusunan program dan anggaran pembangunan dan;
- d. sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap semua kebijakan pembangunan.

Berangkat dari tinjauan filosofis, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumenep, serta memperhatikan perkembangan dan kondisi terkini masyarakat Sumenep, maka penentuan visi pembangunan dengan misi dan strategi pencapaiannya amatlah penting, agar proses pembangunan dapat dilaksanakan dengan arah dan kebijakan yang jelas. Oleh karena itu, untuk menjawab permasalahan dan isu strategis daerah ke depan maka Visi pembangunan Kabupaten Sumenep yang ingin diwujudkan pada periode 2021-2026 adalah

“Sumenep Unggul, Mandiri dan Sejahtera”

Visi Kabupaten Sumenep dimaksud memiliki 3 makna penting yang perlu dipahami bersama yaitu : Sumenep Unggul, Mandiri dan Sejahtera.

1. UNGGUL

Unggul dalam kualitas hidup khususnya pendidikan, kesehatan, dan serapan tenaga kerja. Disisi lain, unggul dalam peningkatan ekonomi masyarakat, terbaik dalam pelayanan publik, terdepan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan unggul dalam penataan infrastruktur.

2. MANDIRI

Memiliki makna optimalisasi potensi diri sehingga mampu meminimalisir ketergantungan kepada pemerintah pusat. Demikian juga, masyarakat dalam proses pembangunan tidak semata-mata bergantung kepada pemerintah daerah, namun kemampuan melibatkan swasta/stakeholders yang lain.

3. SEJAHTERA

Memiliki arti semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat, yang diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pula pada menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran, daya beli masyarakat semakin tinggi serta peningkatan keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Sebagai upaya dalam mewujudkan visi Kabupaten Sumenep untuk meningkatkan kesejahteraan yang lebih mandiri merefleksikan sikap dan komitmen untuk mencetak masyarakat yang lebih unggul, mandiri dan sejahtera, maka dirumuskan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep periode 2021-2026 sebagai berikut:

1.3.2. Misi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi dalam RPJMD dikembangkan dengan

memperhatikan faktor-faktor lingkungan eksternal dan internal yang strategis dan berpengaruh, serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah di Kabupaten Sumenep. Rumusan misi tersebut diupayakan memenuhi substansi tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 sebagai upaya untuk menjabarkan setiap misi yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam kurun waktu 2021-2026. Setiap misi memaknai target pencapaian daerah sebagai berikut:

1. Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Berdaya Saing

Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Ketenaga Kerjaan. Pada misi Pertama berfokus pada sektor pendidikan, kesehatan dan tenaga kerja yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas SDM. Konstruksi pendidikan dalam konteks ini bahwa pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Ini berarti bahwa setiap manusia berhak mendapat pendidikan maksimal dan jaminan mutu pendidikan. Komitmen peningkatan mutu pendidikan akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai modal utama untuk memajukan pembangunan khususnya di Kabupaten Sumenep, yang terdiri dari daratan dan kepulauan. Peningkatan pendidikan dalam misi melalui program peningkatan kompetensi pendidik, kesejahteraan guru honorer, guru ngaji dan guru madrasah diniyah serta support bantuan sarana dan prasarana serta stimulus program beasiswa berprestasi bagi siswa dan tenaga pendidik baik dilingkungan sekolah umum maupun diniyah.

Kesehatan sebagai salah satu hak dasar rakyat yang dilindungi undang-undang saat ini terus dibangun dan ditingkatkan. Pembangunan kesehatan merupakan komponen penting dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Dengan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, pembangunan kesehatan sangat mendukung pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan. Pandangan diatas bisa terwujud bila diimbangi dengan sistem pelayanan yang baik, sumber daya manusia yang handal serta ditunjang sarana dan prasarana yang memadai. Sisi yang lain

ikhtiar peningkatan status akreditasi BLUD puskesmas dan membangun Rumah Sakit Tipe D di tiap eks pembantu bupati. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sumenep tergolong rendah di Jawa Timur, namun kesejahteraan masih tergolong rendah. Oleh karena itu kualitas Ketenagakerjaan menjadi salah satu fokus dalam meningkatkan daya saing SDM.

2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Ekonomi

Berbasis Kawasan dari Hulu ke Hilir. Misi ini dalam rangka memperkuat kemajuan ekonomi masyarakat lokal dengan menggerakkan sektor unggulan daerah (desa/kecamatan); yaitu sektor pertanian pangan, dengan penyediaan sarana dan prasarana seperti peningkatan/pembangunan irigasi atau sumber mata air dengan kelengkapan peralatan yang didukung sarana produksi, bibit unggul, pupuk berimbang serta alat produksi modern yang ramah lingkungan. Sektor pertanian ini dapat ditingkatkan lagi dengan mencobakan komoditas unggulan yang memiliki nilai jual tinggi dan efisiensi produksi yang dikerjakan dengan pola budidaya terpadu serta pengembangan sistem budidaya produksi dari hulu-hilir yang terkendali dalam tata organisasi yang terpadu dan terkendali dengan baik untuk mencapai nilai tambah yang optimal, meningkatnya swasembada beras, swasembada pangan menuju ketahanan pangan; Bidang peternakan, usaha untuk menguatkan populasi ternak yang ada di Sumenep yang kian hari semakin sedikit. Oleh sebab itu penting dilakukan terobosan yang efektif dengan memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat dan stakeholders melalui sistem peternakan yang modern yaitu inseminasi bibit ternak. Demikian pula sektor kelautan dan perikanan, melalui konsep budaya bahari dengan melibatkan masyarakat secara holistic dan pengembangan yang terintegrasi dengan pusat pelelangan ikan, cold storage dari hulu ke hilir. Sumenep banyak potensi pariwisata yang harus dimaksimalkan sehingga berdampak pada penguatan sektor ekonomi masyarakat. Konsepnya adalah pemerintah daerah bersama masyarakat serta melibatkan swasta dalam pengembangan pariwisata di Sumenep tanpa mencerabut nilai-nilai local wisdom. Pemanfaatan berbagai sumber daya

alam dan sumber daya manusia dengan sebaik-baiknya sehingga mampu menarik wisatawan dalam dan luar negeri untuk berkunjung ke Sumenep.

- 3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Inovatif dan Responsif dalam Melayani Masyarakat.** Proses pembangunan wajib didukung oleh semangat transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditandai dengan; terwujudnya sistem pelaporan dan kinerja instansi pemerintah; peningkatan akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah; makin efektifnya penerapan e-government untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern; dan peningkatan implementasi open government pada seluruh instansi pemerintah. Dalam kaitan ini tantangan utamanya adalah meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Sisi lainnya adalah keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, ditekankan pada peningkatan akses masyarakat terhadap informasi publik, dan peningkatan implementasi open government secara terpadu pada seluruh instansi pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa.
- 4. Melaksanakan Pembangunan Berazas Gotong Royong dan Berkearifan Lokal.** Masalah sosial senantiasa hadir di berbagai negara, dengan kompleksitas masalah sosial seperti masalah pengangguran dan kemiskinan, kenakalan remaja dan seks bebas, kekurangan gizi dan penyakit menular. Dengan memperhatikan keberagaman masyarakat, dilihat dari latar belakang sosial ekonomi, budaya, dan geografi, pembangunan manusia dilakukan secara kohesif dan inklusif sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh komponen masyarakat, tanpa membedakan latar belakang mereka. Pengentasan masalah sosial tidak semata-mata menjadi kewajiban negara (pemerintah daerah), namun semangat gotong royong yang merupakan watak, karakter dan kepribadian masyarakat kita yang harus diperkuat.
- 5. Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Hidup yang Berimbang Antara Daratan dan Kepulauan.** Pembangunan Infrastruktur diprioritaskan untuk wilayah kepulauan, hal ini

dimaksudkan untuk mengurangi disparitas dengan pembangunan di wilayah daratan. Oleh sebab itu, penting dilakukan percepatan pembangunan jalan-jalan strategis, irigasi untuk menambah produktivitas hasil pertanian dan perdagangan hasil bumi serta sarana telekomunikasi dan listrik 24 jam.

1.3.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Dalam mewujudkan visi Kabupaten Sumenep 2021-2026 melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada masing-masing misi diuraikan sebagai berikut :

1. Tujuan dari misi 1 adalah :
 - Meningkatkan Sumberdaya Manusia Yang Berdaya Saing;
2. Tujuan dari misi 2 adalah :
 - Meningkatkan Derajat dan Kemandirian Ekonomi Masyarakat;
3. Tujuan dari misi 3 adalah :
 - Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Tanggap Dan Inovatif;
4. Tujuan dari misi 4 adalah :
 - Mewujudkan Harmonisasi Sosial Yang Berkearifan Lokal;
5. Tujuan dari misi 5 adalah :
 - Meningkatkan Pemerataan Kualitas Dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan;

Tujuan pembangunan diatas kemudian perlu dijelaskan ke dalam sasaran pembangunan. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu

tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun dan Sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran Misi 1 adalah :
 - a. Meningkatnya Kualitas dan Aksesbelitas Layanan Dasar Pendidikan;
 - b. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;
 - c. Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja dan partisipasi Perempuan Terhadap pembangunan Daerah;
2. Sasaran Misi 2 adalah :
 - a. Menurunkan Kesenjangan;
 - b. Meningkatnya Pendapatan Perkapita;
 - c. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah;
 - d. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan;
3. Sasaran Misi 3 adalah :
 - a. Meningkatnya Layanan Publik Yang Inovatif Berbasis E-government;
 - b. Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah;
 - c. Terwujudnya Birokrasi Yang Akuntabel Dan Transparan;
4. Sasaran Misi 4 adalah :
 - a. Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Di Masyarakat;
 - b. Meningkatnya Solidaritas Sosial Di Masyarakat;
 - c. Terwujudnya nilai-nilai Gotong Royong dan Toleransi dalam kehidupan Masyarakat;
5. Sasaran Misi 5 adalah :
 - a. Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur Yang Merata;
 - b. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.

1.4 Data Umum Daerah

1.4.1. Data Geografis Wilayah

1. Letak Wilayah

Kabupaten Sumenep merupakan salah satu dari 4 (empat) Kabupaten yang ada di Pulau Madura Provinsi Jawa Timur yang terletak diantara 113° 32' 54" – 116° 16' 48" Bujur Timur dan 4° 55' – 7° 24' Lintang Selatan

dengan dengan batas wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Sumenep adalah :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Laut Jawa
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Selat Madura
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Laut Jawa/Laut Flores
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Pamekasan

2. Luas Wilayah

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 11 Tahun 2006 tentang Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Sumenep, wilayah administrasi Kabupaten Sumenep seluas 2.093,458 km, yang terbagi menjadi 27 wilayah Kecamatan, 330 Desa dan 4 Kelurahan, 1,564 Dusun, 1.774 Rukun Warga (RW), 5.569 Rukun Tetangga (RT), dengan jumlah pulau sebanyak 126 pulau yaitu 48 pulau berpenghuni dan 78 pulau tidak berpenghuni.

Secara geografis wilayah Kabupaten Sumenep terbagi atas 2 (dua) wilayah yaitu Wilayah Daratan dan Kepulauan;

- Wilayah Daratan dengan luas 1.146,93 Km² (54,79%) terdiri dari 18 Kecamatan.
- Wilayah kepulauan dengan luas 946,54 Km² (45,21%) terdiri dari 9 Kecamatan.

Berdasarkan gugusan pulau-pulau yang ada di Kabupaten Sumenep, pulau terjauh/paling utara adalah pulau Karamian Kecamatan Masalembu, dengan jarak tempuk lebih kurang 151 mil dari Pelabuhan Kalianget yang lebih dekat dengan Pulau Kalimantan. Sedangkan pulau yang paling timur adalah pulau Sakala Kecamatan Sapeken dengan jarak tempuh lebih kurang 165 mil dari pelabuhan Kalianget yang lebih dekat dengan Pulau Sulawesi.

Tabel 1.1**Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Sumenep**

No.	Kecamatan	Jumlah		Luas (Km2)
		Desa/Kel.	Dusun	
1.	Kota Sumenep	12/4	43	27,84
2.	Batuan	7	23	27,10
3.	Kalianget	7	26	30,19
4.	Manding	11	49	68,88
5.	Talango	8	62	50,27
6.	Bluto	20	60	51,25
7.	Saronggi	14	54	67,71
8.	Lenteng	20	79	71,41
9.	Giligenting	8	40	30,32
10.	Guluk-guluk	12	70	59,57
11.	Ganding	14	73	53,97
12.	Pragaan	14	72	57,84
13.	Pasongsongan	10	68	119,03
14.	Ambunten	15	53	50,54
15.	Dasuk	15	56	64,50
16.	Rubaru	11	37	84,46
17.	Batang-Batang	16	98	80,36
18.	Batu Putih	14	78	112,31
19.	Dungkek	15	66	63,35
20.	Gapura	17	57	65,78
21.	Gayam	10	58	88,40
22.	Nonggunong	8	29	40,08
23.	Ra'as	9	38	38,90
24.	Masalembu	4	11	40,85
25.	Arjasa	19	156	241,99
26.	Kangayan	9	46	204,68
27.	Sapeken	11	62	201,89
JUMLAH		334	1.564	2.093,47

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep Tahun 2024

3. Topografi

Topografi Kabupaten Sumenep umumnya tergolong **dataran rendah** dengan **sedikit berbukit** di sebagian wilayahnya, mempunyai ketinggian tempat **sedang** dan kemiringan tanah *landai*, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Topografi Kabupaten Sumenep

No	Kategori	Uraian	Luas (Ha)
A.	Wilayah Ketinggian		
	1. Ketinggian	0 – 500 m dpl	208.697,40
	2. Ketinggian	500 – 1000 m dpl	578,42
B.	Wilayah Kemiringan		
	1. Kemiringan	0 – 2 %	128.121,43
	2. Kemiringan	2 – 5 %	34.733,40
	3. Kemiringan	5 – 15 %	33.460,10
	4. Kemiringan	15 – 30 %	9403,12
	5. Kemiringan	> 30 %	3786,21

Sumber : Dokumen RTRW Kabupaten Sumenep Tahun 2023-2045

4. Geologi

Kondisi geologi lahan adalah kandungan isi bumi (tanah) yang terkait dengan bahan-bahan pertambangan. Kondisi Geologi di Kabupaten Sumenep menunjukkan adanya dominasi pada alluvium sebanyak 19% kemudian batuan Pistosewn Fasies Sedimen serta Antiklinnya sebanyak 29%, bahan-bahan tersebut berpotensi sebagai bahan tambang.

5. Klimatologi

Secara umum kondisi geografi kabupaten Sumenep dilihat dari curah hujan tidak jauh beda dengan tempat lain. Pengamatan curah hujan di Stasiun Meteorologi Trunojoyo menggunakan alat Penakar Hujan Observasi (obs) dan Penakar Hujan Otomastis type Heliman. Penakar Hujan Observasi (obs) adalah alat pengukur jumlag curah hujan tipe biasa, sedangkan Penakar Hujan type Heliman adalah alat pengukur intensitas hujan atau jumlah hujan persatuan waktu. Curah Hujan diukur dalam satuan mm (milimeter). Curah hujan sampai dengan bulan desember sebesar 428.8 mm.

Penyinaran matahari paling tinggi terjadi pada bulan september dan bulan oktober memancarkan sinarnya sebesar 99.8 %. Sebaliknya sinar

matahari agak terganggu sehingga tidak maksimal, terjadi pada bulan desember sebesar 36.7 %. Meskipun matahari memancarkan sinarnya dengan persentase relative tinggi, bukan berarti pada bulan-bulan itu suhu udara berada pada titik paling tinggi. Sebab menurut catatan yang ada, suhu udara tertinggi sebesar 30.8 derajat celcius pada bulan Oktober, dan suhu udara menunjukkan titik terendah yakni 28.1 derajat celcius pada bulan Juli dan Desember.

Data geografi lain adalah kecepatan angin terbanyak bertiup dari arah Tenggara. Kecepatan angin rata-rata sebesar 3.4 Knots . Kecepatan angin rata-rata tertinggi sebesar 5.1 Knots , sedangkan kecepatan angin rata-rata terendah sebesar 2.9 Knots. Sedangkan kecepatan angin maksimum tercatat sebesar 6.3 Knots terjadi pada bulan September 2024.

1.4.2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Sumenep berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DKB Semester II Tahun 2024) sebanyak 1.143.002 jiwa dengan komposisi jenis kelamin laki-laki 552.127 jiwa (48%) dan perempuan 590.875 jiwa (52%) dengan sex ratio sebesar 93,44%. Ini berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 93 penduduk laki-laki. Angka ini menunjukkan bahwa penduduk perempuan berjumlah lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki.

Sedangkan berdasarkan data BPS jumlah Penduduk Kabupaten Sumenep pada tahun 2024 sebanyak 1.143.002 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 93,44%.

Penduduk Kabupaten Sumenep terdiri dari 5 suku bangsa yaitu: Madura, Jawa, Bugis, Mandar dan Bajoe. Dari kelima suku bangsa tersebut 3 suku bangsa, yaitu : Bugis, Mandar dan Bajoe berada di daerah kepulauan, yaitu: Kangean, Masalembu dan Sapeken yang lebih dekat ke Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi. Sedangkan suku Madura merupakan suku mayoritas bertempat di wilayah daratan dan sebagian kecil di kepulauan.

Tabel 1.3**Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk se Kabupaten Sumenep**

No	Kecamatan	Nama ibu Kota Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah KK	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
1	Kota Sumenep	Pamolokan	76.701	26.315	27,84	2.755
2	Kalianget	Kalianget Timur	42.697	15.767	30,19	1.414
3	Manding	Manding Laok	30.611	10.392	68,88	444
4	Talango	Talango	38.720	14.220	50,27	770
5	Bluto	Bunbungan	49.765	16.890	51,25	971
6	Saronggi	Tanamerah	39.007	14.365	67,71	576
7	Lenteng	Ellak Laok	62.606	21.269	71,41	877
8	Giligenting	Aenganyar	24.006	8.740	30,32	792
9	Guluk-guluk	Guluk-guluk	50.498	16.070	59,57	848
10	Ganding	Ketawang Larangan	37.326	12.103	53,97	692
11	Pragaan	Pragaan Laok	67.621	23.063	57,84	1.169
12	Ambunten	Ambunten Timur	40.832	14.972	50,54	808
13	Pasongsongan	Panaongan	52.023	16.791	119,03	437
14	Dasuk	Kerta Timur	31.424	11.144	64,50	487
15	Rubaru	Rubaru	40.681	12.858	84,46	482
16	Batang-batang	Batang-batang Daya	55.781	20.338	80,36	694
17	Batuputih	Batuputih Laok	45.000	16.234	112,31	401
18	Dungkek	Dungkek	36.821	14.546	63,35	581
19	Gapura	Gapura Barat	38.871	13.994	65,78	591
20	Gayam	Pancor	32.012	13.490	88,40	362
21	Nonggunong	Sokarame Paseser	13.597	5.744	40,08	339
22	Raas	Brakas	32.420	12.079	38,90	833
23	Masalembu	Sukajeruk	25.550	9.407	40,85	625
24	Arjasa	Kalikatak	83.986	31.421	241,99	347
25	Sapeken	Sapeken	55.416	17.914	201,89	274
26	Batuan	Batuan	13.852	4.873	27,10	511
27	Kangayan	Kangayan	25.178	10.180	204,68	123
TAHUN 2024			1.143.002	405.179	2.093,47	546,00
TAHUN 2023			1.142.210	401.672	2.093,47	546,00
TAHUN 2022			1.135.903	396.795	2.093,47	542,59
TAHUN 2021			1.134.810	388.876	2.093,47	542,00
TAHUN 2020			1.138.168	383.973	2.093,47	544,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024

Pada tabel diatas, Kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar tahun 2024 adalah Kecamatan Arjasa sebanyak 83.986 jiwa atau sekitar 7,35% dari total jumlah penduduk, sedangkan Kecamatan Nonggunong memiliki jumlah

penduduk terkecil yaitu sebanyak 13.597 jiwa atau 1,19 % dari total jumlah penduduk. Dengan luas wilayah ± 2.093,47 km², maka tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Sumenep pada tahun 2024 adalah 546 jiwa/km².

1.4.3. Pertumbuhan Penduduk

Dinamika Penduduk adalah perubahan/pertumbuhan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan karena adanya peristiwa kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Sedangkan dalam demografi dikenal istilah penambahan penduduk alami dan penambahan penduduk total. Dimana penambahan penduduk alami hanya di pengaruhi oleh kelahiran dan kematian, sedangkan penambahan penduduk total di pengaruhi oleh kelahiran, kematian, migrasi masuk (imigrasi) dan migrasi keluar (emigrasi).

Berikut tabel jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk Tahun 2020-2024 di Kabupaten Sumenep berdasarkan BPS dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil :

Tabel 1.4

Perkembangan Kependudukan Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024

URAIAN	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk :						
- B P S	jiwa	1.124.436	1.133.224	1.136.632	1.142.210	1.143.002
- Dispenduk & Capil	jiwa	1.138.168	1.134.810	1.135.903	1.142.210	1.143.002
Pertumbuhan penduduk:						
- B P S	%	3,26	0,78	1,08	1,58	0,42
- Dispenduk & Capil	%	0,36	0,29	0,10	0,56	0,19*
Kepadatan penduduk :						
- BPS	jiwa/km ²	537,11	537,11	542,94	546,00	546,00
- Dispenduk & Capil	jiwa/km ²	544	542	542	546,00	546,00

Sumber: Badan Pusat Statistik 2024

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2024

BAPPEDA Sumenep (diolah)

Berdasarkan data BPS, laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2020 sampai dengan 2021 mengalami penurunan. Namun pada tahun 2022 laju

pertumbuhan penduduk mengalami kenaikan menjadi 1,08 %, pada Tahun 2023 meningkat menjadi 1,58 % dan pada Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,42%.

Sedangkan laju pertumbuhan penduduk menurut data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2020 sampai dengan 2021 mengalami penurunan, juga pada tahun 2022 laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan menjadi 0,10 %, pada Tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 0,56% kemudian pada Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,19%.

1.4.4. Jumlah ASN

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. ASN terdiri dari dua kategori yaitu PNS dan PPPK. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Sedangkan, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

PNS dan PPPK juga memiliki hak sebagai aparatur sipil negara. PPPK sebagaimana dimaksud, diberikan gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selain itu, dalam rangka pengembangan kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas, PPPK dan PNS diberikan kesempatan untuk pengetahuan sesuai dengan perencanaan pengembangan kompetensi pada Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, disebut bahwa ASN terdiri dari PNS dan PPPK, pada Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa : “Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi

pemerintah”, dan ayat (2) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Perkembangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Sumenep berdasarkan Jenis kelamin, Usia, Golongan, jenjang Pendidikan dan eselon sejak tahun 2020 s/d 2024 dapat diuraikan pada table berikut ini :

Tabel 1.5
Aparatur Sipil Negara Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	2020	2021	2022	2023	2024
Laki – Laki	5.746	5.477	5.697	5.381	5.189
Wanita	3.191	3.269	3.645	3.655	3.626
Total	8.937	8.746	9.342	9.036	8.815

Sumber: Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) BKPSDM Kab. Sumenep Per 31 Des 2024

Tabel 1.6
Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Usia

Usia	2020	2021	2022	2023	2024
Usia >55	1.662	1.524	1.372	1.299	1.304
Usia 45-55	3.631	3.747	3.802	3.691	3.253
Usia 36-45	2.637	2.696	3.232	3.159	3.373
Usia 25-35	949	755	922	884	877
Usia <25	58	24	14	3	8
Total	8.937	8.746	9.342	9.036	8.815

Sumber: Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) BKPSDM Kab. Sumenep Per 31 Des 2024

Tabel 1.7
Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Golongan

Golongan	2020	2021	2022	2023	2024
Golongan I	135	110	104	69	46
Golongan II	1.836	1.671	1.590	1.377	1.248
Golongan III	4.659	4.672	5.607	5.773	5.924
Golongan IV	2.307	2.293	2.041	1.817	1.597
Total	8.937	8.746	9.342	9.036	8.815

Sumber : Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) BKPSDM Kab. Sumenep Per 31 Des 2024

Tabel 1.8
Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
S-3	2	4	5	6	7
S-2	476	488	561	620	597
S-1	4.947	5.272	6.082	6.031	6.041
D-III	1.050	1.027	1.017	976	972
D-II	352	187	134	93	73
D-I	25	14	12	11	10
SLTA	1887	1.590	1.367	1.181	1.024
SLTP	91	108	105	80	62
SD	107	56	59	38	29
Total	8.937	8.746	9.342	9.036	8.815

Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) BKPSDM Kab. Sumenep Per 31 Des 2024

Tabel 1.9
Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Eselon

Eselon	2020	2021	2022	2023	2024
Eselon II	28	27	30	24	30
Eselon III	194	170	162	177	173
Eselon IV	669	604	277	225	287
Eselon V	-	-	-	-	-
Fungsional	5.387	4.288	4.861	4.893	4.845
Pelaksana/Staf	2.659	3.657	4.012	3.717	3.480
Total	8.937	8.746	9.342	9.036	8.815

Sumber: Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) BKPSDM Kab. Sumenep Per 31 Des 2024

1.4.5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan adalah merupakan semua penerimaan uang melalui Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Sumber Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pengelolaan Pendapatan Daerah bertujuan untuk mengoptimalkan sumber Pendapatan Daerah dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah dengan tujuan memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan di daerah untuk dapat peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 2.602.527.403.981,84. Kontribusi terhadap pendapatan daerah berasal dari berbagai komponen pendapatan yang terdiri atas (a) Pendapatan Asli Daerah dan (b) Pendapatan Transfer yang didalamnya ada dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah, Dana Desa dan Bantuan Keuangan serta (c) Lain-Lain Pendapatan yang Sah.

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep pada APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 tersebut dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 1.10
Tabel Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
		Rp.	Rp.	
4	PENDAPATAN DAERAH	2.602.527.403.981,84	2.670.464.610.031,65	102,61
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	272.745.782.565,56	304.075.419.317,65	111,49
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	45.708.496.000,00	53.588.069.906,48	117,24
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	201.408.268.433,00	223.456.637.913,27	110,95
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	13.942.861.230,00	13.742.861.230,09	98,57

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
		Rp.	Rp.	
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	11.686.156.902,56	13.287.850.267,81	113,71
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.319.306.285.416,28	2.358.762.479.605,00	101,70
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.181.234.616.625,28	2.185.426.476.605,00	100,19
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	138.071.668.791,00	173.336.003.000,00	125,54
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	10.475.336.000,00	7.626.711.109,00	72,81
4.3.01	Pendapatan Hibah	10.475.336.000,00	7.626.711.109,00	72,81

Sumber : BPPKAD 2024 (unaudited)

1.4.6. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana di satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam 1 tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud.

Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik dari tahun ke tahun. Alasan kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan layanan, dan penyesuaian faktor makro ekonomi. Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang, sebab jika tidak maka dalam jangka menengah dapat mengganggu kesinambungan dan kesehatan fiskal daerah.

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sumenep pada APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 tersebut dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 1.11
Tabel Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
		Rp.	Rp.	
5	BELANJA DAERAH	3.038.717.795.834,00	2.794.815.601.999,57	91,97

KODE	URAIAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%
5.1	BELANJA OPERASI	2.052.581.620.310,00	1.847.276.807.780,97	90,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.099.877.586.899,00	990.835.724.999,00	90,09
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	723.088.585.409,00	654.864.565.509,97	90,56
5.1.04	Belanja Subsidi	4.146.496.980,00	3.828.024.871,00	92,32
5.1.05	Belanja Hibah	220.683.247.022,00	193.452.986.470,00	87,66
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.785.704.000,00	4.295.505.931,00	89,76
5.2	BELANJA MODAL	376.798.868.902,00	344.164.475.168,60	91,34
5.2.01	Belanja Modal Tanah	8.180.000.000,00	7.862.474.000,00	96,12
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	104.788.775.595,00	93.690.514.321,00	89,41
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	157.143.705.188,00	148.354.731.036,03	94,41
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	99.179.130.317,00	93.858.255.811,57	94,64
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.507.257.802,00	398.500.000,00	5,31
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00	1.438.458.850,00	28,77
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	1.438.458.850,00	28,77
5.4	BELANJA TRANSFER	604.337.306.622,00	601.935.860.200,00	99,60
5.4.01	Belanja Bagi Hasil Pendapatan	6.042.048.000,00	5.997.109.000,00	99,26
5.02	Transfer/Bantuan Keuangan	598.295.258.622,00	595.938.751.200,00	99,61

Sumber : BPPKAD 2024 (unaudited)

1.4.7. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Penerimaan pembiayaan mencakup:

- a. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)
- b. Transfer dari Dana Cadangan
- c. Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah
- d. Penerimaan dana dari transfer deposito

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah daerah. Pengeluaran pembiayaan mencakup:

- a. Transfer ke Dana Cadangan
- b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Gambaran realisasi Pembiayaan Daerah yang disajikan merupakan informasi mengenai rata-rata perkembangan/kenaikan realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Kabupaten Sumenep sebagaimana tertuang pada Tabel berikut:

TABEL 1.12
Tabel Realisasi Pembiayaan

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
6	Pembiayaan	436.190.391.852,16	441.245.508.105,10	101,16
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	473.415.391.852,16	476.245.508.105,10	100,60
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	410.917.771.655,16	410.917.771.655,16	100,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	62.400.000.000,00	65.096.093.898,94	104,32
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	97.620.197,00	231.642.551,00	237,29
6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	37.225.000.000,00	35.000.000.000,00	94,02
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	100,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	12.225.000.000,00	10.000.000.000,00	81,80

Sumber : BPPKAD 2024 (unaudited)

1.4.8. Realisasi Belanja masing-masing SKPD

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan bagian dari Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi)nya tersebut, SKPD diberikan alokasi dana (anggaran) dan barang/aset yang dibutuhkan.

Sebagai dasar pertanggungjawaban atas kewenangan yang mencakup seluruh pengeluaran yang dilakukan, SKPD diminta untuk membuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai wujud pertanggungjawaban kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran setiap tahunnya. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) masing SKPD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.13

Tabel Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024

KODE REKENING				PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN 2024	REALISASI	%
1	1	1	0	DINAS PENDIDIKAN	782.062.517.256,00	665.663.574.300,00	85,12%
1	2	1	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	461.458.183.245,00	404.370.551.746,00	87,63%
1	2	1	1	RSUD. H.MOH ANWAR	160.556.234.752,00	159.002.250.401,35	99,03%
1	3	1	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	232.249.394.492,00	224.199.850.339,00	96,53%
1	4	1	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	63.945.160.087,00	60.999.337.078,57	95,39%
1	5	1	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	14.432.390.058,00	13.572.687.594,00	94,04%
1	5	4	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	7.356.429.740,00	6.368.672.064,00	86,57%
1	6	1	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	27.400.480.267,00	25.128.168.345,00	91,71%
2	7	1	0	DINAS KETENAGAKERJAAN	21.126.723.688,00	20.420.570.664,00	96,66%
2	9	1	0	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	92.856.554.945,00	88.436.775.103,00	95,24%
2	11	1	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	29.558.924.715,00	28.741.366.754,00	97,23%
2	12	1	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	11.787.578.965,00	10.103.585.143,00	85,71%
2	13	1	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	20.261.538.111,00	17.600.038.809,75	86,86%
2	16	1	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	24.767.902.542,00	23.626.234.126,00	95,39%
2	17	1	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	22.448.289.719,00	20.646.382.796,68	91,97%
2	18	1	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6.925.783.349,00	6.454.090.384,50	93,19%
2	19	1	0	DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	24.701.860.513,00	23.732.607.488,00	96,08%
2	23	1	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	5.887.390.459,00	5.354.102.068,00	90,94%
3	25	1	0	DINAS PERIKANAN	10.870.924.616,00	10.499.489.602,55	96,58%
4	1	1	0	SEKRETARIAT DAERAH	58.002.520.640,00	53.586.608.356,02	92,39%
4	2	1	0	SEKRETARIAT DPRD	80.503.214.458,00	76.176.467.444,00	94,63%
5	1	1	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	10.795.792.099,00	10.104.619.815,28	93,60%
5	2	1	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	667.448.277.074,00	649.716.624.715,00	97,34%

KODE REKENING				PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN 2024	REALISASI	%
5	2	2	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	9.031.089.080,00	8.098.622.137,00	89,67%
5	3	1	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	13.655.342.209,00	12.525.164.150,00	91,72%
5	5	1	0	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	4.524.923.016,00	3.927.948.654,87	86,81%
6	1	1	0	INSPEKTORAT DAERAH	17.632.943.465,00	16.045.995.192,00	91,00%
7	1	1	0	KECAMATAN KOTA SUMENEP	9.949.129.118,00	9.763.203.064,00	98,13%
7	1	2	0	KECAMATAN KALIANGET	2.673.556.925,00	2.476.748.467,00	92,64%
7	1	3	0	KECAMATAN TALANGO	2.514.127.061,00	2.338.371.265,00	93,01%
7	1	4	0	KECAMATAN MANDING	3.290.403.510,00	2.981.742.898,00	90,62%
7	1	5	0	KECAMATAN BLUTO	3.086.099.280,00	2.893.449.125,00	93,76%
7	1	6	0	KECAMATAN SARONGGI	3.014.649.484,00	2.697.394.104,00	89,48%
7	1	7	0	KECAMATAN LENTENG	2.551.061.025,00	2.397.608.946,00	93,98%
7	1	8	0	KECAMATAN GLIGENTENG	2.320.975.696,00	2.092.374.844,00	90,15%
7	1	9	0	KECAMATAN GULUK-GULUK	2.303.714.152,00	2.060.708.606,00	89,45%
7	1	10	0	KECAMATAN GANDING	2.483.123.409,00	2.317.175.498,00	93,32%
7	1	11	0	KECAMATAN PRAGAAN	2.716.850.383,00	2.580.494.008,00	94,98%
7	1	12	0	KECAMATAN RUBARU	2.538.439.177,00	2.381.693.529,00	93,83%
7	1	13	0	KECAMATAN AMBUNTEN	2.651.892.518,00	2.459.075.893,00	92,73%
7	1	14	0	KECAMATAN PASONGSONGAN	2.303.663.869,00	2.230.316.315,00	96,82%
7	1	15	0	KECAMATAN DASUK	2.315.919.892,00	2.133.479.531,00	92,12%
7	1	16	0	KECAMATAN BATANG-BATANG	3.372.950.404,00	3.186.530.585,00	94,47%
7	1	17	0	KECAMATAN BATUPUTIH	2.857.423.011,00	2.686.388.975,00	94,01%
7	1	18	0	KECAMATAN GAPURA	3.154.757.426,00	2.827.257.525,00	89,62%
7	1	19	0	KECAMATAN DUNGKEK	2.451.401.596,00	2.067.933.471,00	84,36%
7	1	20	0	KECAMATAN GAYAM	3.219.431.563,00	2.993.781.960,00	92,99%
7	1	21	0	KECAMATAN NONGGUNONG	2.488.310.482,00	2.213.115.664,00	88,94%
7	1	22	0	KECAMATAN RAAS	2.134.301.781,00	1.959.377.150,00	91,80%
7	1	23	0	KECAMATAN MASALEMBU	2.058.164.317,00	1.806.157.975,00	87,76%
7	1	24	0	KECAMATAN ARJASA	3.509.569.855,00	3.157.525.188,00	89,97%
7	1	25	0	KECAMATAN SAPEKEN	2.652.164.833,00	2.433.868.014,00	91,77%
7	1	26	0	KECAMATAN BATUAN	2.912.860.259,00	2.723.297.423,00	93,49%
7	1	27	0	KECAMATAN KANGAYAN	2.288.715.882,00	1.818.845.726,00	79,47%
8	1	1	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	76.655.775.366,00	76.035.300.979,00	99,19%
				TOTAL BELANJA DAERAH	3.038.717.795.834,00	2.794.815.601.999,57	91,97%

Sumber : BPPKAD 2024 (unaudited)

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN SUMENEP

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah. APBD berfungsi sebagai pendanaan program pembangunan yang bertujuan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang kemudian dipedomani dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan memperhatikan asumsi makro maupun acuan lain sebagai pedoman penyusunan APBD. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri atas: 1) Pendapatan Daerah, 2) Belanja Daerah, dan 3) Pembiayaan Daerah.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan APBD, apabila memenuhi ketentuan Pasal 161 Ayat (2) menyebutkan bahwa: “Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi: 1. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; 2. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja; 3. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan; 4. keadaan darurat; dan/atau 5. keadaan luar biasa.

Seiring dengan berkembang dinamika penyelenggaraan pemerintahan pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Sumenep melakukan penyesuaian terhadap APBD Tahun Anggaran 2024 melalui pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar

kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja. Hal tersebut diantaranya untuk mengakomodir hal sebagai berikut:

1. Penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Keuangan nomor 110/PMK.07/2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2024 yang mengalokasikan anggaran untuk penggajian formasi PPPK, pendanaan kelurahan, serta program – program yang mendukung capaian kinerja bidang layanan dasar pada urusan Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
2. Penyesuaian terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan Tahun 2024;
3. Penyesuaian terhadap Keputusan Menteri Keuangan Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024;
4. Penyesuaian terhadap Keputusan Menteri Keuangan Nomor 353 Tahun 2024 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota;
5. Penyesuaian terhadap Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dan Dana Pelayanan Kepariwisata Tahun Anggaran 2024;
6. Penyesuaian terhadap Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/69/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan Kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota Yang Diverifikasi Oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024;
7. Penyesuaian terhadap Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/88/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota Yang Diverifikasi Oleh Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024;

8. Penyesuaian terhadap Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/140/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan Kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota Yang Diverifikasi Oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024;
9. Penyesuaian terhadap Surat Pj. Gubernur Jawa Timur Nomor 400.10.2/3169/112.2/2024 Tentang Penyampaian Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan ke Kabupaten dan Kota Batu untuk Honorarium Aparatur Pemerintah Desa pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024;
10. Program prioritas Pemerintah Kabupaten Sumenep tahun 2024.

2.1. Perubahan Penjabaran Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep antara lain : Meningkatkan tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah dengan mengoptimalkan memanfaatkan teknologi informasi sehingga pengelolaan dapat dilakukan secara *online system* dan pembayaran dilakukan secara non tunai; Melakukan ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui updating data serta perluasan obyek dan subyek pajak dan retribusi daerah; Mengadakan peninjauan kembali (annual-review) atas berbagai regulasi terkait dengan Pajak dan Retribusi Daerah guna meningkatkan layanan, penyerderhanaan proses serta mendukung iklim investasi dan berusaha di Kabupaten Sumenep; Mengoptimalkan pengembangan sektor pariwisata melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha sektor pariwisata, pengembangan destinasi, pemasaran dan sarana prasarana pariwisata sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi wisata di Kabupaten Sumenep; Mengoptimalkan pengelolaan dan penanganan piutang Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melalui kegiatan pemutakhiran data base, perluasan kanal-kanal pembayaran serta pemberian insentif berupa penghapusan sanksi administrative PBB-P2.

Perubahan postur pendapatan daerah tahun 2024 didasarkan pada regulasi pusat maupun provinsi, diantaranya terkait Bantuan Keuangan Provinsi, Dana Alokasi Khusus (DAK), DBH CHT, Pajak Rokok. Selain itu terdapat penyesuaian pada sisi Pendapatan Asli Daerah. Secara garis besar perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 dapat ditunjukkan melalui tabel berikut :

Tabel : 2.1
Perubahan Penjabaran Pendapatan Daerah Tahun 2024

KODE	U R A I A N	ANGGARAN 2024 Rp.	ANGGARAN PERUBAHAN 2024 Rp.	SELISIH Rp.
4	PENDAPATAN DAERAH	2.506.975.081.086,00	2.602.527.403.981,84	95.552.322.895,84
4.1	PENDAPATANASLI DAERAH (PAD)	257.095.557.601,00	272.745.782.565,56	15.650.224.964,56
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	42.942.000.000,00	45.708.496.000,00	2.766.496.000,00
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	10.070.004.579,00	201.408.268.433,00	191.338.263.854,00
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	15.420.000.000,00	13.942.861.230,00	(1.477.138.770,00)
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	188.663.553.022,00	11.686.156.902,56	(176.977.396.119,44)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.239.404.187.485,00	2.319.306.285.416,28	79.902.097.931,28
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.133.259.292.838,00	2.181.234.616.625,28	47.975.323.787,28
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	106.144.894.647,00	138.071.668.791,00	31.926.774.144,00
4.3	LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	10.475.336.000,00	10.475.336.000,00	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	10.475.336.000,00	10.475.336.000,00	0,00

Sumber : BKAD 2024 (unaudited)

2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang berasal dari: (i) Pajak daerah; (ii) Retribusi Daerah; (iii) Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan; serta (iv) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. PAD

merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur tingkat kemandirian daerah, kemampuan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan. Semakin tinggi pendapatan asli daerah maka semakin kecil tingkat ketergantungan daerah terhadap Pendapatan Transfer dan Transfer Pusat ke Daerah.

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 sebelum perubahan ditetapkan sebesar Rp. 257.095.557.601,- dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 272.745.782.565,56 atau bertambah sebesar Rp. 15.650.224.964,56 atau naik 6,69 persen.

2.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah pendapatan yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Transfer terdiri atas: (i) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan (ii) Pendapatan Transfer Antar Daerah. Transfer pemerintah pusat ke Daerah adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa. Dana Transfer ke Daerah dialokasikan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah, mengurangi kesenjangan pendanaan urusan pemerintahan antardaerah, mengurangi kesenjangan layanan publik antar daerah. Target Pendapatan Transfer Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 sebelum perubahan sebesar Rp. 2.239.404.187.485,- dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 2.319.306.285.416,28 bertambah sebesar Rp. 79.902.097.931,28 atau naik 3,57 persen.

2.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Sumber pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Sumenep pada Tahun 2024, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terdiri dari atas Pendapatan Hibah. Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp 10.475.336.000,- pada tahun ini tidak mengalami perubahan.

2.2. Perubahan Penjabaran Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yaitu : 1) Urusan wajib pelayanan dasar, 2) Urusan wajib bukan pelayanan dasar, serta 3) Urusan pilihan yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Belanja daerah disusun oleh pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas provinsi maupun nasional. Secara umum APBD Kabupaten Sumenep diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, serta pelayanan publik.

Pada APBD tahun 2024 Pemerintah Daerah telah menetapkan target capaian kinerja yang harus tercapai pada akhir tahun anggaran, baik dari sisi program, kegiatan hingga sub kegiatan yang terbagi atas urusan dan SKPD pengampu masing-masing urusan.

Arah Kebijakan belanja pada perubahan APBD Kabupaten Sumenep Tahun 2024, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penyesuaian terhadap nomenklatur kegiatan yang dibiayai dari sumber dana Dana Alokasi Khusus (DAK fisik dan non fisik) dan DBHC HT;
2. Penganggaran belanja yang berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi dan silpa DBH CHT;
3. Penganggaran terhadap hutang pihak III dan retensi;
4. Penganggaran Kembali silpa DAK fisik dan non fisik;
5. Penganggaran belanja dana khusus lainnya seperti Sisa Tunjangan Sertifikasi, Sisa Tunjangan non sertifikasi, Sisa Tunjangan khusus guru, Sisa Pajak Rokok, Sisa BLUD RSUD, Sisa BOS;
6. Penganggaran belanja prioritas daerah.

Pada perubahan APBD tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Sumenep melakukan penyesuaian sub kegiatan, kegiatan dan program sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Menteri Keuangan RI melalui Peraturan Menteri

Keuangan nomor 102 Tahun 2024 yang diarahkan untuk pencapaian kinerja layanan dasar pada bidang Pendidikan, Kesehatan serta Pekerjaan Umum beserta pendukungnya.

2.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan pembangunan Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi dianggarkan pada semua perangkat daerah yang terdiri dari jenis belanja: (i) Belanja Pegawai, (ii) Belanja Barang dan Jasa (iii) Belanja Subsidi, (iv) Belanja Hibah, (v) Belanja Bantuan Sosial, (vi). Belanja Operasi Tahun 2024 sebelum perubahan dianggarkan sebesar Rp. 1.894.257.957.847,- dan setelah perubahan menjadi Rp. 2.052.581.620.310,- bertambah sebesar Rp. 158.323.662.463,- atau naik 7,71 persen.

Adapun Belanja Operasi, pada perubahan APBD tahun 2024 yang mengalami kenaikan/penurunan terdiri dari :

- Belanja Pegawai mengalami penyesuaian sebesar Rp. 29.039.500.064,-
- Belanja barang dan jasa mengalami peningkatan sebesar Rp. 92.485.214.172,-
- Belanja Subsidi mengalami peningkatan sebesar Rp. 146.496.980,-
- Belanja Hibah mengalami peningkatan sebesar Rp. 35.823.951.247,-
- Belanja Bantuan Sosial mengalami peningkatan sebesar Rp. 828.500.000,-

2.2.2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Anggaran Belanja Modal Tahun 2024 sebelum perubahan ditetapkan sebesar Rp. 347.724.347.717,- dan setelah perubahan menjadi

Rp. 376.798.868.902,- bertambah sebesar Rp. 29.074.521.185,- atau naik 7,72 persen.

Perubahan Belanja Modal pada pelaksanaan APBD tahun 2024 terdiri dari :

- Belanja modal tanah mengalami penurunan sebesar Rp. -2.176.703.000,-
- Belanja modal peralatan mesin mengalami kenaikan sebesar Rp. 4.835.403.759,-
- Belanja modal Gedung dan bangunan mengalami kenaikan sebesar Rp. 5.645.453.581,-
- Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi mengalami peningkatan sebesar Rp. 13.866.937.043,-
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya mengalami peningkatan sebesar Rp. 6.903.429.802,-

2.2.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga digunakan sebagai pengeluaran atas beban APBD untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial atau keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja Tidak Terduga Kabupaten Sumenep pada Tahun 2024 sebelum perubahan ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.000,- tidak mengalami perubahan.

2.2.4. Belanja Transfer

Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Belanja Transfer Kabupaten Sumenep pada tahun 2024 sebelum perubahan sebesar Rp. 549.387.251.430,- dan setelah perubahan menjadi Rp. 604.337.306.622,- bertambah sebesar Rp. 54.950.055.192,- atau naik 9,09 persen.

Secara umum belanja pada Perubahan APBD Kabupaten Sumenep tahun 2024 dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel : 2.2
Perubahan Penjabaran Belanja Daerah Tahun 2024

KODE	U R A I A N	ANGGARAN 2024 Rp.	ANGGARAN PERUBAHAN 2024 Rp.	SELISIH Rp.
5	BELANJA DAERAH	2.796.369.556.994,00	3.038.717.795.834,00	242.348.238.840,00
5.1	BELANJA OPERASI	1.894.257.957.847,00	2.052.581.620.310,00	158.323.662.463,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.070.838.086.835,00	1.099.877.586.899,00	29.039.500.064,00
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	630.603.371.237,00	723.088.585.409,00	92.485.214.172,00
5.1.04	Belanja Subsidi	4.000.000.000,00	4.146.496.980,00	146.496.980,00
5.1.05	Belanja Hibah	184.859.295.775,00	220.683.247.022,00	35.823.951.247,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.957.204.000,00	4.785.704.000,00	828.500.000,00
5.2	BELANJA MODAL	347.724.347.717,00	376.798.868.902,00	29.074.521.185,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	10.356.703.000,00	8.180.000.000,00	(2.176.703.000,00)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99.953.371.836,00	104.788.775.595,00	4.835.403.759,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	151.498.251.607,00	157.143.705.188,00	5.645.453.581,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	85.312.193.274,00	99.179.130.317,00	13.866.937.043,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	603.828.000,00	7.507.257.802,00	6.903.429.802,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
5.4	BELANJA TRANSFER	549.387.251.430,00	604.337.306.622,00	54.950.055.192,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.000.000.000,00	6.042.048.000,00	1.042.048.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	544.387.251.430,00	598.295.258.622,00	53.908.007.192,00

Sumber : BKAD 2024 (unaudited)

2.3. Perubahan Penjabaran Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali dan/atau penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Dalam penganggarannya, Pembiayaan Daerah dibagi dalam 2 bagian yaitu Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

2.3.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan daerah pada Tahun Anggaran 2024 diarahkan pada Penyesuaian penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2023 untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2023 terdiri dari Silpa DAU, DBH CHT, DID, DAK, Pajak Rokok, BLUD, BOS, BK Provinsi, Hutang pihak ketiga, serta hutang retensi. Pada APBD Tahun Anggaran 2024 penerimaan pembiayaan daerah sebelum perubahan sebesar Rp. 326.619.475.908,- dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 473.415.391.852,16 bertambah sebesar Rp. 146.795.915.944,16 atau naik 44,49 persen.

2.3.2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pada APBD Tahun Anggaran 2024 pengeluaran pembiayaan daerah sebelum perubahan sebesar Rp. 37.225.000.000,- dan tidak mengalami perubahan.

Perubahan penjabaran pembiayaan daerah Kabupaten Sumenep tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel : 2.3**Perubahan Penjabaran Pembiayaan Daerah Tahun 2024**

KODE	U R A I A N	ANGGARAN 2024 Rp.	ANGGARAN PERUBAHAN 2024 Rp.	SELISIH Rp.
6	Pembiayaan	289.394.475.908,00	436.190.391.852,16	146.795.915.944,16
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	326.619.475.908,00	473.415.391.852,16	146.795.915.944,16
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	264.219.475.908,00	410.917.771.655,16	146.698.295.747,16
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	62.400.000.000,00	62.400.000.000,00	0,00
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	97.620.197,00	97.620.197,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	37.225.000.000,00	37.225.000.000,00	0,00
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	12.225.000.000,00	12.225.000.000,00	0,00

Sumber : BKAD 2024 (unaudited)

Secara umum Pembiayaan daerah pada APBD perubahan tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 436.190.391.852,16 atau meningkat sebesar 50,73 persen dibandingkan sebelum perubahan.

BAB III

HASIL PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Sejalan dengan asas desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 (tiga) urusan yakni; Urusan Pemerintahan Absolut; Urusan Pemerintahan Konkuren; dan Urusan Pemerintahan Umum. Urusan Pemerintahan Absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan Pemerintahan Konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan Umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.

Urusan Pemerintahan Konkuren atau Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, dibagi menjadi Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar serta Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.

Kewenangan diberikan kepada daerah agar dapat lebih leluasa dan fleksibel dalam menentukan arah pembangunan di daerah sesuai dengan potensi, kondisi dan aspirasi yang berkembang dimasyarakat. Hal ini dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terkait erat dengan pelaksanaan otonomi daerah harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, harus berorientasi pada pemberdayaan daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta menjamin keserasian hubungan antar daerah dengan Pemerintah Provinsi maupun dengan Pemerintah Pusat dalam rangka mewujudkan *Good Governance*.

Hasil pelaksanaan kebijakan pembangunan sesuai kewenangan daerah pada tahun anggaran 2024 dapat digambarkan dalam capaian Ekonomi Makro, Kinerja Daerah, serta Hasil Capaian Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan pada seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

3.1. Tingkat Capaian Indikator Ekonomi Makro Pemerintah Daerah

Indikator ekonomi makro digunakan untuk mengukur dan menganalisis kondisi ekonomi suatu negara/wilayah. Indikator ini dapat digunakan untuk memprediksi perkembangan ekonomi di masa depan. Evaluasi terhadap indikator makro dilakukan untuk memperoleh gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah secara umum dengan menilai capaian masing-masing 5 (lima) indikator makro pembangunan Kabupaten Sumenep. Gambaran pencapaian indikator makro terhadap realisasi Tahun 2023 maupun terhadap target di Tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel. 3.1
Capaian Indikator Makro Kabupaten Sumenep

NO	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	69,13	69,26	69,78	101%
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,35	2,74	3,77	138%
3	Persentase Penduduk Miskin (%)	18,7	18,7	17,78	105%
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	1,71	1,7	1,69	101%
5	Indeks Gini	0,266	0,276	0,308	89,6%

Dari tabel di atas terlihat capaian Indikator Makro Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep tahun 2024 jika dibandingkan tahun 2023 terdapat 3 (tiga) indikator yang berkinerja positif yaitu IPM, Persentase Penduduk Miskin, dan TPT. Sedangkan Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Gini sedikit mengalami kontraksi. Jika dibandingkan terhadap target, maka realisasi IPM, LPE, Persentase Penduduk Miskin serta TPT melebihi target yang ditetapkan. Uraian pencapaian dari masing-masing indikator

kinerja makro pembangunan daerah Kabupaten Sumenep, dapat dijelaskan sebagaimana berikut :

3.1.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas penduduk yang diukur dengan Umur Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan Pengeluaran Riil per Kapita. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dapat digunakan untuk mengkaji perkembangan pembangunan manusia dalam suatu wilayah maupun perbandingan antar wilayah. IPM merupakan indikator yang sangat berguna untuk melihat perkembangan capaian pembangunan dalam jangka panjang.

IPM merangkum tiga dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar kehidupan layak (*decent standard of living*). Aspek umur panjang dan hidup sehat diukur dengan indikator Usia Harapan Hidup (UHH) saat lahir. Dimensi pengetahuan direpresentasikan dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Sedangkan standar hidup layak dapat didekati dengan pengeluaran per kapita riil disesuaikan yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

Tabel. 3.2
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia antara nasional, provinsi dan kabupaten

No	Pemerintah	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nasional	72,81	73,16	73,77	74,39	75,02
2	Provinsi Jawa Timur	71,71	73,48	74,05	74,65	75,35
3	Kabupaten Sumenep	67,15	67,74	68,49	69,13	69,78

Dari tabel di atas diperoleh data Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sumenep Tahun 2024 sebesar 69,78 masih dibawah Provinsi dan Nasional.

Tabel. 3.3
Dimensi Penyusun Indeks Pembangunan Manusia

No	Pemerintah	2020	2021	2022	2023	2024
1	Umur Harapan Hidup (tahun)	73.11	73,19	73,43	73,69	73,86
2	Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,20	13,33	13,51	13,58	13,59
3	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	5,71	5,92	5,93	5,94	6,10
4	Pengeluaran per kapita yang disesuaikan (dalam ribu)	8.888	9.000	9.388	9.807	10.156

Jika diperhatikan komponen penyusun IPM setiap tahun selalu mengalami peningkatan. Komponen dengan peningkatan paling kecil adalah Harapan Lama Sekolah (HLS) dengan kenaikan 0,01 jika membandingkan antara realisasi 2023 dan 2024. Dengan nilai HLS 13,59 menandakan rata-rata anak usia 7 tahun di Kabupaten Sumenep pada tahun 2024 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,59 tahun atau setara dengan Diploma I. Kemudian angka Rata-rata lama sekolah Kabupaten Sumenep menunjukkan bahwa di tahun 2024 rata-rata penduduk dengan usia 25 tahun ke atas telah menyelesaikan Pendidikan formal hingga Sekolah Dasar atau kelas 1 SMP. Kondisi ini didukung atas kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumenep di bidang Pendidikan melalui pemenuhan terhadap standar pelayanan minimal bidang Pendidikan baik berupa peningkatan

sarana dan prasarana Pendidikan, peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik.

Dari dimensi kesehatan, Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Sumenep di tahun 2024 menunjukkan bahwa setiap bayi yang lahir memiliki harapan hidup hingga usia 73 s.d 74 tahun. UHH Kabupaten Sumenep tahun 2024 adalah yang tertinggi di wilayah Madura Raya. Hal ini sedikit banyak dipengaruhi oleh kinerja layanan Pemerintah Daerah di bidang kesehatan serta perilaku masyarakat Sumenep yang semakin peduli terhadap perilaku hidup sehat.

Untuk dimensi daya beli, pengeluaran per kapita yang disesuaikan masyarakat Sumenep di tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp 349.000,- jika dibandingkan tahun 2023. Hal ini berarti kemampuan masyarakat dalam membeli suatu barang atau jasa semakin tinggi yang menandakan bahwa kondisi perekonomian di Kabupaten Sumenep terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

3.1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Perekonomian Kabupaten Sumenep terus mengalami pertumbuhan. Dari hasil publikasi BPS, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumenep selama 4 (empat) tahun terakhir menunjukkan kondisi yang terus meningkat.

Tabel. 3.4
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumenep

No	Pemerintah	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Nasional	2,97	3,69	5,31	5,05	5,03
2.	Provinsi Jawa Timur	-3,75	3,23	5,58	4,95	4,93
3.	Kabupaten Sumenep	-1,13	2,61	3,11	5,35	3,77

Sumber : Badan Pusat Statistik

Dari tabel di atas perkembangan ekonomi paska pandemik Covid-19 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumenep terus tumbuh positif, hal ini tidak terlepas dukungan program pemulihan ekonomi nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah pusat maupun daerah. Untuk tahun 2023, 5

(lima) besar sektor pendukung utama PDRB adalah pertambangan dan penggalan; perdagangan besar dan eceran; reparasi; konstruksi; industri pengolahan; pertanian, kehutanan dan perikanan. Pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumenep mengalami pertumbuhan namun jika dibandingkan dengan Tahun 2023 pertumbuhannya mengalami perlambatan sehingga capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumenep pada Tahun 2024 sebesar 3,77%. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumenep perlu memberikan perhatian khusus terhadap sektor pertanian, perikanan, perindustrian dan perdagangan untuk bisa meningkatkan perekonomian di Kabupaten Sumenep.

3.1.3. Persentase Peduduk Miskin

Masalah kemiskinan hingga saat ini masih menjadi hal serius yang perlu segera ditangani. Tingkat kemiskinan suatu daerah dapat dipengaruhi oleh Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), namun turunnya penduduk miskin tidak selalu disertai dengan penurunan P1 dan P2. Oleh sebab itu perlu memperhatikan pergerakan P1 dan P2 setiap waktu dan juga melakukan analisis apakah penurunan tingkat kemiskinan tersebut dapat memperbaiki tingkat kesejahteraan penduduk miskin di daerah. Perkembangan presentase penduduk miskin Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.5
Persentase Penduduk Miskin

No	Pemerintah	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Nasional	9,78	10,14	9,54	9,36	8,57
2.	Provinsi Jawa Timur	11,09	11,40	10,38	10,35	9,79
3.	Kabupaten Sumenep	20,18	20,51	18,76	18,70	17,78

Sumber : Badan Pusat Statistik

Sejak tahun 2021 persentase penduduk miskin Kabupaten Sumenep terus mengalami penurunan walaupun tidak signifikan. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2024 mencapai 196.420 jiwa, berkurang sebesar 9.680 jiwa jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 206.100 jiwa. Di

Madura Raya persentase penduduk miskin Kabupaten Sumenep hanya kalah dari Kabupaten Pamekasan yang sebesar 13,41%. Jika dilihat dari persentase dan jumlah penduduk miskin, tingkat kemiskinan Kabupaten Sumenep masih cukup tinggi, walaupun di tiga tahun terakhir mengalami penurunan. Hal ini tentunya akan senantiasa menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan lintas sektor serta memastikan bahwa program penanggulangan kemiskinan telah tepat sasaran.

3.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, yang terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu : 1) mereka yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan, 2) mereka yang tidak bekerja dan mempersiapkan usaha, 3) mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, 4) mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja, tetapi belum mulai kerja. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sumenep tahun 2020 hingga tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.6
Kinerja bidang ketenagakerjaan

No	Pemerintah	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Penduduk Usia Kerja	888.356	893.24	897.722	926.623	930.978
2.	Angkatan Kerja	666.441	675.57	674.374	730.748	727.652
	- Bekerja	647.489	659.941	665.221	718.285	715.391
	- Pengangguran	18.952	15.630	9.153	12.463	12.261
3.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	75,02	75,63	75,12	78,86	78,16
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,84	2,31	1,36	1,71	1.69

Pada tabel di atas tersaji bahwa capaian TPT Kabupaten Sumenep sangat baik walaupun sempat mengalami peningkatan di tahun 2023. Tahun 2024 Kabupaten Sumenep berada di peringkat ke tiga setelah Pamekasan dan Pacitan dalam hal nilai TPT terbaik se-Jawa Timur. Capaian TPT di tahun 2024 dipengaruhi oleh jumlah pengangguran yang mengalami penurunan sebanyak 202 orang jika dibandingkan dengan tahun 2023. Walaupun dari sisi orang yang bekerja juga mengalami penurunan hingga 2.894 orang.

Tabel. 3.7
Capaian TPT dibandingkan antara Nasional, Provinsi dan Kabupaten

No	Pemerintah	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Nasional	7,07	6,26	5,83	5,45	4,82
2.	Provinsi Jawa Timur	5,84	5,74	5,49	4,88	4,19
3.	Kabupaten Sumenep	2,84	2,31	1,36	1,71	1.69

Penurunan TPT Kabupaten Sumenep tahun 2024 dipengaruhi antara lain event yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep berdampak pada meningkatnya penduduk yang bekerja di sektor akomodasi dan makan minum, kemudian pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan infrastruktur desa melalui pola padat karya bersumber bantuan keuangan desa menunjukkan peningkatan daya serap tenaga kerja, serta pelaksanaan *job fair* yang turut berdampak pada penyerapan lulusan SMA/SMK/Diploma/S1.

3.1.5. Indeks Gini

Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk suatu wilayah, dengan nilai berkisar antara 0 hingga 1. Semakin tinggi nilai gini ratio, makin tinggi ketimpangan yang terjadi. Ini artinya bagian pendapatan yang diterima kelompok penduduk kaya semakin besar. Idealnya, kemajuan ekonomi suatu wilayah dapat diiringi dengan pemerataan pendapatan sehingga kesenjangan tidak tinggi. Masyarakat golongan ekonomi bawah harus didorong untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan mereka,

sehingga ketimpangan dapat diperkecil. Dengan kata lain, koefisien gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Tabel 3.8
Capaian Indikator Gini Kabupaten Sumenep

No	Pemerintah	2023	Target 2024	Realisasi 2024
1.	Indeks Gini	0,287	0,286 – 0,266	0,308

Tabel 3.9
Perbandingan Capaian Indikator Gini Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Sumenep

No	Pemerintah	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Nasional	0,381	0,384	0,384	0,388	0,379
2.	Provinsi Jawa Timur	0,366	0,374	0,371	0,387	0,372
3.	Kabupaten Sumenep	0,256	0,294	0,266	0,287	0,308

Capaian Indeks Gini Kabupaten Sumenep pada Tahun 2024 sebesar 0,308 hal ini dapat dikatakan tidak terjadi ketimpangan di Kabupaten Sumenep dikarenakan angka capaian Indeks Gini Kabupaten Sumenep masih berada pada ambang batas 0,25-0,35.

3.2. Tingkat Capaian Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja Daerah adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Tujuan dalam penetapan Indikator Kinerja Daerah adalah memberikan gambaran tentang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Oleh karena itu, Indikator Kinerja Daerah juga dapat dikatakan sebagai Indikator Kinerja Utama bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih karena dapat menunjukkan kondisi yang diharapkan tercapai pada akhir masa jabatan. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu : 1) memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan 2) mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang

digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.

Indikator Kinerja Daerah ini dituangkan dalam bentuk matriks yang akan dipergunakan sebagai acuan dan dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan daerah. Selengkapnya, matriks indikator tersebut disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.10
Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	2024	
				TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Pendapatan per kapita (ADHB)	Rp. 37.370.046,-	Rp 39.125.120,-	Rp. 39.564.488,-
2	Berkurangnya Beban Pengeluaran	Pengeluaran Per Kapita Riil Disesuaikan	Rp. 9.807.000,-	Rp 9.982.000,-	Rp. 10.156.000,-
3	Menurunnya Kantong Kantong Kemiskinan	Persentase Pengurangan wilayah Kantong Kemiskinan	Na	1,40%	1,48%
4	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,575	0,62	0,581
5	Meningkatnya Budaya literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	47,9	53	57,91
6	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	0,826	0,827	0,829
		% Prevalensi Stunting	16,70%	14%	Belum rilis
7	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	78,86%	80,01%	78,16%
8	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Pemuda	Na	53	Belum Rilis
9	Meningkatnya Pertumbuhan	Laju Pertumbuha	Na	5,78	4,82

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	2024	
				TARGET	REALISASI
	Ekonomi Sektor Unggulan Terhadap PDRB	n PDRB sektor unggulan (pertanian, perikanan, perindustrian dan perdagangan)			
10	Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai realisasi investasi	Rp. 2.101.692.051.534,-	Rp 2.493.721.000.000,-	Rp. 2.745.743.557.715,-
11	Meningkatnya Ekonomi Sektor Pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	0,30%	0,3%	0,34%
12	Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif	Indeks SPBE	3,18	3,50	3,73
		Capaian Akuntabilitas Keuangan (Predikat)	WTP	WTP	Belum Rilis
		Capaian Akuntabilitas Kinerja (Predikat / nilai SAKIP Kabupaten)	B	BB	BB
13	Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional	Indeks BerAKHLAK	63,9	75	72,4
		IKM	88,15	87	88,76
14	Terwujudnya Birokrasi yang Akuntabel dan Transparan	Indeks RB tematik	8,70	8,95	8,98
15	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Indeks infrastruktur	73,23%	75%	75%
16	Meningkatnya Penanganan Dan Pencegahan Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63,71%	66,83	63,98

3.2.1. Pendapatan per Kapita (ADHB)

Pendapatan per kapita atas dasar harga berlaku, merupakan ukuran rata-rata pendapatan yang dihasilkan oleh setiap individu dalam suatu negara dalam satu tahun berdasarkan harga yang berlaku pada periode tersebut. ADHB tidak memperhitungkan efek inflasi, sehingga mencerminkan nilai nominal pendapatan tanpa penyesuaian terhadap perubahan daya beli. Adapun tujuan dari perhitungan Pendapatan per kapita (ADHB) untuk mengetahui tingkat pendapatan masyarakat.

Adapun perhitungan Pendapatan per kapita (ADHB) dengan menghitung Jumlah Pendapatan Domestik Bruto (ADHB) dibagi dengan Jumlah Penduduk di suatu daerah.

Tabel. 3.11
Pendapatan per Kapita (ADHB)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	2024	
			TARGET	REALISASI
Meningkatnya pendapatan masyarakat	Pendapatan per Kapita (ADHB)	Rp. 37.370.046,-	Rp. 39.125.120,-	Rp. 39.564.488,-

Dari tabel di atas diperoleh data realisasi Pendapatan per kapita Kabupaten Sumenep Tahun 2024 sebesar Rp. 39.564.488,- artinya pendapatan yang dihasilkan oleh setiap individu di Kabupaten Sumenep sebesar Rp. 39.564.488,-. Jika dibandingkan Tahun 2023, pendapatan per kapita Kabupaten Sumenep mengalami peningkatan sebesar Rp. 2.194.442,- atau sebesar 5,87%, peningkatan pendapatan per kapita pada tahun ini tidak cukup signifikan hal ini dikarenakan Laju Pertumbuhan Ekonomi pada Tahun 2024 yang cukup melambat.

3.2.2. Pengeluaran per Kapita Riil Disesuaikan

Pengeluaran per Kapita Riil Disesuaikan merupakan indikator ekonomi yang menggambarkan rata-rata pengeluaran individu dalam suatu negara setelah disesuaikan dengan faktor inflasi dan daya beli. Indikator ini mencerminkan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan pendapatan mereka untuk kebutuhan barang dan jasa dalam nilai riil. Perhitungan

Pengeluaran per Kapita riil disesuaikan bertujuan untuk memahami kesejahteraan masyarakat dan memberikan gambaran tentang kemampuan ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan.

Adapun perhitungan Pengeluaran per Kapita Riil Disesuaikan yaitu dengan mengalikan Pengeluaran Total dibagi Jumlah Penduduk dengan Indeks Harga Tahun Dasar dibagi Indeks Harga Tahun Berjalan.

Tabel. 3.12
Pengeluaran per Kapita Riil Disesuaikan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	2024	
			TARGET	REALISASI
Berkurangnya Beban Pengeluaran	Pengeluaran Per Kapita Riil Disesuaikan	Rp. 9.807.000,-	Rp 9.982.000,-	Rp. 10.156.000,-

Dari tabel di atas diperoleh data realisasi Pengeluaran Per Kapita Riil Disesuaikan Kabupaten Sumenep mengalami kenaikan menjadi Rp. 10.156.000,- pada tahun 2024, naik sebesar Rp. 349.000,- atau 3,56 persen dari Tahun 2023. Hal ini dipengaruhi oleh implementasi kebijakan pemerintah, seperti program subsidi, bantuan hibah/sosial, BLT, layanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu (UHC), sehingga masyarakat miskin dapat fokus meningkatkan daya beli untuk pemenuhan kebutuhan primer.

3.2.3. Persentase Pengurangan wilayah Kantong Kemiskinan

Persentase Pengurangan Wilayah Kantong Kemiskinan bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu wilayah atau pemerintah dalam mengurangi jumlah wilayah yang tergolong sebagai kantong kemiskinan dalam kurun waktu tertentu.

Adapun tujuan utama dari Pengukuran Persentase Pengurangan Wilayah Kantong Kemiskinan yaitu mengidentifikasi wilayah yang berhasil keluar dari status kantong kemiskinan, Menurunnya kantong kantong kemiskinan dan menemukan data untuk menentukan prioritas daerah dalam menangani wilayah yang masih menjadi penyumbang tertinggi kantong kemiskinan.

Tabel. 3.13
Persentase Pengurangan wilayah Kantong Kemiskinan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	2024	
			TARGET	REALISASI
Menurunnya Kantong Kantong Kemiskinan	Persentase Pengurangan wilayah Kantong Kemiskinan	Na	1,40%	1,48%

Dari tabel di atas diperoleh data Realisasi Persentase Pengurangan wilayah Kantong Kemiskinan Kabupaten Sumenep Tahun 2024 sebesar 1,48 persen hal ini telah melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 1,40 persen hal ini dikarenakan banyaknya bantuan sosial yang diberikan Pemerintah Kabupaten Sumenep dan banyaknya program-program yang mendukung pemberdayaan masyarakat. Dengan terlampauinya target penurunan wilayah yang menjadi penyumbang kantong kemiskinan di Kabupaten Sumenep dan agar terwujudnya pembangunan inklusif di Kabupaten Sumenep.

3.2.4. Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan adalah salah satu komponen yang Menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menggambarkan dimensi Pendidikan dasar hingga Menengah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk masyarakat usia sekolah. Indeks Pendidikan diperoleh dari Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), yang merepresentasikan capaian pendidikan penduduk sebuah daerah sebagaimana tersedia dan memungkinkan untuk diikuti. Adapun tujuan dari pengukuran Indeks Pendidikan untuk mengetahui tingkat kualitas dan aksesibilitas layanan dasar pendidikan yang telah diberikan Pemerintah Daerah.

Tabel. 3.14
Indeks Pendidikan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	2024	
			TARGET	REALISASI
Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,575	0,62	0,581

Dari tabel di atas diperoleh data realisasi Indeks Pendidikan di Kabupaten Sumenep mengalami kenaikan dari Tahun 2023 ke Tahun 2024 menjadi 0,581. Kenaikan ini didukung dengan meningkatnya Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) pada Tahun 2024. Namun capaian itu belum mencapai target yang ditetapkan di tahun 2024. Hal tersebut dikarenakan salah satu komponen pembentuk indeks Pendidikan yaitu rata-rata lama sekolah yang masih rendah yaitu 6,10 atau maksimal penduduk usia 25 tahun rata-rata hanya besekolah sampai kelas 1 SMP.

3.2.5. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat merupakan data tingkat pembangunan literasi masyarakat yang diperoleh dari Unsur-Unsur Pembangun Literasi Masyarakat (UPLM) yang bersumber dari data sekunder dan Aspek Masyarakat (AM) dalam upaya membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat guna meningkatkan literasi masyarakat. Adapun tujuan dari pengukuran ini untuk mengetahui tingkat budaya literasi masyarakat di Kabupaten Sumenep.

Tabel. 3.15
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	2024	
			TARGET	REALISASI I
Meningkatnya Budaya literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	47,9	53	57,91

Dari tabel di atas diperoleh data realisasi Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Kabupaten Sumenep mengalami kenaikan dari Tahun 2023 ke Tahun 2024 menjadi 57,91. Kenaikan ini didukung dengan meningkatannya jumlah perpustakaan sekolah ataupun desa, serta meningkatnya kunjungan di perpustakaan Daerah baik secara *offline* maupun *online*. Namun terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan indikator ini yaitu belum tersedianya data perpustakaan di wilayah kepulauan, mengingat Kabupaten Sumenep terdapat beberapa kecamatan yang berada di wilayah

kepulauan, yang tentunya harus menjadi perhatian penting bagi Pemerintah Kabupaten Sumenep agar kedepannya dapat meningkatkan budaya literasi masyarakat.

3.2.6. Indeks Kesehatan dan Persentase Prevalensi Stunting

Indeks Kesehatan merupakan data yang digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat dalam suatu wilayah. Indeks Kesehatan adalah besarnya (persen) pencapaian kondisi kesehatan dengan kondisi yang ideal diharapkan dicapai oleh masyarakat Indonesia, dengan angka ideal 100%. Indeks ini mencerminkan kualitas hidup yang berkaitan dengan aspek kesehatan, seperti harapan hidup, angka kematian bayi, angka kematian ibu, prevalensi penyakit, serta akses terhadap pelayanan kesehatan. Indeks kesehatan disusun dari Angka Harapan Hidup (AHH) yang didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang sejak lahir yang mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.

Persentase Prevalensi stunting adalah proporsi atau persentase anak-anak yang mengalami kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan stimulasi yang tidak memadai, adapun upaya agar pencegahan balita gizi buruk maka perlunya penanganan jika ditemukannya balita dengan gizi buruk. Selain itu, dalam rangka penanganan balita gizi buruk tersebut maka dibangunnya posyandu guna pelayanan Kesehatan anak lebih dekat ke masyarakat. Guna menganalisa dari penanganan gizi buruk pada Balita maka indikator untuk mengukurnya adalah kapasitas posyandu yang disandingkan dengan data persentase balita yang menderita gizi buruk II-47 dan cakupan kemampuan penanganan dalam mengatasi balita gizi buruk,

Adapun tujuan dari dua indikator ini yaitu untuk mengetahui tingkat derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Sumenep.

Tabel. 3.16
Indeks Kesehatan dan Persentase Prevalensi Stunting

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	2024	
			TARGET	REALISASI
	Indeks Kesehatan	0,826	0,827	0,829

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	2024	
			TARGET	REALISASI
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	% Prevalensi Stunting	16,70%	14%	Belum rilis

Dari tabel di atas diperoleh data realisasi Indeks Kesehatan di Kabupaten Sumenep mengalami kenaikan dari Tahun 2023 ke Tahun 2024 menjadi 0,829 kenaikan ini didukung dengan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan, perilaku masyarakat, pelayanan kesehatan, dan genetik (turunan). Sedangkan capaian Persentase Prevelensi Stunting Kabupaten Sumenep pada Tahun 2023 sebesar 16,70 persen. Kondisi tersebut menempatkan Kabupaten Sumenep berada di peringkat 22 dari 38 kabupaten/kota se Jawa Timur sekaligus melebihi capaian provinsi. Di tahun 2024 Kabupaten Sumenep menargetkan 14 persen turun 2,7 persen dari Tahun 2023, hal ini selaras dengan target nasional. Untuk mencapai kondisi tersebut beberapa hal yang telah dilakukan oleh pemerintah diantaranya : 1) Aksi Konvergensi dalam rangka penurunan prevalensi stunting yang melibatkan seluruh Perangkat Daerah dengan melibatkan organisasi masyarakat; 2) Pembentukan TPPS dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa; 3) Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala ke daerah-daerah khususnya yang menjadi lokasi stunting.

3.2.7. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas. TPAK Mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Adapun tujuan dari indikator ini yaitu untuk mengetahui tingkat Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Sumenep.

Tabel. 3.17
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	2024	
			TARGET	REALISASI
Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	78,86%	80,01%	78,16%

Dari tabel di atas diperoleh data realisasi TPAK di Kabupaten Sumenep mengalami penurunan dari Tahun 2023 ke Tahun 2024 menjadi 78,16 persen, penurunan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat, antara lain :

- a. Berkurangnya Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2024 berkurang 3.096 orang menjadi sebanyak 727.652 orang dibandingkan Agustus 2023.
- b. Jumlah Penduduk yang bekerja sebanyak 715.391 orang atau berkurang 2.894 orang dibandingkan Agustus 2023. Sektor Manufaktur mengalami pengurangan jumlah pekerja terbanyak yaitu berkurang sebesar 13.965 orang diikuti sektor Pertanian berkurang sebesar 10.966 orang dan sektor Jasa bertambah sebesar 5.893 orang.
- c. Sebanyak 186.901 orang (26,13 persen) bekerja pada kegiatan formal atau naik 6,22 persen dibandingkan Agustus 2023.
- d. Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memiliki TPT tertinggi di Kabupaten Sumenep sebesar 8,07 persen di susul lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 4,57 persen.
- e. Meningkatnya penduduk usia kerja yang telah menyelesaikan pendidikan.
- f. Turunnya serapan tenaga kerja oleh perusahaan.

Dalam mengatasi turunnya tingkat partisipasi angkatan kerja, ada beberapa hal yang telah dilakukan yaitu melaksanakan kerjasama dengan pihak pemberi kerja melalui kegiatan *Job Fair* dan melaksanakan pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi. Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan dapat menaikkan tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Sumenep kedepannya.

3.2.8. Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah alat yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk mengevaluasi dan memahami kondisi pemuda, serta mencerminkan pencapaian upaya pembangunan pemuda. IPP mencakup berbagai domain seperti pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, peluang kerja, serta partisipasi dan kepemimpinan. Adapun tujuan dari indikator ini yaitu untuk mengukur tingkat partisipasi pemuda di Kabupaten Sumenep.

Tabel. 3.18
Indeks Pembangunan Pemuda

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	2024	
			TARGET	REALISASI
Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Pemuda	Na	53	Belum Rilis

Dari tabel di atas target realisasi Indeks Pembangunan Pemuda di Kabupaten Sumenep pada tahun 2024 sebesar 53. Jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Timur di tahun 2022 yang sebesar 55,50. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumenep ingin mendorong Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Kabupaten Sumenep yang lebih baik dengan memperhatikan beberapa aspek seperti pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, peluang kerja, serta partisipasi dan kepemimpinan.

3.2.9. Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan (Pertanian, Perikanan, Perindustrian Dan Perdagangan)

Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi suatu wilayah salah satunya bisa dilihat dari seberapa Besar Laju Pertumbuhan Ekonomi di sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, perindustrian dan perdagangan. Adapun tujuan dari indikator ini yaitu untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Terhadap PDRB di Kabupaten Sumenep.

Tabel. 3.19
Laju Pertumbuhan PDRB sektor unggulan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	2024	
			TARGET	REALISASI
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Terhadap PDRB	Laju Pertumbuhan PDRB sektor unggulan (pertanian, perikanan, perindustrian dan perdagangan)	Na	5.78	4,82

Dari tabel di atas target realisasi Laju Pertumbuhan PDRB sektor unggulan (pertanian, perikanan, perindustrian dan perdagangan) di Kabupaten Sumenep pada tahun 2024 sebesar 4,82. Pada tahun ini realisasi capaian tidak mencapai target, hal ini dikarenakan pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumenep mengalami pertumbuhan namun jika dibandingkan dengan Tahun 2023 pertumbuhannya mengalami perlambatan sehingga capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumenep pada Tahun 2024 sebesar 3,77%. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumenep perlu memberikan perhatian khusus terhadap sektor pertanian, perikanan, perindustrian dan perdagangan untuk bisa meningkatkan perekonomian di Kabupaten Sumenep.

3.2.10. Nilai realisasi investasi

Investasi adalah tindakan menanamkan uang atau modal ke dalam suatu proyek atau usaha dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan, dalam konteks ini Kabupten Sumenep menghitung jumlah Nilai Realisasi Investasi yang ada guna mengetahui seberapa potensial wilayah Kabupaten Sumenep untuk memulai sebuah bisnis ataupun usaha baik bagi investor asing maupun masyarakat lokal. Adapun tujuan dari indikator ini yaitu untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Terhadap PDRB di Kabupaten Sumenep.

Tabel. 3.20
Nilai realisasi investasi

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	2024	
			TARGET	REALISASI
Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai realisasi investasi	Rp 2.101.692.051.534	Rp 2.493.721.000.000	Rp 2.745.743.557.715

Dari tabel di atas diperoleh data Nilai Realisasi Investasi di Kabupaten Sumenep mengalami kenaikan dari Tahun 2023 ke Tahun 2024 menjadi Rp 2.745.743.557.715,-. Jumlah investor di tahun 2024 adalah sebanyak 15.565 investor atau mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 yang sebanyak 9.682 investor. Kenaikan ini didukung oleh beberapa faktor diantaranya :

- a. Dukungan dari para pelaku usaha UMKM yang melakukan pengurusan perizinan berusaha semakin meningkat dengan seiring menjamurnya pelaku usaha kecil/UMKM di Kabupaten Sumenep;
- b. Pelaksanaan kalender event yang melibatkan pelaku usaha UMKM;
- c. Tersedianya fasilitas berusaha bagi pelaku usaha UMKM;
- d. Pembangunan infrastruktur Pemerintah;
- e. Kemudahan dalam berusaha.

Dengan tercapainya target realisasi investasi di Kabupaten Sumenep diharapkan dapat meningkatkan daya saing Kabupaten Sumenep dan membantu mendongkrak perekonomian di Kabupaten Sumenep untuk lebih baik.

3.2.11. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD

Kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumbangan yang diberikan oleh aktivitas dan industri pariwisata dalam meningkatkan pendapatan yang diperoleh langsung oleh pemerintah daerah. Kontribusi ini mencakup berbagai sumber pendapatan seperti pajak daerah, retribusi, dan pengelolaan aset wisata, yang menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi daerah. Adapun tujuan dari indikator ini yaitu untuk mengetahui tingkat ekonomi sektor pariwisata di Kabupaten Sumenep.

Tabel. 3.21
Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	2024	
			TARGET	REALISASI I
Meningkatnya Ekonomi Sektor Pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	0,30%	0,3%	0,34%

Dari tabel di atas diperoleh data realisasi Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD di Kabupaten Sumenep mengalami peningkatan sejak Tahun 2023 ke Tahun 2024 sebesar 0,34 persen. Peningkatan ini di dukung oleh beberapa hal antara lain :

- a. Naiknya tarif retribusi daerah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah;
- b. Naiknya jumlah pengunjung wisata di objek pariwisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- c. Naiknya penggunaan transaksi elektronik (e-TPD) dalam pembayaran retribusi daerah di objek pariwisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Dalam peningkatan Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD di Kabupaten Sumenep dari Tahun 2023 ke Tahun 2024 terdapat faktor penghambat yaitu masih adanya resistensi kenaikan tarif retribusi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah, hal ini tentunya harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam usaha untuk meningkatkan PAD Kabupaten Sumenep.

3.2.12. Indeks SPBE, Capaian Akuntabilitas Keuangan dan Capaian Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) digunakan untuk menilai sejauh mana penerapan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) dalam tata kelola pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah. Adapun tujuan dari Indeks SPBE ini yaitu untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan.

Capaian Akuntabilitas Keuangan merujuk pada tingkat keberhasilan suatu entitas, baik pemerintah maupun swasta, dalam mengelola keuangan secara transparan, efektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas. Tujuan pengukuran indikator ini yaitu meningkatkan efisiensi penggunaan dana melalui pengawasan penggunaan dan dana publik dapat difokuskan untuk program-program yang memberikan manfaat lebih maksimal bagi kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas layanan publik melalui pengelolaan dana publik secara efektif dan efisien, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan lembaga pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Adapun tujuan dari indikator ini yaitu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna, bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta bertanggung jawab

Adapun tujuan dari ketiga indikator diatas untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif di Kabupaten Sumenep.

Tabel. 3.22
Indeks SPBE, Capaian Akuntabilitas Keuangan dan Capaian Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	2024	
			TARGET	REALISASI
Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif	Indeks SPBE	3,18	3,50	3,73
	Capaian Akuntabilitas Keuangan (Predikat)	WTP	WTP	Belum Rilis
	Capaian Akuntabilitas Kinerja (Predikat / nilai SAKIP Kabupaten)	B	BB	BB

Dari tabel di atas diperoleh data realisasi Indeks SPBE di Kabupaten Sumenep mengalami peningkatan di Tahun 2024 menjadi 3,73 serta melampaui target yang ditetapkan. Peningkatan ini di dukung keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam memenuhi seluruh indikator

penilaian SPBE yaitu aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE, Perencanaan Strategis SPBE, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Penyelenggara SPBE, Penerapan Manajemen SPBE, Pelaksanaan Audit TIK, Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, Layanan Publik Berbasis Elektronik.

Kemudian dari 4 (empat) domain SPBE yang dinilai, nilai tertinggi didapatkan dari domain layanan SPBE sebesar 4,26 yang dibentuk dari 2 (dua) sub domain layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik (4,00) dan layanan publik berbasis elektronik (4,67). Sedangkan domain yang perlu ditingkatkan adalah Domain Manajemen SPBE dengan skor 2,82 yang ditunjang oleh sub domain penerapan manajemen SPBE (3,13) dan Audit TIK (2,00).

Realisasi Capaian Akuntabilitas Keuangan di Kabupaten Sumenep Tahun 2023 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hal ini di ukur dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Prestasi LKPD 2023 adalah ketujuh kalinya yang diraih Pemerintah Kabupaten Sumenep, karena secara berturut-turut selama enam tahun yakni LKPD 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023 dan Tahun 2024. Adapun yang menjadi Faktor pendukung tercapainya prestasi ini antara lain :

- a. Pengelolaan keuangan sudah melakukan aplikasi sehingga dapat mempercepat penyusunan LKPD;
- b. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi BPK yang dilakukan setiap tahun;

Adapun faktor yang menjadi penghambat yaitu masih terdapat temuan berulang berupa tata kelola aset, dari faktor penghambat ini diharapkan kedepannya Pemerintah Kabupaten Sumenep dapat kembali meraih prestasi yang sama di tahun yang akan datang.

Realisasi Capaian Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) di Kabupaten Sumenep Tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi BB. Adapun yang menjadi Faktor pendukung tercapainya prestasi ini antara lain :

- a. terselesaikannya pohon kinerja Kabupaten, pohon kinerja Tema Nasional dan pohon kinerja Perangkat Daerah;

- b. Pemerintah Kabupaten Sumenep telah memanfaatkan aplikasi SIMPEL dalam perencanaan dan pengukuran kinerja;
- c. Meningkatnya kualitas evaluasi internal;

Adapun faktor yang menjadi penghambat, yaitu pengukuran kinerja individu masih berupa aktivitas kerja, belum menggambarkan dukungan kinerja individu terhadap pencapaian kinerja organisasi. Dari faktor penghambat ini diharapkan kedepannya Pemerintah Kabupaten Sumenep dapat meningkatkan Capaian Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) di tahun yang akan datang.

Dari beberapa faktor pendorong dan penghambat pada masing-masing indikator di atas, harapan kedepannya Kabupaten Sumenep dapat Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif.

3.2.13. Indeks BerAKHLAK dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks BerAKHLAK adalah panduan perilaku yang berisi nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia. Nilai-nilai tersebut merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Panduan perilaku BerAKHLAK ini bertujuan untuk membantu ASN dalam berperilaku, memberikan pelayanan, dan melakukan pekerjaan sehari-hari.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. IKM diperoleh dari hasil pengukuran pendapat masyarakat secara kualitatif dan kuantitatif. Adapun perhitungannya dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan masyarakat dengan pelayanan yang diberikan. Tujuan pengukuran ini, yaitu untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja unit pelayanan, untuk mengetahui sejauh mana pelayanan publik memenuhi harapan masyarakat, untuk menata sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Adapun tujuan dari kedua indikator diatas untuk mendukung Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional di Kabupaten Sumenep.

Tabel. 3.23
Indeks BerAKHLAK dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	2024	
			TARGET	REALISASI
Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional	Indeks BerAKHLAK	63,9	75	72,4
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,15	87	88,76

Dari tabel di atas diperoleh data realisasi Indeks BerAKHLAK di Kabupaten Sumenep Tahun 2024 tidak mencapai target namun telah mendapatkan predikat cukup sehat. Dari hasil evaluasi terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki diantaranya : perlu mendetailkan program/kegiatan/aksi implementasi BerAKHLAK; publikasi poster/banner/baliho/videotron/ BerAKHLAK harus secara berkala; publikasi/sosialisasi konten BerAKHLAK melalui media sosial, podcast, media masa cetak/online perlu dilakukan secara berkala; monitoring peran agen penggerak; serta *evidence* atas setiap kegiatan yang terkait BerAKHLAK perlu dilengkapi.

Terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan kembali untuk meningkatkan capaian ini antara lain :

- a. Melakukan forum dialog atau diskusi secara berkala dengan masyarakat;
- b. Melibatkan masyarakat dan *stakeholder* untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses perencanaan program dan kegiatan;
- c. Mendorong kolaborasi lintas unit, kerja internal maupun eksternal dalam mengatasi pemecahan masalah lintas unit kerja untuk percepatan layanan.

Realisasi Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Sumenep mengalami peningkatan sejak Tahun 2023 ke Tahun 2024 menjadi 88,76. Peningkatan ini di dukung oleh beberapa hal antara lain :

- a. Tersedianya berbagai macam pelayanan pada Mall Pelayanan Publik (MPP);
- b. Semakin banyaknya aplikasi pelayanan secara online, sehingga memudahkan masyarakat dalam menerima pelayanan;

Dari beberapa faktor pendorong dan penghambat pada masing- masing indikator di atas, harapan kedepannya Kabupaten Sumenep dapat Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional.

3.2.14. Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Tematik

Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Sejak diterbitkannya PermenPAN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, maka sejak tahun 2023 diperkenalkan RB Tematik dan RB General. RB general fokus penyelesaian isu hulu, sedangkan RB Tematik untuk penyelesaian isu hilir. RB Tematik merupakan strategi baru dalam Road Map RB 2020–2024 yang memiliki waktu pelaksanaan hingga tahun 2024. Dengan waktu yang terbatas, ditetapkan empat tema pelaksanaan RB Tematik, yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta percepatan prioritas aktual presiden. Adapun prioritas dan aktual presiden yang harus segera direspon yaitu peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pengendalian inflasi.

Tabel. 3.24
Indeks Reformasi Birokrasi Tematik

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	2024	
			TARGET	REALISASI
Terwujudnya Birokrasi yang Akuntabel dan Transparan	Indeks RB Tematik	8,7	8,95	8,98

Dari tabel di atas diperoleh data nilai Indeks RB Tematik Kabupaten Sumenep Tahun 2024 sebesar 8,98. Hal ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023 sebesar 8,7. Hal ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam mewujudkan Birokrasi yang Akuntabel, Transparan serta berdampak di Kabupaten Sumenep.

3.2.15. Indeks Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur merupakan hal penting dalam proses pertumbuhan suatu bangsa baik pada sektor ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertanian, dan sektor-sektor lainnya. Peran aktif pemerintah, swasta, serta masyarakat sangat dibutuhkan guna terlaksananya pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Salah satu peran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur adalah dengan pengalokasian anggaran untuk pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur, termasuk infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Besarnya anggaran yang dialokasikan kepada Perangkat Daerah pengampu urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang digunakan untuk menjalankan program pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan dan jembatan, pengembangan perumahan dan permukiman serta program pembangunan infrastruktur lainnya.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu parameter yang dapat digunakan untuk mengukur pelayanan infrastruktur terhadap peningkatan aktivitas perekonomian, ketimpangan wilayah serta mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, digunakan tiga strategi pendekatan, yaitu membentuk sistem yang terencana, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang, memberikan fasilitasi kepada Pemerintah Daerah (Kabupaten dan Kota) sebagai nahkoda pembangunan dan pengembangan permukiman di daerah, serta memberdayakan komunitas dan para pemangku kepentingan.

Salah satu indikator yang digunakan untuk menghitung capaian kinerja di bidang infrastruktur adalah indeks infrastruktur. Indeks Infrastruktur dihitung dengan menjumlahkan persentase capaian di 5 (lima) komponen yaitu infrastruktur jalan dan jembatan, bangunan gedung, air minum, drainase dan sumber daya air setelah dikalikan dengan bobot tertentu untuk masing-masing komponen.

Adapun tujuan dari pengukuran Indeks Pendidikan untuk mengetahui tingkat kualitas Infrastruktur yang telah diberikan Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Tabel. 3.25
Indeks Infrastruktur

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	2024	
			TARGET	REALISASI
Meningkatnya kualitas Infrastruktur	Indeks infrastruktur	73,23%	75%	75%

Dari tabel di atas diperoleh data realisasi Indeks Infrastruktur di Kabupaten Sumenep mengalami peningkatan sejak Tahun 2023 ke Tahun 2024 menjadi 75 persen. Peningkatan ini di dukung oleh beberapa hal antara lain :

- a. Indikator infrastruktur pendukung kesehatan terdiri dari 3 yaitu infrastruktur air limbah (95%), air minum (100%), dan drainase (100%);
- b. Penyesuaian SK Ruas Jalan Kabupaten pada tahun 2024 sehingga ruas jalan Kabupaten berkurang dari 1500 Km ke 850 Km;

Dalam peningkatan Indeks infrastruktur di Kabupaten Sumenep dari Tahun 2023 ke Tahun 2024 terdapat faktor penghambat yaitu penyusunan regulasi terkait RDTR yang belum terselesaikan yang mengakibatkan capaian rasio dokumen tata ruang yang selesai dan disusun menjadi hanya separuh dari target 2 Perbup RDTR, hal ini menjadi dapat menjadi perhatian agar kedepannya Pemerintah Kabupaten Sumenep dapat meningkatkan kembali realisasi Indeks Infrastruktur.

3.2.16. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kualitas lingkungan hidup suatu wilayah. IKLH ini mencakup berbagai indikator seperti kualitas air, udara, dan lahan. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran umum tentang kondisi lingkungan dan membantu dalam perencanaan kebijakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Adapun tujuan dari indikator ini yaitu untuk meningkatkan Penanganan Dan Pencegahan Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Sumenep.

Tabel. 3.26
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	2024	
			TARGET	REALISASI
Meningkatnya Penanganan Dan Pencegahan Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63.71	66.83	63.98

Dari tabel di atas diperoleh data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Sumenep mengalami kenaikan dari Tahun 2023 ke Tahun 2024 menjadi 63.98. Namun kondisi tersebut belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2024 yaitu sebesar 66.83. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:

- a. Tingginya aktivitas domestik dari masyarakat yang membuang limbahnya ke sungai;
- b. Anomali cuaca kering yang berkepanjangan yang berakibat debit air sungai menurun;
- c. Pengurangan luas kawasan hutan dikarenakan perubahan status lahan sebagai fasum dan fasos;
- d. Adanya kebakaran hutan dan lahan tahun 2024 sebesar 310,57 Ha (Sumber data : KLHK).

Dalam rangka menaikkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, beberapa hal yang telah dilakukan yaitu dengan memperkuat sistem pengelolaan sampah, dan melakukan pemantauan kualitas air sungai dan udara secara berkala.

3.2.17. Indeks Reformasi Birokrasi (RB)

Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah, yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Semakin tinggi nilai indeks

Reformasi Birokrasi, maka semakin efektif dan efisien pengelolaan tata pemerintahan, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Adapun tujuan dari indikator ini adalah untuk mengukur sejauh mana Pemerintah Kabupaten Sumenep mendukung Terwujudnya Birokrasi yang Akuntabel dan Transparan di Kabupaten Sumenep.

Tabel. 3.27
Indeks Reformasi Birokrasi

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	2024	
			TARGET	REALISASI
Terwujudnya Birokrasi yang Akuntabel dan Transparan	Indeks RB	70,15	72	78,08

Dari tabel di atas diperoleh data nilai Indeks RB Kabupaten Sumenep Tahun 2024 sebesar 78,08 hal ini mengalami peningkatan cukup signifikan jika dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2023 sebesar 70,15. Hal tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan Birokrasi yang Akuntabel dan Transparan di Kabupaten Sumenep.

3.2.18. Indeks Kesalehan Sosial

Kesalehan sosial adalah bentuk perilaku keagamaan seseorang yang lahir dari sikap keagamaan, sementara sikap keagamaan lahir dari pemahaman seseorang atas nilai-nilai yang difahami (*kognitif*), dirasakan (*afektif*), dan dilakukan (*konatif*). Aspek *Kognitif* yaitu yang berhubungan dengan gejala mengenal pikiran. Ini berarti berwujud pengolahan, pengalaman, dan keyakinan serta harapan-harapan individu tentang objek atau kelompok objek tertentu. Aspek *Afektif* yaitu berwujud proses yang menyangkut perasaan-perasaan tertentu seperti ketakutan, kedengkian, simpati, antipati, dan sebagainya yang ditujukan kepada objek-objek tertentu. Aspek *Konatif* yaitu berwujud proses tendensi/kecenderungan untuk berbuat sesuatu objek, misalnya kecenderungan memberi pertolongan, menjauhkan diri dan sebagainya.

Indeks Kesalehan Sosial dihitung berdasarkan atas 3 (tiga) dimensi kesalehan sosial yaitu: (1) Nilai Stabilitas Sosial yang terdiri atas indikator ketentraman sosial dan penanganan konflik; (2) Nilai Solidaritas Sosial yang terdiri atas indikator pemberdayaan sosial, kepedulian, interaksi sosial, penanganan anak, perlindungan terhadap perempuan; (3) Nilai Gotong Royong yang terdiri atas kontribusi dan toleransi.

Tabel 3.28
Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Sumenep

No.	Indikator	2023	Target 2024	Realisasi 2024
1	Nilai Stabilitas Sosial	84,71	85,1	85,24
2	Nilai Solidaritas Sosial	78,01	79	85,14
3	Nilai Gotong royong	87,35	87,77	87,36
4	Indeks Kesalihan Sosial	83,36	83,50	85,91

Dari hasil survei dan perhitungan indeks kesalehan sosial Kabupaten Sumenep pada tahun 2021 - 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel. 3.29
Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Sumenep 2021-2024

No.	Indikator	2021	2022	2023	2024
1	Nilai Stabilitas Sosial	83,6	84,12	84,71	85,24
2	Nilai Solidaritas Sosial	70,13	75,97	78,01	85,14
3	Nilai Gotong royong	86,27	86,81	87,35	87,36
4	Indeks Kesalihan Sosial	80,46	82,3	83,36	85,91

Berdasarkan tabel diatas Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Sumenep dari Tahun 2021 sampai dengan 2024 terus mengalami peningkatan. Meningkatnya Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Sumenep menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumenep terus berupaya menjaga nilai-nilai budaya dan kearifan lokal sehingga menciptakan suasana dan kondisi lebih aman dan kondusif yang merupakan salah satu modal penting pembangunan di Kabupaten Sumenep.

3.3. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Untuk mengukur keberhasilan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dengan cara membandingkan antara target yang telah ditetapkan

dengan realisasi capaian setiap tahunnya, dengan menetapkan beberapa variabel sebagai indikator dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan tersebut, sehingga capaian dari masing-masing tahapan dapat dilakukan evaluasi untuk mengetahui capaian target kinerja yang ditetapkan oleh SKPD.

Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, menjadi dasar dalam penyusunan pedoman klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah bagi pemerintah daerah yang dibagi dalam : 1) Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 2) Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 3) Pelaksanaan Urusan Pilihan dan 4) Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan.

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan merupakan gambaran pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 yang dipilah berdasarkan bidang urusan pemerintah diantaranya urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan, unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawas, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum yang dijelaskan pada tabel berikut :

3.4. Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Sumenep mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategi tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused management*). Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Kebijakan Strategi yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat pada tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.31
Kebijakan Strategis Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2024

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	Mewujudkan pelaksanaan kegiatan promosi secara terfokus dan terintegrasi untuk memasarkan potensi investasi daerah (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Peraturan Daerah Nomor : 16 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal	1. Mengembangkan Potensi Investasi Daerah; 2. Melaksanakan Sumenep <i>Investment Summit</i> (SIS); 3. Mengembangkan teknologi informasi berbasis komunikasi digitalisasi
2	Mewujudkan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah dan terukur agar tercapai kepuasan	Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/445/KEP/435.013/2021 Tentang	1. Maklumat Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan;

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
	masyarakat / pengguna layanan. (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Di Kabupaten Sumenep	2. Standar Pelayanan Publik Per Jenis Perizinan Dan Non Perizinan Di Kabupaten Sumenep
3	Mengembangkan fasilitas pelayanan yang berorientasi pada kemudahan akses layanan melalui aplikasi. (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	1. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Secara Elektronik 2. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 78 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Kabupaten Sumenep; 3. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Di Kabupaten Sumenep	1. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai; 2. Pengembangan sistem informasi SINANTI (non perizinan media luar ruang). Meningkatkan pelayanan melalui pelayanan OSS RBA 1. Mengembangkan SDM yang memiliki kompetensi dan komitmen terhadap kepuasan konsumen; 2. Peningkatan Fasilitas Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumenep.
4	Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan)	Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881)	1. Penyesuaian terhadap struktur dan besaran tarif retribusi jasa umum atas pelayanan pasar berupa retribusi pemakaian pelataran/tanah halaman dalam lingkungan pasar dan pemakaian los; 2. Penyesuaian terhadap struktur dan besaran tarif retribusi jasa usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya berupa retribusi toko, stand, kios pasar dan pertokoan lainnya; 3. Penyesuaian terhadap struktur dan besaran tarif retribusi jasa usaha atas penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
			tempat pelelangan berupa retribusi tempat pelelangan/jual beli ternak; 4. Penyesuaian terhadap struktur dan besaran tarif retribusi jasa usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan berupa parkir khusus pasar.
5	Peraturan Bupati Sumenep Nomor 29 Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penatausahaan Pembelian Tembakau (Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan)	Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembelian dan Pengusahaan Tembakau (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2012 Nomor 15).	1. Terselenggaranya penatausahaan pembelian tembakau madura dikabupaten sumenep, serta memberikan perlindungan kepada semua pihak baik kepada penjual maupun pembeli; 2. Terciptanya kondisi yang kondusif dan adanya transparansi dalam proses pembelian dan penjualan tembakau madura sehingga salah satu pihak tidak ada yang dirugikan; 3. Terlaksananya iklim perdagangan yang sehat sehingga dapat menciptakan kesejahteraan dan meningkatkan perekonomian khususnya bagi petani tembakau.
6	Peraturan Bupati Sumenep Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Fasilitas Pasar (Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan)	1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512); 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277); 3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep	Sebagai pedoman Tata cara pendaftaran dan permohonan untuk Penerbitan Surat Izin Penggunaan Fasilitas Pasar.

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
		Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 Nomor 1).	
7	Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/ 256 /KEP/435.013/2024 tentang TIM MONITORING PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMBELIAN/PENJUALAN TEMBAKAU KABUPATEN SUMENEP TAHUN ANGGARAN 2024 (Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan)	Peraturan Bupati Sumenep Nomor 29 Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penatausahaan Pembelian Tembakau	1. Membentuk Tim Monitoring, Pengendalian dan Pengawasan Pembelian/Penjualan Tembakau Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024; 2. Membagi Kelompok Kerja Tim menjadi 3 Bagian yaitu Kelompok Kerja Budidaya, Kelompok Kerja Pengendalian/Pengawasan dan Kelompok Kerja Perdagangan.
8	Pembinaan pemuda melalui organisasi kepemudaan (Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata)	Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2019 Tentang kepemudaan	Meningkatnya penguasaan keterampilan dan kewirausahaan Pemuda
9	Pembinaan atlet olahraga dan pemenuhan fasilitasi sarana prasarana olahraga (Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata)	Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan	Meningkatnya prestasi olahraga dengan diraihnya medali di berbagai kejuaraan baik tingkat regional maupun nasional
10	Mengembangkan pemasaran potensi pariwisata daerah (Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata)	Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sumenep Tahun 2018-2025	semakin banyaknya destinasi wisata yang mulai dikelola secara baik oleh masyarakat dan meningkatnya jumlah wisatawan
11	Mempromosikan potensi wisata daerah (Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata)	Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sumenep Tahun 2018-2025	semakin banyaknya destinasi wisata yang mulai dikelola secara baik oleh masyarakat dan meningkatnya jumlah wisatawan
12	Pemberlakuan Sistem Remunerasi (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Peraturan Bupati Sumenep Nomor 10 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.	Sebagai dasar Pemberian Reward dan Punishment bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
13	Peningkatan Kompetensi Pegawai Tugas Belajar dan Ijin Belajar (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Peraturan Bupati Sumenep Nomor 58 Tahun 2024 Tentang Pengembangan Kompetensi Melalui Jalur Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep	Meningkatkan Kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep
14	Sosialisasi Layanan Penerapan Pelayanan Kepegawaian berbasis Elektronik (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian	Meningkatkan Pelayanan Kepegawaian terhadap Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep dengan cara melakukan perubahan proses administrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis komputer
15	Meningkatkan sosialisasi kebencanaan kepada masyarakat (Badan Penganggulangan Bencana Daerah)	Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep	Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang bencana alam dan penanggulangannya
16	Meningkatkan sosialisasi kebencanaan kepada masyarakat (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana	Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang bencana alam dan penanggulangannya
17	Meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Peraturan Bupati Sumenep Nomor 15 Tahun 2023 tentang Layanan Jemput Bola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sumenep	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perekaman KTP elektronik melalui kegiatan jemput bola; 2. Motivasi dan gerakan perekaman biometric bagi aparatur sipil negara dan keluarganya; 3. Mensyaratkan perekaman biometric sebelum penerbitan KIA; 4. Meningkatkan kualitas pelayanan penerbitan akta kelahiran melalui MPP; 5. Mengembangkan aplikasi penerbitan akta kelahiran online; 6. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat akta kematian; 7. Mengembangkan pola pelayanan penerbitan akta kematian dengan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
			bekerjasama dengan kelurahan/desa; 8. Mensosialisasikan manfaat KIA; 9. Mensosialisasikan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
18	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak serta Gizi Masyarakat; 2. Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular; 3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan di Faskes; 4. Meningkatkan Kualitas Pencatatan dan Pelaporan Bidang Kesehatan; 5. Meningkatkan Pengadaan dan Distribusi SDM yang Merata di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 6. Mengembangkan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK); 7. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB; 8. Meningkatkan kualitas pemenuhan alokasi pada fasilitas kesehatan; 9. Meningkatkan penguatan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) program Bangga Kencana melalui kelompok Tribina; 10. Meningkatkan sinkronisasi kebijakan dan pelaksanaan program Bangga Kencana; 11. Meningkatkan kualitas pengelolaan manajemen program Bangga Kencana, termasuk pengelolaan SDM, data, dan informasi; 	Peraturan Bupati Sumenep No 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep	Landasan, arah dan prioritas pembangunan dalam rangka perencanaan pembangunan tahunan daerah yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan.

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
	<p>12. Peningkatan kualitas penyusunan dan penyajian laporan kinerja;</p> <p>13. Monitoring pencapaian sasaran strategis atas penggunaan anggaran untuk program.</p> <p>(Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)</p>		
19	<p>Meningkatkan Tenaga Kerja yang Berkopetensi (Dinas Ketenagakerjaan)</p>	<p>Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional; Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja; Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan</p>	<p>1. Melaksanakan Pelatihan keterampilan berbasis kompetensi dan pemberian sarana sesuai kebutuhan;</p> <p>2. Menambah jenis pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar.</p>
20	<p>Meningkatkan Perlindungan Tenaga Kerja (Dinas Ketenagakerjaan)</p>	<p>Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja; Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan</p>	<p>Mewajibkan kepada semua Perusahaan untuk mendaftarkan pekerja/karyawannya pada BPJS Ketenagakerjaan; Memberikan jaminan kecelakaan kerja dan kematian.</p>
21	<p>Meningkatkan Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dinas Ketenagakerjaan)</p>	<p>Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja; Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan</p>	<p>1. Kurangnya informasi pengetahuan lowongan kerja yang tersebar di masyarakat yang menyebabkan kurang maksimalnya terserapnya angkatan kerja di masyarakat;</p> <p>2. Pelaksanaan Job Fair/Bursa Kerja.</p>
22	<p>Penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah (Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang)</p>	<p>Peraturan Bupati Sumenep Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2024</p>	<p>Landasan, arah dan prioritas pembangunan dalam rangka perencanaan pembangunan tahunan daerah yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan.</p>
23	<p>Pengaturan dan perencanaan pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Sumenep</p>	<p>Peraturan Daerah No 08 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten</p>	<p>Mewujudkan Tata Ruang di Kabupaten Sumenep yang efisien dan Berkelanjutan</p>

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
	(Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang)	Sumenep Tahun 2023 – 2043	
24	Pengelolaan sanitasi yang aman, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat (Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang)	Peraturan Daerah No 03 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik	Mewujudkan terjaganya kualitas air tanah dan air permukaan, Melindungi kesehatan masyarakat, Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, Memfasilitasi penyaluran dan pengelolaan air limbah domestik, Mengoptimalkan jaringan air limbah
25	Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten, pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten, penetapan status jalan kabupaten, dan perencanaan jaringan jalan kabupaten (Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang)	Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor 188/2024/KEP/435.013/2024 Perubahan Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten	Mengatur dan menetapkan status jalan kabupaten
26	Mewujudkan pelaksanaan kegiatan promosi secara terfokus dan terintegrasi untuk memasarkan potensi investasi daerah (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Peraturan Daerah Nomor : 16 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal	1. Mengembangkan Potensi Investasi Daerah; 2. Melaksanakan Sumenep Investment Summit (SIS); 3. Mengembangkan teknologi informasi berbasis komunikasi digitalisasi
27	Mewujudkan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah dan terukur agar tercapai kepuasan masyarakat / pengguna layanan. (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/445/KEP/435.013/2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Di Kabupaten Sumenep	1. Maklumat Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan; 2. Standar Pelayanan Publik Per Jenis Perizinan Dan Non Perizinan Di Kabupaten Sumenep
28	Mengembangkan fasilitas pelayanan yang berorientasi pada kemudahan akses layanan melalui aplikasi (Dinas Penanaman Modal)	1. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Secara Elektronik	1. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai; 2. Pengembangan system informasi SINANTI (non perizinan media luar ruang)

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
	Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	2. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 78 Tahun 2018 tentang Perubahan; 3. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Kabupaten Sumenep 4. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Di Kabupaten Sumenep	Meningkatkan pelayanan melalui pelayanan OSS RBA 1. Mengembangkan SDM yang memiliki kompetensi dan komitmen terhadap kepuasan konsumen; 2. Peningkatan Fasilitas Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumenep.
29	Penguatan UMKM, Pertanian dan Industri Olahan Perikanan sebagai Daya Tarik Investasi Daerah untuk Mengakselerasi Pertumbuhan (Dinas Perikanan)	Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor : 2 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026.	Arah kebijakan Dinas Perikanan memprioritaskan pemberdayaan dan perlindungan pelaku usaha dan kelompok perikanan serta meningkatkan produksi perikanan dalam rangka pemenuhan bahan baku dan konsumsi ikan masyarakat. Disamping itu meningkatkan pengawasan, evaluasi dan monitoring untuk meningkatkan daya saing produk perikanan
30	Mengembangkan Upaya Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan)	1. Perda Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penataan Perumahan; 2. Perbup Sumenep Nomor 188/361/KEP/435.103/2020 tentang Lokasi Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan Kumuh dan Kawasan Permukiman Kumuh Wilayah Perkotaan	Pengelolaan dan pengembangan fasilitas Perumahan dan permukiman kumuh
31	Mengembangkan Upaya Peningkatan Pembangunan Rumah Layak Huni (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan)	Perda Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penataan Perumahan	Pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
32	Mengembangkan upaya penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan)	Perda Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penataan Perumahan	Pemenuhan kebutuhan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
33	Mengembangkan upaya Penatagunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan)	Perda Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Kota Sumenep Tahun 2014-2034	Penyelesaian kasus sengketa status tanah pemerintah dan masyarakat atas kepastian status hukum
34	Mewujudkan Pembangunan Sarana Lalu Lintas dan Angkutan (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan)	1. Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan; 2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Departemen Perhubungan Tahun 2005-2025,	Pemenuhan kelengkapan fasilitas jalan dan penyediaan angkutan umum yang memadai
35	Mengembangkan Fungsi dan Efektifitas Sarana serta Sistem Konektivitas dan Mode Transportasi (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan)	1. Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan; 2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Departemen Perhubungan Tahun 2005-2025,	Pemenuhan Kebutuhan aksesibilitas jaringan transportasi antara kepulauan dan daratan
36	Pengelolaan Sampah (Dinas Lingkungan Hidup)	1. Pereturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah; 2. Pereturan Bupati Sumenep Nomor 83 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Sumenep dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.	- Mengurangi Kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah - Meningkatkan Kesehatan Masyarakat - Meningkatkan kualitas lingkungan hidup - Menjadikan sampah sebagai sumber daya
37	Meningkatkan pelayanan dasar PMKS bagi masyarakat kurang mampu (Dinas Sosial, Pemberdayaan)	Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 02 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan kualitas penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
	Perempuan dan Perlindungan Anak)		
38	Meningkatkan kualitas program pemberdayaan dan perlindungan sosial bagi peningkatan derajat kualitas hidup dan kesejahteraan PMKS (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 04 Tahun 2015 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia	Menjamin kebutuhan hidup dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tidak produktif seperti Penyandang Disabilitas Berat dan Lanjut Usia Terlantar.
39	Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah daerah (Inspektorat Daerah)	Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/434/KEP/435.013/2024 tentang Program Kerja Pengawasan Berbasis Risiko Pada Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2023	Pelaksanaan pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh APIP dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah daerah dengan adanya perencanaan pengawasan berbasis risiko dapat dilaksanakan secara terarah dan tepat sasaran.
40	Kebijakan Fasilitasi Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Publikasi Kegiatan DPRD (Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat)	PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak-hak Keuangan dan Administratif Anggota DPRD	Fasilitasi Penyerapan Aspirasi Masyarakat terhadap DPRD diperlukan guna menghimpun, mengakomodir dan menindaklanjuti penyampaian saran dan pendapat yang disampaikan kepada DPRD Sumenep dalam hal ini Sekretariat DPRD memfasilitasi pertemuan dan dialog antara elemen masyarakat dengan Pimpinan maupun Anggota DPRD Kabupaten Sumenep.
41	Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Sekretariat DPRD (Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat)	Permenpan No 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat	Penyusunan IKM Sekretariat DPRD ini dibutuhkan dalam rangka mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan Sekretariat DPRD

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
42	Peraturan Bupati Sumenep Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Sumenep Tahun 2023-2037 (Sekretariat Daerah)	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal	Pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target, pencapaian sasaran dan pencapaian mutu pemenuhan pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, Pedoman bagi Pemerintahan Daerah dalam Pelaksanaan, Pemantauan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Jangka Pendek dan Jangka Menengah.
43	Penetapan regulasi pajak dan retribusi daerah (Badan Pendapatan Daerah)	Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pedoman pemungutan pajak dan retribusi daerah
44	Penetapan regulasi pajak daerah (Badan Pendapatan Daerah)	Peraturan Bupati Sumenep Nomor 59 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah	Pedoman dan detail tata cara pemungutan pajak daerah
45	Penetapan regulasi retribusi daerah (Badan Pendapatan Daerah)	Peraturan Bupati Sumenep Nomor 63 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah	Pedoman dan detail tata cara pemungutan retribusi daerah
46	Percepatan dan perluasan digitalisasi pelayanan pajak dan retribusi daerah (Badan Pendapatan Daerah)	Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor. 188/111/KEP/435.013/2024 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Sumenep	Memperluas jangkauan pelayanan pajak dan retribusi daerah serta memudahkan akses bagi wajib pajak memperoleh layanan pajak daerah
47	Pemutakhiran data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Badan Pendapatan Daerah)	Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor. 188/275/KEP/435.013/2024 tentang Nilai Jual Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak	Penilaian dan penetapan secara massal Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
48	Pembentukan Tim Operasi Bersama Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah (Badan Pendapatan Daerah)	Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor. 188/294/KEP/435.013/2024 tentang Tim Operasi Bersama Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah	Mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak
49	Peningkatan produksi padi melalui kegiatan LTT (Luas Tambah Tanam dan PAT (Perluasan Areal Tanam)). (Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian)	1. Keputusan Menteri Pertanian No. 297/KPTS/OT. 050/M/07/2024 tentang Satuan Tugas Antisipasi Darurat Pangan;	Peningkatan produksi padi untuk mewujudkan swasembada pangan dan menuju Indonesia sebagai lumbung pangan pangan dunia

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
		2. Intruksi Menteri Pertanian No. 1 Tahun 2024 Tentang Percepatan Tanam Dan peningkatan Produksi Padi	
50	Keputusan bupati sumenep nomor : 188/ 370 /kep/435.013/2024 Tentang penunjukan perusahaan daerah sumekar kabupaten sumenep sebagai penyelenggara aglomerasi pabrik hasil tembakau di kabupaten sumenep (Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan)	1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 239); 2. Peraturan Bupati Sumenep nomor 53 tahun 2024 tentang penyelenggaraan Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau di Kabupaten Sumenep (berita daerah Kabupaten Sumenep tahun 2024 nomor 53.	Kebijakan ini ditetapkan dengan tujuan sebagai legal standing bagi PD Sumekar sebagai penyelenggara APHT / KIHT
51	Peraturan bupati sumenep Nomor 53 tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan aglomerasi pabrik hasil tembakau Di kabupaten sumenep (Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan)	1. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35/M-IND/PER/3/2010 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 134); 2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 239).	Kebijakan ini ditetapkan dengan tujuan : 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah; 2. Memberikan akses satu pintu bagi penyelenggaraan hasil industri tembakau; 3. Memberdayakan pelinting rokok lokal; 4. Memberdayakan masyarakat lokal; 5. Mencegah peredaan rokok illegal; 6. Memperluas lapangan pekerjaan.

3.5. Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran sebelumnya

Komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Sumenep merupakan faktor penting dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kabupaten Sumenep tahun anggaran 2022, yang secara resmi disampaikan melalui Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumenep. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini merupakan salah satu bentuk perwujudan amanat konstitusi yaitu pertanggungjawaban tahunan atas pelaksanaan

pemerintahan daerah. LKPJ berisi tentang laporan atas implementasi Kebijakan Pembangunan dan Keuangan yang sudah ditetapkan, maupun disepakati oleh Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD yang dituangkan dalam dokumen RKPD, KUA PPAS dan APBD Tahun 2023.

LKPJ disusun sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja Pemerintah Kabupaten Sumenep selama satu tahun anggaran yaitu 2023. Dengan disusunnya LKPJ, masyarakat diharapkan mendapatkan gambaran yang jelas dan komprehensif tentang berbagai kebijakan yang sudah diimplementasikan, berikut dengan hasil-hasil yang dicapai dan didukung dengan data-data yang riil, Update dan layak dipercaya.

Adapun beberapa catatan rekomendasi DPRD Kabupaten Sumenep yang harus tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Sumenep terhadap hasil rekomendasi yang diberikan pada tahun anggaran 2022 dituangkan dalam format sebagai berikut :

Tabel 3.32
Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran 2024

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Terkait profesionalisme ASN harus ditegakkan dalam hal terkait tupoksinya masing-masing. Faktanya banyak ASN yang mengurus sesuatu perkara di luar tupoksinya	1. Program Kepegawaian Daerah <ul style="list-style-type: none"> a. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN b. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN c. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN d. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Anggaran Rp. 2.095.171.500 2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia <ul style="list-style-type: none"> a. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis b. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Anggaran Rp. 647.108.700 	Agar Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep lebih Profesional dalam menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
2	<p>KIHT (Kawasan Industri Hasil Tembakau), yang sampai detik ini belum berfungsi dan belum terasa manfaatnya, padahal sudah menyedot anggaran yang sangat besar. Sebaiknya KIHT bisa di swakelola atau bekerjasama dengan BUMD dan para pengusaha sekitar.</p>	<p>Program Perencanaan dan Pembangunan Industri</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota - Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri - Pagu Anggaran untuk Kegiatan KIHT sebesar Rp. 2.178.379.865,- 	<p>Tujuan Tindaklanjut Rekomendasi :</p> <p>Pembangunan KIHT/ APHT pada tahun 2024 memasuki Tahap IV dan telah menyelesaikan pembangunan Gedung Bea Cukai dan 4 Gudang Produksi. Telah ada kerjasama dengan beberapa pelaku usaha IHT lokal untuk memproduksi produk tembakau di dalam KIHT/ APHT . terkait pengelola KIHT/ APHT Pemerintah Kabupaten Sumenep telah menunjuk PD Sumekar sebagai pengelola dan akan mulai beroperasi setelah ijin operasional dari Bea Cukai keluar pada tahun 2025 ini.</p>
3	<p>Terkait dengan pengembangan UMKM yang terkendala dari adanya proteksi anggaran dari Pemkab, khususnya terkait dengan beberapa UMKM yang mempunyai prestasi di tingkat Regional maupun Nasional. Apalagi pengembangan UMKM ini menjadi salah satu Prioritas Utama. Untuk itu perlu adanya dukungan pendanaan terkait pengembangan UMKM tersebut.</p>	<p>Program Pengembangan UMKM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil - Subkegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi - Pagu Anggaran untuk Kegiatan Pengembangan UMKM Rp. 759.300.226,- 	<p>Tujuan Tindaklanjut Rekomendasi :</p> <p>Pembinaan terhadap pelaku usaha UMKM tetap mendapatkan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Sumenep. Tindaklanjut oleh Diskoperindak adalah adanya kerjasama dengan PT Semeru Indonesia Maju (Goorita) dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Kerjasama tersebut meliputi konsultasi perizinan, peningkatan kualitas produk, sertifikasi produk, pengemasan dan kerjasama pemasaran melalui even dan pameran. Bahkan bagi UMKM unggulan ada bantuan pemasaran produk untuk ekspor dan mengikuti promosi di Luar negeri.</p>

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
4	<p>Permasalahan Penerangan Lampu Jalan Umum Ada beberapa hal yang harus segera di lakukan langkah-langkah oleh Pemerintah Kabupaten terkait hal tersebut antara lain :</p> <p>a. Perbaikan / Pemeliharaan lampu yang sudah rusak/mati.</p> <p>b. Memperpendek jarak antara tiang ketiang dan meperbanyak pemasangan tiang hingga ke pelosok pedesaan.</p> <p>Hal ini jika segera dilakukan akan mengurangi keresahan masyarakat pada malam hari dan tentunya akan memberikan Rasa aman.</p>	<p>1. Pemeliharaan PJU akan terus dan selalu dilaksanakan dari tahun ke tahun, baik di wilayah daratan maupun kepulauan, baik di pedesaan maupun di perkotaan.</p> <p>2. Adapun tahun 2024 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dengan pagu anggaran Rp. 16.148.010.767</p>	<p>Pemeliharaan PJU selesai tepat waktu di tahun 2024</p>

TABEL 3.30
CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	93,75 %	93,75 %	-	-	-
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18 Dokumen	18 Dokumen	-	-	-
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	Terdapat mekanisme perencanaan terkait Dau Spesifik dan keterlambatan juknis DAK	Mengajukan usulan perubahan perencanaan	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	6 Laporan	Data yang dibutuhkan untuk menyusun laporan Pendidikan Kabupaten terkait dengan OPD Lain (Dikdukcapil) dan Kemenag	Mengajukan permohonan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan sesuai kewenangan masing-masing instansi terkait	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	29 Laporan	29 Laporan	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5108 Orang/bulan	5108 Orang/bulan	SK Kenaikan pangkat dan kenaikan berkala seringkali turun ketika SPP gaji sudah diajukan Sertifikasi guru sering terlambat karena menunggu transfer anggaran dari pusat	Dilakukan usulan rapel gaji di bulan lain bulan berikutnya Sertifikasi guru tetap diajukan SPP ketika transfer anggaran sudah masuk di Kasda	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semester SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Laporan keuangan terlambat karena mekanisme pencairan dan pertanggungjawaban BOS terdapat perbedaan waktu dengan pelaporan APBD	mempercepat pelaporan BOS secara maksimal	-
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Pencatatan aset BOS terlambat	Membatasi waktu pertanggungjawaban aset BOS lebih awal	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	380 Item	380 Item	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 Paket	3 Paket	penyebaran jaringan listrik tidak seimbang	Telah dilakukan perbaikan instalasi listrik	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Paket	4 Paket	Kurangnya AC, dan perangkat TIK	Pemenuhan paling prioritas sesuai kemampuan APBD	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15 Paket	15 Paket	Lingkup pekerjaan Disdik yang luas serta kurangnya tenaga kerja	Penyediaan jasa tenaga Non ASN	-
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3 Paket	3 Paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	45 Dokumen	45 Dokumen	Tagihan media yang belum bisa dipenuhi	membatasi jumlah pembayaran untuk media yg bertema sama dengan beberapa tagihan	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	310 Laporan	310 Laporan	Pelaksanaan rapat-rapat undangan koordinasi dan konsultasi baik dalam kabupaten maupun luar kabupaten seringkali bersamaan	Hadir sesuai kemampuan anggaran dan kecukupan pegawai	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2027 Layanan	2027 Layanan	-	-	-
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2300 Laporan	2300 Laporan	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	102 Unit	120 Unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14 Unit	14 Unit	Kemampuan APBD yang kurang untuk membayar kendaraan dinas sepeda motor yang telah dilelang dan yang ada di gudang (tidak ada yang menggunakan)	pembayaran pajak sesuai kemampuan APBD	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 Unit	100 Unit	peralatan dan mesin akan cepat susut nilainya apabila tidak dilakukan pemeliharaan	menggunakan peralatan dan mesin sesuai manual masing-masing agar penggunaannya lebih lama dan lebih baik	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4 Unit	4 Unit	Gedung kantor akan mengalami penyusutan kualitas	Dilakukan pemeliharaan rutin dan rehab se perlunya	-
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	44,80 %	45,4 %	Indikator yang benar adalah Persentase akreditasi Min. B dengan target 44,80 % yang realisasinya menunjukkan angka yang sangat baik yaitu 45,40 % dengan nilai capaian 101,34 %.	pengajuan untuk mendapatkan rehabilitasi atau pembangunan sarana yang dapat memadai	-
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	103,75 % 92,80 % 106,04 % 0,34 % 11,5:1 Rasio 17:1 Rasio	103,75 % 92,8 % 106,04 % 0,34 % 11:1 Rasio 11:1 Rasio 16:1 Rasio 16:1 Rasio	-	-	-
				Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	8 Ruang	8 Ruang	Juknis DAK terlambat	Sebagian pekerjaan fabrikasi	-
				Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	8 Ruang	8 Ruang	Juknis DAK terlambat	sebagian pekerjaan fabrikasi	-
				Pembangunan Perpustakaan Sekolah	30 Ruang	30 Ruang	Juknis DAK terlambat	Sebagian pekerjaan fabrikasi	-
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	36 Unit	36 Unit	Juknis DAK terlambat	sebagian pekerjaan fabrikasi	-
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	30 Ruang	30 Ruang	Juknis DAK terlambat	Juknis DAK terlambat	-
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	7 Ruang	7 Ruang	Juknis DAK terlambat	sebagian pekerjaan fabrikasi	-
				Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	30 Ruang	30 Ruang	Juknis DAK terlambat	sebagian pekerjaan fabrikasi	-
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1 Paket	1 Paket	-	-	-
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	35 Peserta Didik	35 Peserta Didik	-	-	-
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	300 Orang	300 Orang	-	-	-
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	75 Orang	75 Orang	-	-	-
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	579 Satuan Pendidikan	579 Satuan Pendidikan	-	-	-
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	579 Satuan Pendidikan	579 Satuan Pendidikan	-	-	-
				Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	14 Ruang	14 Ruang	-	-	-
				Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	2 Ruang	2 Ruang	Juknis DAK terlambat	sebagian pekerjaan fabrikasi	-
				Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	-
				Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	9 Buku	9 Buku	Juknis DAK terlambat	Pengadaan buku secara cepat	-
				Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	3 Paket	3 Paket	-	-	-
				Pembangunan Ruang Kelas Baru	3 Ruang	3 Ruang	-	-	-
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	65 Unit	65 Unit	-	-	-
				Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	579 Satuan Pendidikan	579 Satuan Pendidikan	-	-	-
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	86 Ruang	86 Ruang	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	105,10 % 76,50 % 94,38 % 0,34 % 11,5:1 Rasio 25:1 Rasio	105,1 % 96,01 % 94,38 % 0,34 % 11:1 Rasio 11:1 Rasio 24:1 Rasio 24:1 Rasio	-	-	-
				Pembangunan Laboratorium	75 Ruang	75 Ruang	-	-	-
				Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	17 Ruang	17 Ruang	-	-	-
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	280 Orang	280 Orang	-	-	-
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	43 Satuan Pendidikan	43 Satuan Pendidikan	-	-	-
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	1 Ruang	1 Ruang	-	-	-
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	1 Ruang	1 Ruang	-	-	-
				Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	43 Satuan Pendidikan	43 Satuan Pendidikan	-	-	-
				Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	71,94 % 18,12 %	73,04 % 18,12 %	-	-	-
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	7 Unit	7 Unit	-	-	-
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	7 Paket	7 Paket	-	-	-
				Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	27500 Peserta Didik	27500 Peserta Didik	-	-	-
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	70 Orang	70 Orang	-	-	-
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	991 Satuan Pendidikan	991 Satuan Pendidikan	-	-	-
				Pengelolaan Dana BOP PAUD	991 Satuan Pendidikan	991 Satuan Pendidikan	-	-	-
				Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	845595 Orang 76 Lembaga	845595 Orang 76 Lembaga	-	-	-
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	1 Paket	1 Paket	-	-	-
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	100 Satuan Pendidikan	100 Satuan Pendidikan	-	-	-
				Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	540 Satuan Pendidikan	540 Satuan Pendidikan	-	-	-
				PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	98,30 %	98,3 %	-	-	-
				Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	98,30 % 50 %	98,3 % 50 %	-	-	-
				Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	12 Dokumen	12 Dokumen	Kurangnya ASN Pendidik dan tenaga Kependidikan sehingga menghadirkan tenaga Non ASN	Memberikan insentif untuk Pendidik dan tenaga Kependidikan sebagai penghargaan minimal	-
				Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	12 Laporan	12 Laporan	Non ASN eks K2 yang aktif belum terjamin dalam seleksi ASN maupun P3K	Memberikan honorarium atas Pendidik dan tenaga Kependidikan eks K2	-
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	91,3 %	90 %	Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	-	-
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 dokumen	12 dokumen	Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	-	-
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17 Dokumen	17 Dokumen	Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	-	-
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10 laporan	10 laporan	Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	=	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16404 Orang/bulan	16404 Orang/bulan	Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	-	-
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30 Dokumen	30 Dokumen	Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	3 Laporan	Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 jenis	7 jenis	Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50 Paket	50 Paket	Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19 Paket	19 Paket	Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36 Paket	36 Paket	Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	-	-
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7 Paket	7 Paket	Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	170 Dokumen	170 Dokumen	Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	560 Laporan	560 Laporan	Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47 unit	47 unit	Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 Unit	3 Unit	Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 Unit	10 Unit	Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 Unit	3 Unit	Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1		RSUD H. MOH. ANWAR		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	100 %	-	-	-		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	401 Orang	401 Orang	-	-	-		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	401 Orang	401 Orang	-	-	-		
				Peningkatan Pelayanan BLUD	85 %	106,2 %	-	-	-		
					70 %	80,36 %	-	-	-		
					3 Hari	0,92 Hari	-	-	-		
					6 Hari	3,77 Hari	-	-	-		
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	70 %	80,36 %	-	-	-		
		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	91 Orang	56,3 Orang	Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	-	-
						Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	70 %	70 %	Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	-	-
						Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	1 Unit	1 Unit	Pembangunan lanjutan RSUD Abuya Kangean berdampak pemetaan sub kegiatan DAK Fisik Tahun 2024 sesuai Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 22 April 2024 Nomor: 900.1/1819.A/SJ perihal Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK TA 2024	Pindah Sub Kegiatan 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit	-
						Pengembangan Puskesmas	30 Unit	30 Unit	Perencanaan pengadaan puskesmas keliling di 30 Puskesmas dilakukan di Triwulan I dan II, Realisasi dilakukan di Triwulan III	-	
						Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Unit	1 Unit	Rencana Rehabilitasi dan Pemeliharaan GFK dilaksanakan di Triwulan I dan II, Realisasi di Triwulan III dan IV	-	
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	1 Unit	1 Unit	Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	-	
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3 Unit	2 Unit	Perencanaan dan Pengadaan sarana di Labkesda dilaksanakan di Triwulan I - II, Realisasi akan dilaksanakan pada Triwulan IV	-	
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	70 Unit	65 Unit	Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan di Triwulan I dan II, Realisasi kegiatan dilaksanakan di triwulan III dan IV	-							
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	30 Unit	30 Unit	Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	-							

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pengembangan Rumah Sakit	1 Unit	0 Unit	Kegiatan Pembangunan Lanjutan RSUD Abuya yang terdiri Pembangunan Ruang Rawat Inap(KRIS), Pembangunan Gedung IPRS RSUD Abuya Kangean, Pembangunan Gedung Limbah/Sampah RSUD Abuya Kangean, Pembangunan Gedung laundry RSUD Abuya Kangean dan Sarana Gedung PICU/NICU telah dilaksanakan, Namun untuk Pembangunan Gedung IPRS RSUD Abuya Kangean pemasangan listriknya tidak dapat dilanjutkan karena ada kendala teknis dari pihak PLN.	Jangka pendek dilakukan Adendum kontrak Pembangunan Gedung IPRS RSUD Abuya Kangean, dan jangka panjang diajukan lanjutan pemasangan listrik di tahun 2025.	-
				Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	3 Paket	3 Paket	Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	-	-
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	100 Keluarga	100 Keluarga	Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	-	-
				Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)	3 Layanan	3 Layanan	Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	-	-
				Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	12 Paket	12 Paket	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin ke Fasilitas Kesehatan dilaksanakan tiap bulan	-	-
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10 %	386,68 %	Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	-	-
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	13458 Orang	13,073 Orang	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sebesar 77,29%. Hal ini dikarenakan ada penyesuaian sasaran bayi baru lahir sesuai Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/140/2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/5675/2021 Tentang Data Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan Tahun 2021 - 2025 sehingga ada penambahan sasaran	Untuk memenuhi capaian pelayanan kesehatan bayi baru lahir tersebut, kita harus tetap memotivasi ibu hamil dan meningkatkan peran serta masyarakat dan kader agar bersalin di fasyankes sehingga seluruh bayi lahir di Kabupaten Sumenep diharapkan dapat memperoleh beberapa pelayanan tersebut dan tidak terjadi komplikasi atau kegawatdaruratan pada bayi baru lahir	-
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	150000 Orang	118178 Orang	Penyesuaian jumlah sasaran sesuai Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/140/2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/5675/2021 Tentang Data Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan Tahun 2021 - 2025 sehingga ada penambahan sasaran	Evaluasi terhadap jumlah sasaran di penetapan KMK	-
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	184276 Orang	184276 Orang	Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	11998 Orang	10853 Orang	masih rendahnya Kesadaran Masyarakat tentang Penyakit Tidak Menular termasuk DM, Keterbatasan Tenaga Kesehatan Terlatih dan kurangnya Kolaborasi antar sektor.	1.Peningkatan Pendidikan Kesehatan 2.Penguatan Sistem Kesehatan 3.Memperluas Akses Layanan Kesehatan 4.Peningkatan Infrastruktur Kesehatan 5.Promosi Gaya Hidup Sehat 6.Kolaborasi Antar Sektor	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	16462 Orang	20618 Orang	Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	-	-
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	18782 Orang	18782 Orang	Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	-	-
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	-	-
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen	Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	-	-
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	-	-
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	-	-
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	-	-
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	-	-
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	200 Orang	282 Orang	Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	-	-
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	-	-
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	-	-
				Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	12 Paket	0 Paket	Tidak terdapat kejadian KLB	kegiatan bersifat penyediaan	-
				Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	2 Dokumen	2 Dokumen	Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	-	-
				Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	1 Dokumen	Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	-	-
				Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	-	-
				Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	-	-
				Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	30 Unit	30 Unit	Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	-	-
				Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	12 Laporan	Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	-	-
				Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	12 Dokumen	12 Dokumen	Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	-	-
				Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	1 Unit	Belum ada payung hukum terkait pembentukan PSC 119 di Kab. Sumenep	Bergabung dengan CC 112 dalam pelaksanaan program SPGDT	-
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	5 Orang	4 Orang	Kegiatan Bersifat Penyedia / kegiatan dilakukan saat terjadi Kasus	-	-
				Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	7 Tatanan	5 Tatanan	Terdapat 2 Tatanan yang belum tercapai dikarenakan pelaksanaan KTR tidak dipatuhi	Dilakukan evaluasi dan monitoring terhadap 2 tatanan yang belum tercapai	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	4 Dokumen	4 Dokumen	Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	-	-
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	80 %	100 %	Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	-	-
				Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	-	-
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4 RS	5 RS	Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	-	-
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	5 Unit	5 Unit	Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	-	-
				Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	30 Unit	30 Unit	Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	-	-
		RSUD H. MOH. ANWAR		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	70 %	70 %	-	-	-
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3 Hari	0,92 Hari	-	-	-
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	70 %	80,36 %	-	-	-
				Pengembangan Rumah Sakit	70 %	35 %	-	-	-
		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1:690 rasio	0 rasio	Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	-	-
				Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	75 %	75 %	Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	-	-
				Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	-	-
				Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	-	-
				Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	-	-
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	391 Orang	391 Orang	Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	-	-
				Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	-	-
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	-	-
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	120 Orang	120 Orang	Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	-	-
				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	85 %	85 %	Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	-	-
				Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	10 Rekomendasi	10 Rekomendasi	Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	-	-
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	1 Dokumen	Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	10 Rekomendasi	10 Rekomendasi	Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	-	-
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	2 Dokumen	2 Dokumen	Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	-	-
				Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	30 %	30 %	Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	-	-
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	2 Dokumen	1 Dokumen	Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	-	-
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	5,81 %	19,5 %	Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	-	-
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4 keg	4 keg	Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	-	-
				Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	8 Dokumen	6 Dokumen	Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	-	-
				Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20 %	20 %	Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	-	-
				Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	2 Dokumen	2 Dokumen	Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	-	-
				Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	-	-
				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	2 Dokumen	Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	-	-
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	1. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2024; 2. Peraturan Daerah No 08 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 – 2043; 3. Peraturan Daerah No 03 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik; 4. Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor 188/2024/KEP/435.013/2024 Perubahan Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	100 % 100 % 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 100 % 100 Orang/bulan 1 Laporan 10 Laporan 12 Dokumen 100 % 100 Dokumen 100 Laporan 100 % 100 Dokumen	100 % 100 % 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 100 % 2369353751 Orang/bulan 476001 Laporan 10 Laporan 12 Dokumen 100 % 100 Dokumen 100 Laporan 100 % 100 Dokumen	- -	- -	- -

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	-	-	-
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	100 Unit	100 Unit	-	-	-
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100 Dokumen	100 Dokumen	-	-	-
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100 Orang	900100 Orang	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	50 Jenis	50 Jenis	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 Paket	100 Paket	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 Paket	219329368 Paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100 Paket	39343600 Paket	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 Paket	6702050 Paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100 Dokumen	9845100 Dokumen	-	-	-
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 Laporan	100 Laporan	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	54903493 Laporan	-	-	-
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 Unit	0 Unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	-	-	-
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan	100 Laporan	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 Laporan	56019446 Laporan	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 Laporan	100 Laporan	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 Unit	69321040 Unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	100 Unit	33076044 Unit	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 Unit	3889100 Unit	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100 Unit	7080835 Unit	-	-	-
				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	52,64 %	50,78 %	-	-	-
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			-	-	-
				Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	52,64 KM	191068351 KM	-	-	-
				Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	52,64 Unit	48 Unit	-	-	-
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			-	-	-
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	52,64 KM	50 KM	-	-	-
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah	52,64 KM	47,5 KM	-	-	-
				Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	52,64 KM	70720045 KM	-	-	-
				Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	52,64 Bendung	157505039 Bendung	-	-	-
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	5,74 %	5,74 %	-	-	-
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	574 %	574 %	-	-	-
				Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	5,74 Liter/Detik	5,25 Liter/Detik	-	-	-
				Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	5,74 SR	5,5 SR	-	-	-
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	71,96 %	60,1 %	-	-	-
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	71,96 %	65 %	-	-	-
				Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	71,96 Unit	18985065 Unit	-	-	-
				Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	71,96 M ³ /Hari	67 M ³ /Hari	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	71,96 Rumah Tangga	72 Rumah Tangga	-	-	-
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	93 %	92 %	-	-	-
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	93 %	93 %	-	-	-
				Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	93 Sistem Drainase Perkotaan	89 Sistem Drainase Perkotaan	-	-	-
				Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	93 Sistem Drainase Perkotaan	82534458 Sistem Drainase Perkotaan	-	-	-
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	93,42 %	73,15 %	-	-	-
				Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	93,42 %	93,42 %	-	-	-
				Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	93 Dokumen	93 Dokumen	-	-	-
				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	67,04 %	75,39 %	-	-	-
				Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	78,18 %	70,39 %	-	-	-
				Pembangunan Jalan	67,40 KM	65 KM	-	-	-
				Rekonstruksi Jalan	67,40 KM	18078065 KM	-	-	-
				Pemeliharaan Berkala Jalan	67,40 KM	67 KM	-	-	-
				Pelebaran Jalan Menuju Standar	67,40 KM	48 KM	-	-	-
				Pemeliharaan Rutin Jembatan	67,40 Jembatan	74068185 Jembatan	-	-	-
				Pembangunan Jembatan	67,40 Jembatan	66 Jembatan	-	-	-
				Pemeliharaan Rutin Jalan	67,40 KM	74068183 KM	-	-	-
				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	63,38 %	65 %	-	-	-
				Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	13,14 %	17 %	-	-	-
				Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	25 Orang	13556025 Orang	-	-	-
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	28,57 %	14,29 %	-	-	-
				Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	39,29 %	14 %	-	-	-
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	28,57 Dokumen	7478514 Dokumen	-	-	-
				Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	28,57 Dokumen	18 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	-	-	-
				Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	28,57 Layanan	28 Layanan	-	-	-
				Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	28,57 Dokumen	28 Dokumen	-	-	-
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1. Perda Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penataan Perumahan, 2. Perbup Sumenep Nomor 188/361/KEP/435.103/2020 tentang Lokasi Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan Kumuh dan Kawasan Permukiman Kumuh Wilayah Perkotaan; 3. Pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	100 %	100 %	-	-	-
				Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	10 Rumah	10 Rumah	-	-	-
				Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-
				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	70 %	65 %	-	-	-
				Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1,65 Ha	1,65 Ha	-	-	-
				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	160 Unit Rumah	151 Unit Rumah	-	-	-
				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	15,44 %	15 %	-	-	-
				Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	81109,166 m2	81109 m2	-	-	-
				Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	10 Laporan	10 Laporan	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1. Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	90 %	100 %	-	-	-
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28 dokumen	28 dokumen	-	-	-
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 jenis	0 jenis	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	0 Orang/bulan	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	30 Laporan	30 Laporan	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 jenis	0 jenis	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6 Paket	0 Paket	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	132 Paket	132 Paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	240 Paket	240 Paket	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	84 Paket	84 Paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6 Dokumen	6 Dokumen	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125 Laporan	114 Laporan	-	-	-
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 unit	4 unit	-	-	-
				Pengadaan Mebel	1 Unit	1 Unit	-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Unit	3 Unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 jenis	0 jenis	-	-	-
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Laporan	60 Laporan	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64 unit	63 unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20 Unit	20 Unit	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42 Unit	42 Unit	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	1 Unit	-	-	-
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	90 %	90 %	Pemaksimalan dalam penyerapan anggaran program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Kegiatan yang direalisasikan secara maksimal	tidak ada tindak rekomendasi dari dprd
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	6 Dokumen	-	-	-
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	Tidak terdapat permasalahan karena penanggungjawab sub kegiatan bekerja secara maksimal	Kebutuhan terhadap dokumen perencanaan guna dasar dari semua program opd	Tidak terdapat rekomendasi dari DPRD
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	Tidak terdapat permasalahan karean RKA merupakan dokumen penting	Penyusunan RKA sebagai dasar dari semua sub kegiatan di OPD	tidak terdapat saran lebih lanjut dari DPRD
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen	tidak terdapat permasalahan terkait Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang maksimal	tidak terdapat saran lebih lanjut dari DPRD
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen	tidak terdapat permasalahan dalam melaksanakan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	memaksimalkan realisasi dari sub kegiatan tersebut	tidak ada rekomendasi dari DPRD
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2 Dokumen	0 Dokumen	Tidak terdapat permasalahan terkait Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	memaksimalkan realisasi sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tidak terdapat rekomendasi dari DPRD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	Kegiatan tercapai tanpa ada permasalahan yang berarti	Memaksimalkan kinerja demi terealisasinya	Tidak terdapat rekomendasi dari DPRD

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	Kegiatan berjalan karena bagian pemenuhan kebutuhan pegawai dan realisasi anggaran sub kegiatan opd	Memaksimalkan kinerja demi terrealisasinya sub kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tidak terdapat rekomendasi dari DPRD
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/bulan	80 Orang/bulan	Kegiatan dapat maksimal terealisasi dikarenakan bagian pemenuhan kebutuhan pegawai opd	memaksimalkan kinerja agar terealisasi sub kegiatan tersebut	tidak ada rekomendasi dari DPRD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	Kegiatan ini belum terlaksana dan akan terlaksana pada triwulan keempat	Kegiatan belum terlaksana	Tidak ada rekomendasi dari DPRD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD	2 Laporan	2 Laporan	Sub kegiatan terlaksana dengan optimal sebagai bagian dari pemenuhan administrasi dalam pencairan anggaran yang dibutuhkan	Memaksimalkan pekerjaan	tidak ada rekomendasi dari DPRD
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	4 Dokumen	Sub kegiatan berjalan dengan lancar	tidak ada permasalahan yang berarti	tidak terdapat rekomendasi dari DPRD
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Jenis	8 Jenis	sub kegiatan berjalan sesuai dengan yang direncanakan	tidak terdapat permasalahan yang berarti	tidak ada rekomendasi dari DPRD
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 Paket	2 Paket	Sub kegiatan ini merupakan tagihan bulan untuk mengakomodir fasilitas listrik kantor sehingga dapat berjalan dengan maksimal	Memaksimalkan kinerja agar terealisasinya sub kegiatan	Tidak terdapat rekomendasi dari DPRD
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Paket	4 Paket	Tidak terdapat permasalahan dikarenakan realisasi dari sub kegiatan merupakan kebutuhan sehari-hari kantor	mengerjakan secara optimal sesuai kebutuhan yang perlu dipenuhi	tidak terdapat rekomendasi dari DPRD
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5 Paket	5 Paket	tidak terdapat permasalahan terkait penyediaan bahan logistik kantor	tidak terdapat permasalahan yang berarti	tidak terdapat rekomendasi dari DPRD
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	2 Paket	tidak terdapat kesulitan karena bagian dari kebutuhan kantor	memaksimalkan kinerja terhadap realisasi sub kegiatan	tidak terdapat rekomendasi dari DPRD
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4 Dokumen	0 Dokumen	Kegiatan terlaksana karena bagian bentuk pemenuhan setiap bulan	Memaksimalkan kinerja agar tercapainya realisasi sub kegiatan	Tidak terdapat rekomendasi dari DPRD
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	35 Laporan	kegiatan berjalan sebagai bentuk rapat menyiapkan sub kegiatan beserta evaluasi	memaksimalkan kinerja agar tercapai realisasinya	tidak terdapat rekomendasi dari DPRD
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10 unit	9 unit	Sub kegiatan berjalan tanpa ada masalah berarti sebagai bentuk pemenuhan terhadap saran dan prasarana opd	memaksimalkan kinerja agar tercapainya realisasi sub kegiatan	tidak terdapat rekomendasi dari DPRD
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7 Unit	0 Unit	kegiatan terlaksana dikarenakan bagian dari kebutuhan opd seperti komputer dan mesin-mesin penunjang lainnya	memaksimalkan kinerja terhadap realisasi sub kegiatan	tidak terdapat rekomendasi dari DPRD
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Jenis	2 Jenis	Kegiatan tersebut menyediakan jasa-jasa yang dibutuhkan oleh OPD sehingga dapat berjalan dengan lancar	Memaksimalkan kinerja agar tercapainya realisasi sub kegiatan	tidak ada rekomendasi dari DPRD
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	3 Laporan	Kegiatan tersebut terlaksana bagian dari memenuhi penunjang pembayaran jasa surat menyurat	Memaksimalkan kinerja agar tercapainya sub kegiatan	tidak dapat rekomendasi DPRD
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	Sub kegiatan dapat dilakukan secara maksimal karena bagian pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Memaksimalkan kinerja agar tercapainya realisasi sub kegiatan	Tidak terdapat rekomendasi DPRD
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95 unit	45 unit	sub kegiatan ini dapat terpenuhi karena bagian pemeliharaan aset aset dinas	memaksimalkan kinerja agar tercapainya realisasi sub kegiatan	tidak terdapat rekomendasi dari DPRD
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	0 Unit	Sub kegiatan dapat berjalan dengan lancar karena bagian dari pemenuhan terhadap sarana dan prasarana	Kinerja yang maksimal untuk mencapai realisasi terhadap sub kegiatana	Tidak terdapat rekomendasi dari DPRD

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14 Unit	14 Unit	Sub kegiatan dapat maksimal dipenuhi karena bagian dari pemenuhan kebutuhan kendaraan operasional dan lapangan	memaksimalkan kinerja terhadap tercapainya kinerja	tidak terdapat rekomendasi dari DPRD
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20 Unit	20 Unit	Sub kegiatan dapat berjalan karena bagian dari memelihara komputer-komputer OPD untuk menunjang pekerjaan	memaksimalkan kinerja terhadap realisasi capaian sub kegiatan	tidak terdapat rekomendasi DPRD
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	0 Unit	Sub kegiatan tercapai karena bagian untuk menjaga dan memperbaiki terhadap kerusakan gedung kantor	memaksimalkan kinerja terhadap capaian realisasi sub kegiatan	tidak terdapat rekomendasi dari DPRD
				PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	90 %	90 %	Program dapat berjalan lancar sesuai target yang direncanakan	dukungan sdm yang telah maksimal mengerjakan sesuai dengan rencana yang dibuat	tidak terdapat rekomendasi dari DPRD
				Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			Kegiatan dapat berjalan terutama penyerapan anggaran dikarenakan sdm yang terlibat dalam dapat mencapai realisasi bekerja secara maksimal	SDM yang terlibat telah bekerja secara maksimal sehingga tidak terdapat masalah yang berarti dan dapat mencapai realisasi terhadap rencana yang telah dirumuskan	tidak terdapat rekomendasi DPRD
				Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	3 Dokumen	4 Dokumen	Kegiatan berjalan tanpa ada masalah karena keterlibatan tim yang maksimal telah berkinerja dengan baik	kinerja tim yang terlibat dengan baik	tidak terdapat rekomendasi dari DPRD
				Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	82 Orang	82 Orang	Tidak terdapat permasalahan yang berarti karena tim yang terlibat telah bekerja secara maksimal	dukungan sdm yang terlibat dengan kinerja terbaik sehingga tercapai realisasi kegiatan tersebut	tidak terdapat rekomendasi dari DPRD
				Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	10 Dokumen	10 Dokumen	Tidak terdapat permasalahan yang berarti terhadap sub kegiatan tersebut	SDM yang terlibat memberikan performa kinerja yang terbaik	tidak dapat rekomendasi dari DPRD
				Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	300 laporan	300 laporan	Kegiatan dapat berjalan lancar karena agenda rutin dari tim yang terlibat	tim yang terlibat bekerja secara maksimal	tidak terdapat rekomendasi dari DPRD
				Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	40 Laporan	28 Laporan	Kegiatan berjalan dengan lancar karena bentuk pelayanan terhadap individu atau kelompok yang ingin menyampaikan aspirasi dalam bentuk unjuk rasa dengan tim satpol pp yang terlibat sebagai pengamanan	tim yang terlibat dapat bekerja secara maksimal	tidak terdapat rekomendasi dari DPRD
				Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	90 %	80 %	Kegiatan berjalan dengan maksimal tanpa ada kendala yang berarti	SDM yang terlibat bekerja secara maksimal terhadap capaian realisasi sub kegiatan	tidak terdapat rekomendasi dari DPRD
				Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2 Laporan	9 Laporan	Sub kegiatan berjalan dengan maksimal tanpa adanya kendala yang berarti	SDM yang terlibat memberikan performa kinerja yang terbaik terhadap capaian realisasi	tidak dapat rekomendasi dari DPRD
				Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	12 Laporan	12 Laporan	Sub kegiatan tercapai dikarenakan tim yang terlibat khususnya dilapangan bekerja secara maksimal	SDM yang terlibat memberikan performa kinerja terbaik	tidak ada rekomendasi dari DPRD
				Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	1 Laporan	Sub kegiatan dapat tercapai dengan bukti realisasi terhadap kendaraan operasional opd	SDM yang terlibat bekerja secara maksimal terutama pemenuhan kelengkapan administrasi	tidak terdapat rekomendasi dari DPRD
				Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Pembentukan Sekretariat PPNS	1 Dokumen	1 Dokumen	Tidak terdapat permasalahan yang berarti dalam pembentukan sekretariat PPNS	SDM yang bekerja telah optimal	tidak terdapat rekomendasi lebih lanjut oleh DPRD
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	175 indeks	137,43 indeks	-	-	-
				Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 jenis	1 jenis	-	-	-
				Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	135 Orang	135 Orang	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	4 jenis	1 jenis	-	-	-	
				Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	36 Orang	36 Orang	-	-	-	
				Penyusunan Rencana Kontijensi	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	-	
				Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	420 Orang	420 Orang	-	-	-	
				Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	4 Kawasan	4 Kawasan	-	-	-	
				Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2 jenis	0 jenis	-	-	-	
				Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	50 Orang	15 Orang	-	-	-	
				Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	500 Orang	180 Orang	-	-	-	
				Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1 jenis	0 jenis	-	-	-	
				Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	15 Dokumen	15 Dokumen	-	-	-	
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	90 %	90 %	Program berjalan dengan lancar karena bagian pemenuhan dan pelayanan terhadap masyarakat berupa pencegahan dan penanganan terhadap kejadian kebakaran serta evakuasi non kebakaran	tim yang bekerja memberikan performa kinerja terbaik	tidak terdapat rekomendasi dari DPRD
					Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	80 %	20 %	Kegiatan dapat berjalan dengan maksimal karena bentuk pelayanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pencegahan dan penanganan kebakaran serta evakuasi non kebakaran	SDM yang bekerja memberikan performa terbaik	tidak terdapat rekomendasi dari DPRD
					Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	20 Dokumen	20 Dokumen	Sub kegiatan berjalan dengan baik sebagai bentuk pemenuhan masyarakat terhadap sosialisasi kebakaran	SDM yang bekerja secara maksimal dan memberikan kinerja terbaik	Tidak terdapat rekomendasi dari DPRD
					Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	36 Laporan	36 Laporan	Sub kegiatan berjalan dengan lancar karena bentuk pemenuhan dan pelayanan kepada masyarakat terhadap kejadian kebakaran dan evakuasi non kebakaran	SDM yang bekerja secara baik, merespon aduan call centre 112, dan memberikan performa kinerja terbaik	tidak terdapat rekomendasi dari DPRD
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 02 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 04 Tahun 2015 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	86 %	Tidak ada pemasalan	Tidak ada Upaya permasalahan	nihil	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	Tidak ada permasalahan	Tidak ada Upaya permasalahan	nihil	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	Laporan evaluasi kinerja telah sesuai dengan permintaan laporan yang diminta	laporan evaluasi kinerja sudah diselesaikan	nihil	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	Tidak ada permasalahan	Tidak ada Upaya mengatasi permasalahan	nihil	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/bulan	43 Orang/bulan	Tidak ada permasalahan	Tidak ada Upaya mengatasi permasalahan	nihil	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Tidak ada permasalahan	Tidak ada Upaya mengatasi permasalahan	nihil	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20 Paket	19 Paket	Tidak ada permasalahan	Tidak ada Upaya mengatasi permasalahan	nihil	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Paket	25 Paket	Tidak ada permasalahan	Tidak ada Upaya mengatasi permasalahan	nihil	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20 Paket	62 Paket	Tidak ada permasalahan	Tidak ada Upaya mengatasi permasalahan	nihil	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10 Paket	23 Paket	Tidak ada permasalahan	Tidak ada Upaya mengatasi permasalahan	nihil	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Dokumen	1 Dokumen	Tidak ada permasalahan	Tidak ada Upaya mengatasi permasalahan	nihil	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD telah sesuai dengan permintaan laporan yang diminta	laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sudah diselesaikan	nihil	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15 Unit	15 Unit	Tidak ada permasalahan	Tidak ada Upaya mengatasi permasalahan	nihil
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15 Unit	15 Unit	Tidak ada permasalahan	Tidak ada Upaya mengatasi permasalahan	nihil
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	1 Laporan	Tidak ada permasalahan	Tidak ada Upaya mengatasi permasalahan	nihil
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	1 Laporan	Tidak ada permasalahan	Tidak ada Upaya mengatasi permasalahan	nihil
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Tidak ada permasalahan	Tidak ada Upaya mengatasi permasalahan	nihil
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4 Unit	4 Unit	Tidak ada permasalahan	Tidak ada Upaya mengatasi permasalahan	nihil
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20 Unit	20 Unit	Tidak ada permasalahan	Tidak ada Upaya mengatasi permasalahan	nihil
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 Unit	4 Unit	Tidak ada permasalahan	Tidak ada Upaya mengatasi permasalahan	nihil
				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	4 %	4 %	Masih adanya PSKS yang belum terakreditasi	Melaksanakan kegiatan akreditasi untuk PPKS yang masih belum terakreditasi	nihil
				Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	76 %	44,18 %	Masih adanya PSKS yang belum terakreditasi	Melaksanakan kegiatan akreditasi untuk PPKS yang masih belum terakreditasi	nihil
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	39 Keluarga	27 Keluarga	Kegiatan masih terpusat pada bantuan perintis veteran yang tahun bisa berubah sedangkan PSKS bisa karang taruna, relawan sosial, dll	memberikan tambahan anggaran agar dapatnya PSKS dapat terakomodir semua	nihil
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2 %	15,65 %	masih belum terakomodirnya bantuan kepada PPKS yang ada di kabupaten sumenep	Menambah anggaran cakupan pps yang dibantu dapat maksimal	nihil
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1 %	0,02 %	masih belum tercover semua PPKS yang di bantu khususnya penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Menambah anggaran cakupan pps yang dibantu dapat maksimal	nihil
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	200 Orang	150 Orang	adanya pengurangan anggaran dari tahun sebelumnya sehingga yang di bantu mengalami penurunan	Penambahan anggaran untuk tahun berikutnya	nihil
				Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	318 Orang	318 Orang	yang di bantu hanya 318 orang sedangkan yang membutuhkan bantuan lebih dari anggaran yang ada	penambahan anggaran di tahun berikutnya	nihil
				Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1 %	0,2 %	banyak PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang belum menerima rehabilitasi sosial karena kurangnya anggaran yang ada.	menambah anggaran untuk melakukan kegiatan rehab sosial yang ada	nihil
				Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	127 Orang	118 Orang	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA masih belum tercover semua karena keterbatasan anggaran yang ada	menambah anggaran untuk melakukan kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) agar pelaksanaan lebih maksimal	nihil
				Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	400 Orang	470 Orang	diperlukan penambahan kegiatan lain yang mengakomodir Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar dikarenakan masih banyak PMKS yang belum tercover khususnya bantuan beasiswa dan PKH	tambahan anggaran untuk tahun berikutnya	nihil
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	85 %	57,26 %	kurangnya anggaran di dalam pemberian bantuan kepada KPM	penambahan anggaran untuk tahun berikutnya	nihil
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	88 %	31 %	banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum menerima Bantuan karena kurangnya anggaran yang ada	penambahan anggaran di tahun berikutnya	Nihil

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	10000 Keluarga	6300 Keluarga	banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga, yang di bantu 6300 orang sedangkan yang membutuhkan bantuan lebih dari anggaran yang ada	penambahan anggaran di tahun berikutnya	Nihil
				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	100 %	98,93 %	masih belum tercover semua Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial yang di bantu	Menambah anggaran cakupan Penanganan Korban Bencana agar yang dibantu dapat maksimal	NIHIL
				Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	100 %	98,93 %	Menambah anggaran cakupan Korban Bencana alam dan sosial agar yang dibantu dapat maksimal	Menambah anggaran cakupan Korban Bencana agar yang dibantu dapat maksimal	NIHIL
				Penyediaan Makanan	200 Orang	250 Orang	yang di bantu 250 orang sedangkan yang membutuhkan bantuan 200 orang, lebih dari Kegiatan melebihi target, namun hal tersebut masih belum bisa membantu PPKS yang ada di Kabupaten Sumenep	perlu adanya Penambahan Anggaran	Nihil
				PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	100 %	100 %	luas lingkup pengelolaan taman makam pahlawan cukup luas sehingga diperlukan anggaran yang sesuai guna keasrian taman makam pahlawan.	perlu adanya dukungan dana yang cukup dan diharapkan ada penambahan anggaran di tahun berikutnya	nihil
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	100 %	100 %	luas lingkup pengelolaan taman makam pahlawan cukup luas sehingga diperlukan anggaran yang sesuai guna keasrian taman makam pahlawan.	diperlukan penambahan anggaran di tahun berikutnya	nihil
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	38 Makam	38 Makam	luas lingkup pengelolaan taman makam pahlawan cukup luas sehingga diperlukan anggaran yang sesuai guna keasrian taman makam pahlawan.	diperlukan penambahan anggaran di tahun berikutnya	nihil
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	DINAS KETENAGAKERJAAN	1. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional; Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja; Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan; 2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja; Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan; 3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja; Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	100 %	Pada kegiatan dan sub kegiatan rutin bersifat penyediaan sesuai dengan kebutuhan anggaran yang direncanakan	Dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan anggaran pada masing-masing sub kegiatan setiap tahunnya	Nihil
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	Gaji dan Tunjangan ASN di sediakan	Penyediaan gaji dan tunjangan penyesuaian, anggaran merupakan kewenangan TAPD sesuai dengan jumlah kebutuhan ASN dan PPPK	Nihil
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	71 Orang/bulan	28 Orang/bulan	Gaji dan Tunjangan ASN di sediakan	Penyediaan gaji dan tunjangan penyesuaian, anggaran merupakan kewenangan TAPD sesuai dengan jumlah kebutuhan ASN dan PPPK	Nihil
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	50 Unit	50 Unit	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan telah sesuai	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan telah sesuai	Nihil
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Paket	12 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan telah sesuai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan telah sesuai	Nihil
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Paket	12 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan telah sesuai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan telah sesuai	Nihil
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5 Paket	5 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan telah sesuai	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan telah sesuai	Nihil
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	131 Laporan	111 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD telah sesuai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD telah sesuai	NIHIL

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 jenis	6 jenis	Pada sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya listrik pada Belanja Listrik dan jaringan internet disediakan setiap tahunnya	Belanja listrik dan internet tetap disesuaikan dengan tagihan bulanan terhadap belanja tersebut	Nihil
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	Belanja Listrik dan jaringan internet disediakan setiap tahunnya	Belanja listrik dan internet tetap disesuaikan dengan tagihan bulanan terhadap belanja tersebut	Nihil
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Telah sesuai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan telah sesuai	Nihil
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Unit	3 Unit	Peningkatan Masa Umur Pemakaian Barang Milik Daerah telah sesuai	Peningkatan Masa Umur Pemakaian Barang Milik Daerah telah sesuai	Nihil
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8 Unit	8 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya telah sesuai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya telah sesuai	Nihil
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28 Unit	28 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara telah sesuai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara telah sesuai	Nihil
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	2 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi telah sesuai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi telah sesuai	Nihil
				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	0,26 %	0,22 %	Dengan disahkannya Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumenep Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Upah Tenaga Kerja dan Bahan untuk Tahun Anggaran 2025 berdampak kepada berkurangnya jam pelatihan yang diberikan kepada peserta pelatihan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya penyampaian materi yang diberikan narasumber atau Instruktur Pelatihan.	Menambah jenis pelatihan yang sudah disesuaikan dengan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumenep Nomor 14 Tahun 2024	Nihil
				Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	93 Orang	116 Orang	Dengan disahkannya Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumenep Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Upah Tenaga Kerja dan Bahan untuk Tahun Anggaran 2025 berdampak kepada berkurangnya jam pelatihan yang diberikan kepada peserta pelatihan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya penyampaian materi yang diberikan narasumber atau Instruktur Pelatihan.	Menambah jenis pelatihan yang sudah disesuaikan dengan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumenep Nomor 14 Tahun 2024	Nihil

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	93 Orang	116 Orang	Dengan disahkannya Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumenep Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Upah Tenaga Kerja dan Bahan untuk Tahun Anggaran 2025 berdampak kepada berkurangnya jam pelatihan yang diberikan kepada peserta pelatihan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya penyampaian materi yang diberikan narasumber atau Instruktur Pelatihan.	Menambah jenis pelatihan yang sudah disesuaikan dengan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumenep Nomor 14 Tahun 2024	Nihil
				Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	44 Lembaga	44 Lembaga	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja yang bersertifikasi telah sesuai	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja yang bersertifikasi telah sesuai	Nihil
				Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	44 Lembaga	44 Lembaga	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina telah sesuai	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina telah sesuai	Nihil
				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	44 %	43,18 %	Anggaran di gunakan dalam rangka movev kegiatan BK Khusus Desa (AP)	Anggaran selanjutnya akan dilakukan rasionalisasi pada beberapa sub belanja sesuai kebutuhan Movev	Nihil
				Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	44 %	42,21 %	Anggaran di gunakan dalam rangka movev kegiatan BK Khusus Desa (AP)	Anggaran selanjutnya akan dilakukan rasionalisasi pada beberapa sub belanja sesuai kebutuhan Movev	Nihil
				Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	20 Orang	20 Orang	Anggaran di gunakan dalam rangka movev kegiatan BK Khusus Desa (AP)	Anggaran selanjutnya akan dilakukan rasionalisasi pada beberapa sub belanja sesuai kebutuhan Movev	Nihil
				Perluasan Kesempatan Kerja	510 Orang	510 Orang	Anggaran di gunakan dalam rangka movev kegiatan BK Khusus Desa (AP)	Anggaran selanjutnya akan dilakukan rasionalisasi pada beberapa sub belanja sesuai kebutuhan Movev	Nihil
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 02 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 04 Tahun 2015 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1 %	0,37 %	Masih banyaknya OPD yang belum mengirimkan data gender dim program dan kegiatan yang dilaksanakan sehingga ketersediaan data terkait data gender mengalami kendala	Menganggarkan bintek PUG pada tahun depan dan melakukan jempot bola terhadap OPD yang bersangkutan.	nihil
				Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	20,5 %	2,75 %	Masih banyaknya OPD yang belum mengirimkan data gender dim program dan kegiatan yang dilaksanakan sehingga ketersediaan data terkait data gender mengalami kendala	Menganggarkan bintek PUG pada tahun depan dan melakukan jempot bola terhadap OPD yang bersangkutan	nihil
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	51 Perangkat Daerah	27 Perangkat Daerah	banyak Perangkat Daerah yang belum Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) karena kurangnya anggaran yang ada	menambah anggaran untuk melakukan kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan PUG yang ada	nihil
				Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	75 %	88 %	Masih belum banyaknya perempuan yang menjadi mitra kerja aktif laki-laki dalam mengatasi masalah-masalah sosial, ekonomi dan politik. Hal ini dibuktikan oleh masih sedikitnya perempuan yang menjadi wakil rakyat di DPRD.	Diperlukan adanya sosialisasi terkait dengan pemberdayaan perempuan kepada masyarakat di seluruh wilayah kabupaten sumenep	nihil

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	3 Organisasi	6 Organisasi	Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi sudah dilakukan secara maksimal namun masih belum optimal	Menambah anggaran agar pelaksanaannya lebih optimal	nihil
				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	3,39 %	2 %	masih belum tercover semua Penanganan Korban Kekerasan Perempuan Termasuk TPPO yang di bantu	Menambah anggaran cakupan Penanganan Korban Kekerasan Perempuan Termasuk TPPO agar yang dibantu dapat maksimal	nihil
				Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2,54 %	2,75 %	masih belum tercover semua Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan yang di bantu	Menambah anggaran cakupan Penanganan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan agar yang dibantu dapat maksimal	nihil
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Laporan Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan telah sesuai dengan permintaan laporan yang diminta	laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi sudah diselesaikan	nihil
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	banyak Perangkat Daerah yang belum mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan karena kurangnya anggaran yang ada	menambah anggaran untuk melakukan kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan yang ada	nihil
				Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Lembaga Rujukan	1 Lembaga Rujukan	masih banyak Korban Kekerasan yang belum mendapatkan fasilitas Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan karena kurangnya anggaran yang ada	menambah anggaran untuk melakukan kegiatan fasilitas Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan korban kekerasan yang ada	nihil
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Layanan	1 Layanan	Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan telah sesuai dengan target	jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan sudah terpenuhi	nihil
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Lembaga	1 Lembaga	jumlah Lembaga Penyediaan Layanan Penguatan dan Pengembangan Perlindungan Perempuan telah terpenuhi sesuai target	Lembaga Penyediaan Layanan Penguatan dan Pengembangan Perlindungan Perempuan sudah terpenuhi	nihil
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	80 Orang	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan sudah dilakukan secara maksimal namun masih belum optimal	Menambah anggaran agar pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan lebih optimal	nihil
				Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	22 Orang	masih belum tercover semua Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Menambah anggaran cakupan Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus agar yang dibantu dapat maksimal	nihil
				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	0,0052 %	0,001 %	Belum tingginya Kesadaran masyarakat akan perlunya melakukan pelaporan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan semakin meningkat.	Diperlukan adanya sosialisasi dan advokasi kepada masyarakat secara luas dengan menambah anggaran yang ada agar kesadaran masyarakat lebih meningkat	nihil

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	jumlah kasus KDRT yang tertangani selama tahun ini lebih meningkat daripada tahun sebelumnya	diperlukan adanya sosialisasi dan penanganan yang intensif agar dapat menurunkan tingkat KDRT dalam masyarakat	nihil
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	51 Perangkat Daerah	27 Perangkat Daerah	-	-	-
				Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Laporan Hasil Dokumen Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga sudah memenuhi target	laporan Hasil Dokumen Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga sudah diselesaikan	nihil
				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	madya Strata	madya Strata	Tidak ada permasalahan	Tidak ada Upaya mengatasi permasalahan	NIHIL
				Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	22,15 %	22 %	masih belum tercover semua Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Desa layak anak yang di bantu	Menambah anggaran cakupan Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha agar yang dibantu dapat maksimal	nihil
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Organisasi	20 Organisasi	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha sudah terpenuhi dan memenuhi Target	jumlah Organisasi Pemerintahan yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan sudah terpenuhi	nihil
				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	100 %	98 %	Masih belum tercover semua anak korban kekerasan yang tertangani secara komprehensif	Menambah anggaran cakupan Penanganan anak korban kekerasan agar yang dibantu dapat maksimal	NIHIL
				Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	6,01 %	6,01 %	Penanganan bantuan kepada anak korban Kekerasan sudah dilakukan secara maksimal namun masih belum optimal	Menambah anggaran untuk membantu para anak korban Kekerasan agar lebih maksimal	NIHIL
				Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	3 Orang	27 Orang	Masih banyak SDM yang belum memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA karena kurangnya anggaran yang ada	menambah anggaran untuk melakukan kegiatan Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	nihil
				Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	66,66 %	100 %	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus belum terlaksana secara maksimal karena kurangnya anggaran yang ada	Menambah anggaran untuk menambah jenis layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus agar lebih maksimal	nihil
				Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	20 Orang	20 Orang	jumlah AMPK yang mendapatkan layanan sudah dilakukan secara maksimal namun masih belum optimal	Menambah anggaran untuk menambah AMPK mendapatkan layanan lebih maksimal	nihil
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3 Lembaga	3 Lembaga	Jumlah Lembaga Penyediaan Layanan Perlindungan khusus anak yang terstandarisasi sudah memenuhi target	Lembaga Penyediaan Layanan Perlindungan khusus anak yang terstandarisasi sudah terpenuhi	nihil
				Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	1 Orang	1 Orang	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK sudyang ah memenuhi target	SDM yang mendapatkan layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK sudah terpenuhi	nihil
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	1. Keputusan Menteri Pertanian No. 297/KPTS/OT. 050/M/07/2024 tentang Satuan Tugas Antisipasi Darurat Pangan; 2. Intruksi Menteri Pertanian No. 1 Tahun 2024 Tentang Percepatan Tanam Dan peningkatan Produksi Padi	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	100 %	100 %	Tidak ada kendala	Penghitungan presentase ketersediaan pangan dilaksanakan di akhir tahun karena memerlukan data produksi selama 1 tahun	Tidak ada rekomendasi dari DPRD
				Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	4 unit	4 unit	Tidak ada kendala teknis di lapangan	Proses pengajuan pencairan tahap kedua	Tidak ada rekomendasi dari DPRD

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	4 Unit	4 Unit	Tidak ada kendala pelaksanaan pembangunan fisik lumbung pangan. Perkembangan fisik dilapangan hampir mencapai 100%	Memproses pengajuan pencairan tahap kedua	Tidak ada rekomendasi DPRD
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	2 Laporan	2 Laporan	Tidak ada kendala	Penyusunan laporan menunggu hasil monitoring pembangunan infrastruktur logistik (lumbung pangan dll) serta pemantauan pengelolaan infrastruktur logistik yang sudah dibangun	Tidak ada rekomendasi DPRD
				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	73,51 skor	73,53 skor	Tidak ada kendala	Penghitungan skor PPH ketersediaan dalam proses pengumpulan data dan koordinasi dengan OPD terkait	Tidak ada rekomendasi dari DPRD
				Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	12 dokumen	12 dokumen	Tidak ada kendala penyusunan laporan pemantauan penyaluran pangan	Dilakukan tertib administrasi dalam pengumpulan data untuk penyusunan laporan	Tidak ada rekomendasi dari DPRD
				Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	1 Laporan	Tidak ada kendala	Proses persiapan administrasi pelatihan pangan lokal	Tidak ada rekomendasi dari DPRD
				Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	3 Unit	3 Unit	Tidak ada kendala	Dilakukan monitoring kelembagaan pangan secara intensif	Tidak ada rekomendasi DPRD
				Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	1900 kkal/kapita/tahun	1900 kkal/kapita/tahun	Tidak ada permasalahan	Penghitungan angka kecukupan gizi dilakukan diTW 4.	Tidak ada rekomendasi dari DPRD
				Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	Tidak ada kendala	Telah dilaksanakan Lomba AKU HATINYA PKK, yaitu lomba pemanfaatan pekarangan untuk PKK Desa/Kecamatan. Dan persiapan data untuk penghitungan Angka Kecukupan Gizi	Tidak ada rekomendasi DPRD
				PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	100 %	100 %	Belum adanya regulasi teknis untuk mendukung penanganan rawan pangan	Perbup CPPD untuk penanganan rawan pangan dalam proses perumusan	Tidak ada rekomendasi DPRD
				Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	1 dokumen	1 dokumen	Tidak ada kendala	Proses penyusunan pemutakhiran peta ketahanan dan kerentanan pangan	Tidak ada rekomendasi DPRD
				Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	Tidak ada kendala	Penyusunan dilakukan di akhir tahun anggaran. Proses koordinasi dengan OPD terkait dalam rangka pengumpulan data	Tidak ada rekomendasi DPRD
				PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	90 %	90 %	Tidak ada kendala permasalahan	Persiapan monitoring pengumpulan data keamanan pangan segar asal tumbuhan	Tidak ada rekomendasi DPRD
				Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	2 dokumen	2 dokumen	Tidak ada kendala	Pelaksanaan pengadaan peralatan uji keamanan pangan segar asal tumbuhan	Tidak ada rekomendasi DPRD
				Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Tidak ada kendala	Proses pengadaan alat Rapid Test untuk uji keamanan pangan segar asal tumbuhan dan pengambilan sampel uji bahan pangan asal tumbuhan segar	Tidak ada rekomendasi DPRD
				Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokuman	1 Dokuman	Tidak ada permasalahan	Telah dilaksanakan sosialisasi keamanan pangan bagi kelembagaan pangan	Tidak ada rekomendasi DPRD
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1. Perda Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Kota Sumenep Tahun 2014-2034	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	100 %	100 %	-	-	-
				Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	92 %	85 %	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
				PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	50 %	45 %	-	-	-
				Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah; 2. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 83 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Sumenep dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	85 %	-	-	-
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	0 dokumen	-	-	-
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1 Laporan	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 laporan	1 laporan	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	115 Orang/bulan	96 Orang/bulan	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0 Laporan	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD	12 Laporan	3 Laporan	-	-	-
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1 laporan	1 laporan	-	-	-
				Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	50 Dokumen	50 Dokumen	-	-	-
				Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10 Orang	0 Orang	-	-	-
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	100 Orang	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 jenis	100 jenis	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 Paket	10 Paket	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Paket	10 Paket	-	-	-
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	0 Paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10 Paket	8 Paket	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10 Paket	10 Paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15 Dokumen	15 Dokumen	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 %	0 %	-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 Unit	10 Unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 %	90 %	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 Laporan	36 Laporan	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 %	90 %	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20 Unit	20 Unit	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 Unit	10 Unit	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10 Unit	10 Unit	-	-	-
				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	79,2 %	76 %	-	-	-
				Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	85,95 %	85 %	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	36 Dokumen	36 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	400 Dokumen	400 Dokumen	-	-	-
				Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	50 %	50 %	-	-	-
				Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	-	-	-
				Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2 Lokasi	2 Lokasi	-	-	-
				Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	10 Titik	10 Titik	-	-	-
				Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	73,6 %	70 %	-	-	-
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	10 Dokumen	10 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	50 Kegiatan	50 Kegiatan	-	-	-
				PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	58,3 %	56 %	-	-	-
				Penyimpanan sementara Limbah B3	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
				Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-
				Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	10 Laporan	10 Laporan	-	-	-
				Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
				Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-
				PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	20 kader	20 kader	-	-	-
				Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	96,99 %	90 %	-	-	-
				Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	35 Dokumen	15 Dokumen	-	-	-
				Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	10 Orang	10 Orang	-	-	-
				Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	57 Lembaga	57 Lembaga	-	-	-
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 15 Tahun 2023 tentang Layanan Jemput Bola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sumenep	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	100 %
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 dokumen	12 dokumen	-				-	-	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	-				-	-	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-				-	-	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-				-	-	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	-				-	-	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	-				-	-	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	42 Orang/bulan	Realisasi kinerja pada Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tidak terdapat permasalahan, terkait realisasi kinerja tidak sesuai dengan target kinerja karena disesuaikan dengan kondisi realisasi ASN yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep.	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3 jenis	3 jenis	-	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100 Paket	100 Paket	-	-	-
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10 Orang	2 Orang	Realisasi kinerja pada Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi tidak terdapat permasalahan, terkait realisasi kinerja tidak sesuai dengan target kinerja karena yang mengikuti Diklat Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sebanyak 2 orang dari target 10 orang disesuaikan dengan kondisi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep yang tidak mempunyai Pejabat Pembuat Komitmen.	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Macam	7 Macam	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 Paket	2 Paket	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Paket	10 Paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10 Paket	10 Paket	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3 Paket	3 Paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50000 Dokumen	50000 Dokumen	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21 unit	21 unit	-	-	-
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Unit	2 Unit	-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47 Unit	47 Unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Layanan	3 Layanan	-	-	-
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92 unit	92 unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit	2 Unit	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50 Unit	50 Unit	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5 Unit	5 Unit	-	-	-
				PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	81 %	81 %	-	-	-
				Pelayanan Pendaftaran Penduduk	63000 dokumen	63000 dokumen	-	-	-
				Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	45000 Dokumen	45000 Dokumen	-	-	-
				Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penataan Pendaftaran Penduduk	1 buah	1 buah	-	-	-
				Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	20000 Dokumen	20000 Dokumen	-	-	-
				Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	12 kali 95 %	12 kali	-	-	-
				Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	10000 Dokumen	10000 Dokumen	-	-	-
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	95 %	95 %	-	-	-
				Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	2 Laporan	2 Laporan	-	-	-
				PROGRAM PENCATATAN SIPIL	90 %	90 %	-	-	-
				Pelayanan Pencatatan Sipil	2 buah	2 buah	-	-	-
				Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	20 Paket	20 Paket	-	-	-
				Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	12 kali 95 %	12 kali	-	-	-
				Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	76 %	76 %	-	-	-
				Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 buah	1 buah	-	-	-
				Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	5 Dokumen	5 Dokumen	-	-	-
				Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
				Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
				PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	100 %	100 %	-	-	-
				Penyusunan Profil Kependudukan	400 dokumen	400 dokumen	-	-	-
				Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	400 Dokumen	400 Dokumen	-	-	-
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	94,28 %	Keberhasilan program penunjang urusan pemerintah daerah sangat bergantung pada alokasi anggaran, manajemen aset, dan pemanfaatan teknologi. Pada Tahun 2024 kebutuhan sarana dan prasarana kantor di targetkan 100% dengan realisasi sebesar 94,28% sehingga capaian kerjanya sebesar 94,8% , dengan kesimpulan jika indikator persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor menunjukkan angka tinggi, maka program dapat dikatakan berhasil. Hal ini sesuai dengan capaian kinerja yang diperoleh yaitu sebesar 94,28%	1. Optimalisasi Anggaran dan pengelolaan Keuangan 2. Peningkatan efisiensi Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana 3. Distribusi sarana yang lebih merata 4. Evaluasi dan Pengawasan berkala	-
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	terpenuhinya target pada indikator ini didukung oleh ketersediaan dokumen perencanaan serta evaluasi yang dilakukan secara berkala	1. Penguatan perencanaan berbasis data dan partisipatif 2. Optimalisasi monitoring dan evaluasi secara berkala	-
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Terpenuhinya target pada indikator ini didukung oleh ketersediaan dokumen kepegawaian serta dokumen penyusunan laporan keuangan	1. Peningkatan Kapasitas OPD dalam mengelola Anggaran 2. Optimalisasi monitoring dan evaluasi secara berkala	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25 %	-	-	-	-
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10 Orang	0 Orang	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Terpenuhinya target pada indikator ini didukung oleh ketersediaan kebutuhan penyediaan sarana dan prasana yang ada	Identifikasi terhadap kebutuhan sarana dan prasana	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Paket	3 Paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8 Paket	8 Paket	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	2 Paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	43 Laporan	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6 Jenis	6 Jenis	Terpenuhinya Target indikator ini diperoleh dari kesesuaian kebutuhan sarana yang dibutuhkan pada tahun ini	Inventarisasi data aset secara berkala	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9 Unit	9 Unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Terpenuhinya Target indikator ini diperoleh dari ketersediaan anggaran untuk jasa layanan Arsip	-	-
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24 Laporan	24 Laporan	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Terpenuhinya Target indikator ini diperoleh dari ketersediaan anggaran untuk pemeliharaan barang milik daerah	Identifikasi terhadap kebutuhan sarana dan prasana yang akan dipelihara	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	54 Unit	36 Unit	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20 Unit	20 Unit	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				PROGRAM PENATAAN DESA	13,58 %	10,56 %	<p>Program penataan desa merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan desa agar lebih efektif, efisien, dan transparan. Keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik melalui program ini dapat diukur menggunakan indikator persentase desa yang difasilitasi dalam penataan desa Pada Tahun 2024 ditargetkan sebesar 13,58% dengan capaian realisasi sebesar 10,56% sehingga capaiannya kinerjanya sebesar 77,76%, tidak tercapainya target tersebut disebabkan : 1. Adanya keterbatasan anggaran, sumber daya manusia yang tidak memadai, atau kurangnya kesadaran desa terhadap pentingnya program ini 2. Banyak desa masih mengalami kendala dalam hal kapasitas aparat desa yang kurang memahami tata kelola pemerintahan yang baik. Serta kurangnya pelatihan dan pendampingan bagi aparat desa menyebabkan implementasi program tidak berjalan optimal</p>	1. Meningkatkan cakupan fasilitasi penataan desa, sehingga lebih banyak desa yang mendapatkan pendampingan dalam tata kelola pemerintahan. 2. Memperkuat kapasitas pemerintah desa melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan.	
				Penyelenggaraan Penataan Desa	330 Desa	244 Desa	<p>Penyelenggaraan penataan desa merupakan bagian dari upaya pembangunan desa yang berfokus pada peningkatan infrastruktur dan kualitas hidup masyarakat desa, Pada Tahun 2024 di targetkan sebanyak 330 Desa yang Difasilitasi dalam Sarana dan Prasarana Desa dengan realisasi sebanyak 244 Desa sehingga capaian kinerjanya sebesar 73,94%. Tidak terpenuhinya target tersebut dikarenakan : 1. Distribusi Tidak Merata: Beberapa desa mungkin mendapatkan fasilitas lebih banyak dibandingkan desa lain yang lebih membutuhkan 2. Tidak Sesuai Kebutuhan: Jika sarana dan prasarana yang disediakan tidak sesuai dengan kebutuhan desa, maka manfaatnya menjadi minim.</p>	1. Peningkatan Transparansi dan Pengawasan dalam penggunaan anggaran pembangunan desa. 2. Evaluasi Berkala untuk memastikan program berjalan sesuai target dan memberikan manfaat nyata bagi desa 3. Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa agar lebih efektif dalam mengelola dan mengembangkan sarana-prasarana yang telah dibangun	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	88 Unit	87 Unit	Terlaksananya Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa yang dikelola oleh DPMD (BK Desa DPMD) Pada Tahun 2024 di Targetkan sebesar 88 Unit BKK Desa desa realisasi sebesar 87 Unit sehingga capaiannya sebesar 98,86 % Tidak tercapainya target tersebut dikarenakan ada 1 desa yang pemberian BK nya tidak dilaksanakan dikarenakan tidak memenuhi syarat, seperti pembangunan balai desa bukan di tanah kas desa	Monitoring dan Evaluasi terhadap penerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK Desa yang dikelola oleh DPMD)	
				PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	7,27 % 93,55 %	13,41 % 74,19 %	Pada tahun 2024, BUMDes terbentuk sebanyak 328 BUMDes, berdasarkan Input Desa pada aplikasi Data Desa center (DDC) diperoleh data bahwa BUMDesa Maju sebanyak 44 Bumdes, BUDES Berkembang sebanyak 214 BUMDes, BUMDes Pemula sebanyak 37 BUMDes dan belum Input sebanyak 33 BUMDes. Keberhasilan Indikator Sasaran Strategis melalui Program Peningkatan Kerjasama Desa dengan indikator Persentase Desa Maju dikarenakan : 1. adanya Penguatan Kapasitas Manajerial BUMDes melalui Pelatihan pengelolaan bisnis, keuangan, dan pemasaran bagi pengurus BUMDes serta pendampingan oleh tenaga ahli untuk meningkatkan daya saing usaha desa 2. Adanya Optimalisasi Dana Desa untuk penguatan modal BUMDes dan kemitraan dengan pihak ketiga 3. Adanya Pengembangan berbagai unit usaha berbasis potensi lokal (pariwisata, pertanian, perdagangan, dll) 4. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan usaha desa serta dukungan dari pemerintah desa dan stakeholder dalam pengembangan BUMDes. Program peningkatan kerja sama desa bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa melalui kolaborasi antar desa, salah satunya dengan membentuk Badan Usaha Miiik Desa (BUMDes) Bersama.	1. Peningkatan pelatihan dan pendampingan bagi pengelola BUMDes 2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi dan digitalisasi pemasaran produk desa 3. Monitoring dan Evaluasi secara berkala baik melalui pemerintah daerah maupun pemerintah desa 1. Peningkatan sosialisasi dan edukasi melalui pelatihan intensif tentang manfaat dan pengelolaan BUMDes Bersama serta Melibatkan tokoh masyarakat dan pemimpin desa untuk meningkatkan kesadaran. 2. Penyediaan insentif dan kemudahan akses modal melalui pemberian dana stimulus bagi desa yang ingin membentuk BUMDes Bersama dan Menyediakan akses perbankan atau pinjaman lunak untuk mendukung operasional awal. 3. Pendampingan dan penguatan kapasitas SDM melalui Mengadakan pelatihan manajemen usaha dan kerja sama ekonomi antar desa dan Meningkatkan peran pendamping desa dalam membantu proses pembentukan BUMDes Bersama.	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	31 BUMDESMA 24 BUMDES	23 BUMDESMA 44 BUMDES	Pada Tahun 2024 target yang akan dicapai Jumlah BUMDes Ma terbentuk sebanyak 31 BUMDes Ma, Akan tetapi baru terealisasi sebanyak 23 BUMDes sehingga capaian kinerjanya sebesar 74,19%. ada Tahun 2024 target yang akan dicapai BUMDes Maju sebanyak 24 BUMDes dengan realisasi sebanyak 44 BUMDes sehingga capaian kinerjanya sebesar 183,33%. Keberhasilan ini ditunjang dengan adanya Pelatihan dan Pendampingan serta monitoring dan evaluasi secara berkala baik dari Pemerintah Daerah maupun dari Pemerintah Desa	Pendampingan dan penguatan kapasitas SDM melalui Mengadakan pelatihan manajemen usaha dan kerja sama ekonomi antar desa dan Meningkatkan peran pendamping desa dalam membantu proses pembentukan BUMDes Bersama. 1. Peningkatan pelatihan dan pendampingan bagi pengelola BUMDes 2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi dan digitalisasi pemasaran produk desa 3. Monitoring dan Evaluasi secara berkala baik melalui pemerintah daerah maupun pemerintah desa	
				Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	Terlaksananya Pelatihan dan Pendampingan bagi BUMDes dalam pengembangan unit usaha BUMDes	1. Monitoring dan Evaluasi berkala terhadap BUMDes 2. Memfasilitasi BUMDes yang mengembangkan unit usahanya	
				Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	2 Dokumen	2 Dokumen	Terlaksananya Pelatihan dan Pendampingan bagi BUMDes Ma serta memfasilitasi terhad desa yang akan melakukan kerjasama Desa antar dalam pembentukan BUMDes Ma Kawasan	1. Monitoring dan Evaluasi berkala terhadap BUMDes Ma 2. Memfasilitasi BUMDes Ma yang mengembangkan unit usahanya	
				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	50,87 %	51,59 %	Tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat desa. Keberhasilan administrasi desa dapat diukur melalui berbagai indikator, salah satunya adalah persentase desa yang melaksanakan tertib administrasi. Tertib administrasi mencakup pencatatan data kependudukan, keuangan, perencanaan pembangunan, pelaporan, dan pengarsipan secara sistematis sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun faktor keberhasilan dari program ini adalah : 1. Ketersediaan perangkat desa yang memahami sistem administrasi 2. Ketersediaan sistem informasi desa untuk pencatatan dan pelaporan 3. Pelatihan bagi aparatur desa dalam administrasi pemerintahan 4. Publikasi laporan keuangan dan kegiatan desa secara terbuka 5. Penggunaan teknologi dalam pengelolaan data desa. Pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 50,87 % (168 Desa) dengan realisasi sebesar 51,59% (51,59%) sehingga capaian kinerjanya 101,42 %	1. Meningkatkan Pelatihan dan Kapasitas SDM bagi aparatur desa dalam bidang administrasi. 2. Mempercepat Digitalisasi Administrasi Desa dengan penggunaan aplikasi administrasi desa. 3. Meningkatkan Pengawasan dan Evaluasi Berkala oleh pemerintah daerah. 4. Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam mengawasi transparansi administrasi desa	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	330 Desa	330 Desa	<p>Administrasi pemerintahan desa merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa, karena berkaitan dengan tata kelola yang efektif, transparan, dan akuntabel. Untuk memastikan administrasi berjalan dengan baik, dilakukan program pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah atau instansi terkait.</p> <p>Pada Tahun 2024 Jumlah Desa yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyelenggaraan Administrasi Desa di targetkan sebanyak 330 desa dengan realisasi sebesar 330 Desa dengan capaian kerjanya sebesar 100%. Hal ini dilihat dari : 1. kepatuhan desa dalam menyusun laporan administrasi sesuai peraturan yang berlaku 2. Adanya peningkatan pemahaman dan keterampilan perangkat desa dalam mengelola administrasi 3. Terwujudnya desa yang mandiri dalam menyusun dan mengelola administrasi pemerintahan 4. Pemerintah desa mampu berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam pembinaan dan pengawasan administrasi 5. Adanya bimbingan teknis dan pendampingan yang berkelanjutan</p>	1. Monitoring dan Evaluasi terhadap Desa yang sifatnya berkelanjutan 2. Pembinaan, Pengawasan dan Pendampingan secara berkelanjutan agar administrasi didesa tetap baik	
				Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	330 Dokumen	330 Dokumen	<p>Sub Kegiatan ini berisikan BKK Honorarium pembahas bagi Kepala Desa dan Perangkat desa dalam melaksanakan Musdes ketahanan Pangan dan Penangan Stunting di desa. Pada tahun 2024 di targetkan semua desa 330 Desa untuk melaksanakan musdes dimaksud, akan tetapi realiasi masih dibawah target sebesar 299 dengan capaian kinerja sebesar 90,61 %. Hal ini disebabkan terdapat 31 desa yang tidak mengajukan tambahan honorarium bagi perangkat desa dan terdapat kekosongan jabatan perangkat desa</p>	1. mendorong desa untuk tetap melakukan Musdes Ketahanan Pangan dan Penanganan Stunting 2. Pendampingan dan Memfasilitasi desa bagi yang akan mengajukan Honorarium Pembahas 3. Monitoring dan Evaluasi secara berkala	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	330 Dokumen	330 Dokumen	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa merupakan kegiatan yang berisikan tentang pembinaan dan dan Pengawasan bagi desa yang fokus dalam pengelolaan keuangan desa, seperti pembuatan laporan pertanggungjawaban dan laporan konsolidarilaporan keuangan desa. Pada Tahun 2024 ditargetkan sebanyak 330 desa dengan realisasi sebesar 330 desa sehingga capaian kerjanya sebesar 100%. Hal ini dapat dilihat dari Dokumen Laporan Pengelolaan keuangan desa yang sudah dibuat oleh desa secara benar dan tepat waktu	1. Tetap melakukan pendampingan serta memfasilitasi desa dalam pengelolaan keuangan desa 2. Melakukan monitoring dan Evaluasi secara berkala	
				Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	330 Dokumen	316 Dokumen	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa merupakan kegiatan dimana desa mengupdate terhadap profil dan perkembangan desa pada aplikasi prodeskel, pada tahun 2024 di targetkan 330 desa untuk mengupdate profil desa, dengan realisasi 316 desa sehingga capain kerjanya sebesar 95,76%. Tidak tercapainya target tersebut dikarenakan desa masih ada yang kurang paham dalam proses pengimputan data pada aplikasi profil desa	1. Melakukan pendampingan serta memfasilitasi desa dalam penyusunan profil desa 2. Melakukan monitoring dan Evaluasi secara berkala	
				Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	2448 Orang	2448 Orang	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD pada tahun 2024 difokuskan pada pengukuhan kembali terhadap anggota BPD sesuai dengan amanat UU No. 3 Tahun 2024 yaitu memperpanjang masa jabatan anggota BPD dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Masa jabatan ini berlaku untuk paling banyak 2 periode. Pada tahun 2024 pengukuhan anggota BPD ditargetkan sebanyak 2448 Orang dengan realiasi sebanyak 2448 Orang sehingga capaian kerjanya sebesar 100%.	1. melakukan pembinaanterhadap SDM anggota BPD 2. Monitoring dan Evaluasi kinerja BPD	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	80,76 % 6,59 %	119,56 % 12,28 %	<p>Untuk meningkatkan efektivitas program, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif, alokasi sumber daya yang lebih optimal, serta penguatan kapasitas dan peran aktif lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan desa. Pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 80,76% (7053 LKM) dengan realisasi sebesar 119,56 (10.441LKM) sehingga capain kinerjanya sebesar 148,04%. Terpenuhnya target ini dikarekan bahwa pada tahun 2024 jumlah LKM yang terbentuk mencapai 10.441 LKM. Keberhasilan ini diukur dengan melihat : 1. Persentase tinggi lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi 2. Tersedianya dukungan finansial, pelatihan, dan pendampingan yang memadai. 3. Peningkatan kapasitas dan peran aktif lembaga dalam pembangunan desa. 4. Sinergi antara lembaga dengan pemerintah desa dan masyarakat dalam pelaksanaan program</p> <p>Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan kemandirian lembaga masyarakat di desa termasuk lembaga adat desa. Sejalan dengan indikator Persentase Lembaga Adat yang terfasilitasi, pada tahun 2024 dotargetkan sebesar 6,59 % (22 LAD) dengan realisasi sebesar 12,28 % (41 LAD), sehingga capaian kinerjanya sebesar 186,34%. Keberhasilan ini diukur dengan</p>	1. Pembinaan, Pendampingan dan fasilitasi terhadap LKM yang ada 2. Monitoring dan Evaluasi secara berkala 1. Pembinaan, Pendampingan dan fasilitasi terhadap LAD yang ada 2. Monitoring dan Evaluasi secara berkala	
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	7053 LKM 22 LAD	10441 LKM 41 LAD	<p>Pada Tahun 2024 Jumlah lembaga kemasyarakatan Desa yang terbentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan ditargetkan sebesar 7053 LKM dengan realisasi sebesar 10441 LKM sehingga capaian kinerjanya sebesar 148,04%, keberhasilan ini ditunjang dengan cara memfasilitasi LKM yang belum berbadan hukum untuk menjadi LKM yang berbadan hukum sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Pada tahun 2024 Jumlah lembaga Adat Desa terbentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebesar 22 LAD dengan realisasi sebesar 41 LAD, sehingga capaian kinerjanya sebesar 186,36%. Keberhasilan ini diperoteh dengan cara memfasilitasi Lembaga Adat Desa yang belum berbadan hukum untuk menjadi Lembaga Adat desa yang berdan Hukum</p>	1. Pembinaan, Pendampingan dan fasilitasi terhadap LKM yang ada 2. Monitoring dan Evaluasi secara berkala 1. Pembinaan, Pendampingan dan fasilitasi terhadap LAD yang ada 2. Monitoring dan Evaluasi secara berkala	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	330 Lembaga	330 Lembaga	Tujuan utama dari peningkatan kapasitas ini adalah untuk memperkuat peran lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan desa/kelurahan, menjaga kearifan lokal, serta meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Pada tahun 2024 di targetkan sebanyak 330 Lemabaga yang ditingkatkan kapasitasnya, dengan realisasi sebesar 330 lemabaga, sehingga capaian kerjanya sebesar 100%.	1. Pembinaan, Pendampingan dan fasilitasi terhadap Lembaga yang ada 2. Monitoring dan Evaluasi secara berkala	
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1. Peraturan Bupati Sumenep No 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	10 %	2 %	1. Masih rendah dikarenakan Tenaga Penyuluh KB dilapangan sekarang kurang kita hanya mempunyai tenaga Penyuluh KB 20 orang dari 334 desa yang ada di Sumenep yg berarti 1 banding 20 dalam artian 1 Penyuluh KB membina 20 desa 2. Lokasi kegiatan terutama khusus kepulauan 3. Kurang maksimalnya pelaporan pada aplikasi Kampung KB dan Rumah Dataku	Pemenuhan tenaga penyuluh KB di semua Kecamatan dan meningkatkan akses layanan serta koordinasi dengan lintas sektor.	
				Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	2 kebijakan	2 kebijakan	Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	-	-
				Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	-	-
				Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	16 kecamatan	16 kecamatan	Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	-	-
				Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	26 Laporan	26 Laporan	Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	-	-
				Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	130 Dokumen	124 Dokumen	Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	-	-
				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	70,69 %	59,82 %	1. Dampak dari COVID-19 banyak peserta KB aktif yang DO, 2. Tenaga Penyuluh KB dilapangan sekarang kurang kita hanya mempunyai tenaga Penyuluh KB 20 orang dari 334 desa yang ada di Sumenep yg berarti 1 banding 20 dalam artian 1 Penyuluh KB membina 20 desa, sekarang ada beberapa kecamatan yg tidak punya Penyuluh KB 3. Sistem pelaporan kita selalu eror dan juga di kecamatan tidak mempunyai tenaga khusus yg menangani pelaporan	Sosialisasi kesehatan reproduksi, memberikan pelayanan KB secara gratis, serta Peningkatan akses dan kualitas kesehatan reproduksi.	
				Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	45 %	45 %	-	-	-
				Pengendalian Program KKBP	224 Laporan	224 Laporan	-	-	-
				Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	26 Laporan	26 Laporan	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	5 Laporan	5 Laporan	-	-	-
				Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	-
				Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	4 Dokumen	3 Dokumen	Dukungan lintas sektor kurang optimal dan kelengkapan data untuk laporan 8 aksi konvergensi juga kurang optimal	Dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala	-
				Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	10 Organisasi	8 Organisasi	Dukungan lintas sektor kurang optimal	melakukan advokasi kepada lintas sektor dan dilakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaannya	-
				Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	-	-	-
				Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	35 Laporan	35 Laporan	-	-	-
				Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1152 Orang	1152 Orang	-	-	-
				Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	4 Laporan	4 Laporan	-	-	-
				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	100 %	79,3 %	Dukungan lintas sektor kurang optimal	Advokasi kepada lintas sektor dan dilakukan monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaannya	-
				Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	28 Dokumen	28 Dokumen	-	-	-
				Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	8 Kampung	8 Kampung	-	-	-
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	80 %	79,3 %	Kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	-	-
				Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 %	100 %	-	-	-
				Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	50 Keluarga	50 Keluarga	-	-	-
				Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	50 Laporan / Dokumen	38 Laporan / Dokumen	Terdapat perubahan permintaan laporan menjadi 38 Laporan/dokumen	Disesuaikan dengan pelaporan yang dibutuhkan.	-
				Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	20 Unit	32 Unit	-	-	-
				Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 %	79,3 %	-	-	-
				Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	6 laporan	6 laporan	-	-	-
				Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	4 laporan	4 laporan	-	-	-
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1. Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan; 2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Departemen Perhubungan Tahun 2005-2025; 3. Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan; 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Departemen Perhubungan Tahun 2005-2025,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 % 12 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 4 Laporan 6 Laporan 13 Laporan	100 % 12 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 4 Laporan 6 Laporan 13 Laporan	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - -

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	107 Orang/bulan	0 Orang/bulan	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	-	-	-
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Jenis	2 Jenis	-	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	2 Paket	-	-	-
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5 Orang	3 Orang	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	110 Jenis	110 Jenis	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 Paket	3 Paket	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Paket	3 Paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4 Paket	4 Paket	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4 Paket	4 Paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	108 Dokumen	108 Dokumen	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	60 Laporan	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	39 Unit	39 Unit	-	-	-
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 Unit	5 Unit	-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34 Unit	34 Unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Jenis	0 Jenis	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24 Laporan	24 Laporan	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60 Laporan	60 Laporan	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73 Unit	73 Unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30 Unit	30 Unit	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41 Unit	41 Unit	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	2 Unit	-	-	-
				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	30 km/jam	30 km/jam	-	-	Pemeliharaan PJU akan terus dan selalu dilaksanakan dari tahun ke tahun, baik di wilayah daratan maupun kepulauan, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Pemeliharaan PJU selesai tepat waktu di tahun 2024
					60 %	60 %	-	-	
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	5 Item	5 Item	-	-	-
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	64 Unit	32 Unit	-	-	-
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	3500 Unit	3500 Unit	-	-	-
				Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	83,13 %	72 %	-	-	-
				Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	4000 Unit	2897 Unit	-	-	-
				Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4723 Dokumen	4723 Dokumen	-	-	-
				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	11 Unit	11 Unit	-	-	-
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	30 Laporan	30 Laporan	-	-	-
				Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
				Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	-
				Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3 Laporan	3 Laporan	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	1 Rekom	1 Rekom	-	-	-
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	255 Unit	255 Unit	-	-	-
				Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
				PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	80 %	70 %	-	-	-
					65 %	60 %	-	-	-
				Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Rekom	1 Rekom	-	-	-
				Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	6 Laporan	6 Laporan	-	-	-
				Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	4 Unit	4 Unit	-	-	-
				Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	3 Unit	3 Unit	-	-	-
				Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	1 Unit	1 Unit	-	-	-
				Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	96 %	-	-	-
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan	9 Laporan	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	41 Orang/bulan	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 jenis	5 jenis	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	1 Paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5 Paket	5 Paket	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	2 Paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17 Dokumen	15 Dokumen	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan	250 Laporan	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	3 Laporan	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Laporan	3 Laporan	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Unit	4 Unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25 Unit	25 Unit	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6 Unit	6 Unit	-	-	-
				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	85 persen	85 persen	-	-	-
					65 dokumen	65 dokumen	-	-	-
					40 dokumen	40 dokumen	-	-	-
					40 dokumen	30 dokumen	-	-	-
				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	85 dokumen	75 dokumen	-	-	-
					30 media	30 media	-	-	-
					85 dokumen	85 dokumen	-	-	-
					40 dokumen	40 dokumen	-	-	-
				Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	75 Dokumen	75 Dokumen	-	-	-
				Layanan Hubungan Media	150 Layanan	150 Layanan	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	75 Dokumen	75 Dokumen	-	-	-
				Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	75 Dokumen	75 Dokumen	-	-	-
				PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	87 %	87 %	-	-	-
				Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	72 Instansi	72 Instansi	-	-	-
				Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	75 Unit	72 Unit	-	-	-
				Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	77 Titik	77 Titik	-	-	-
				Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	1 Unit	1 Unit	-	-	-
				Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-
				Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	76 Layanan	76 Layanan	-	-	-
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembelian dan Pengusahaan Tembaku (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2012 Nomor 15); 2. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 29 Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penatausahaan Pembelian Tembaku	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	100 %	-	-	-
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18 Dokumen	18 Dokumen	-	-	-
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9 Dokumen	8 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8 Dokumen	8 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan	-	-	-
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	87 Orang/bulan	87 Orang/bulan	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	4 Laporan	-	-	-
				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	-	-	-
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	-	-	-
				Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90 %	70 %	-	-	-
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4 Orang	3 Orang	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	90 %	90 %	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 Paket	7 Paket	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Paket	6 Paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Paket	12 Paket	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6 Paket	6 Paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6 Dokumen	8 Dokumen	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50 unit	10 unit	-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7 Unit	10 Unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 layanan jasa	6 layanan jasa	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	15 Laporan	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46 unit	23 unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 Unit	7 Unit	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34 Unit	34 Unit	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	650 Ha	650 Ha	-	-	-
				PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	21 %	21 %	-	-	-
				Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	200 Unit Usaha	100 Unit Usaha	-	-	-
				Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	100 Unit Usaha	96 Unit Usaha	-	-	-
				PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	7,0 %	7 %	-	-	-
				Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	-	-	-
				Penilaian Kesehatan Koperasi Melalui Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	96 Unit Usaha	100 Unit Usaha	-	-	-
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	6,0 %	6 %	-	-	-
				Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	3 Dokumen	-	-	-
				Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	50 Unit Usaha	10 Unit Usaha	-	-	-
				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	8 %	8 %	-	-	-
				Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	350 Unit Usaha	200 Unit Usaha	-	-	-
				Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	-	-	-
				Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	100 Orang	100 Orang	-	-	-
				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	5,5 %	5,5 %	-	-	Pembinaan terhadap pelaku usaha UMKM tetap mendapatkan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Sumenep. Tindakan lanjut oleh Diskoperindak adalah adanya kerjasama dengan PT Semeru Indonesia Maju (Goorita) dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Kerjasama tersebut meliputi konsultasi perizinan, peningkatan kualitas produk, sertifikasi produk, pengemasan dan kerjasama pemasaran melalui even dan pameran. Bahkan bagi UMKM unggulan ada bantuan pemasaran produk untuk ekspor dan mengikuti promosi di Luar negeri.
				Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	-	-	-
				Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	-	-	-
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1. Peraturan Daerah Nomor : 16 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal; 2. Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/445/KEP/435.013/2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Di Kabupaten Sumenep; 3. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Secara Elektronik; 4. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 28 Tahun 2018 tentang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20 %	20 %	-	-	-
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	0 Orang/bulan	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Kabupaten Sumenep; Peraturan Bupati Sumenep Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Di Kabupaten Sumenep;	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Jenis	1 Jenis	-	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	64 Paket	64 Paket	-	-	-
				Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi			-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Unit	62 Unit	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	26 Paket	26 Paket	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Paket	12 Paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Paket	12 Paket	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5 Paket	5 Paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	365 Dokumen	365 Dokumen	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	131 Laporan	131 Laporan	-	-	-
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	76 Unit	18 Unit	-	-	-
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	1 Unit	-	-	-
				Pengadaan Mebel	4 Paket	4 Paket	-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8 Unit	8 Unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Layanan	3 Layanan	-	-	-
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4111 Laporan	1941 Laporan	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 jenis	5 jenis	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37 Unit	10 Unit	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64 Unit	64 Unit	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	2 Unit	-	-	-
				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	10 %	10 %	-	-	-
				Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			-	-	-
				Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			-	-	-
				Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			-	-	-
				Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			-	-	-
				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	3,67 %	9,53 %	-	-	-
				Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	5 Media	4 Media	-	-	-
				Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-
				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	3,67 %	9,53 %	-	-	-
				Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	6400 NIB	16090 NIB	-	-	-
				Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	6400 Pelaku Usaha	16090 Pelaku Usaha	-	-	-
				Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	12 Pelaku Usaha	38 Pelaku Usaha	-	-	-
				Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	27 Kegiatan Usaha	20 Kegiatan Usaha	-	-	-
				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	6400 Pelaku Usaha	16090 Pelaku Usaha	-	-	-
				Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	6400 Pelaku Usaha	16090 Pelaku Usaha	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	9 Kegiatan Usaha.	35 Kegiatan Usaha.	-	-	-
				Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	287 Pelaku Usaha	240 Pelaku Usaha	-	-	-
				Pengawasan Penanaman Modal	17 Kegiatan Usaha	54 Kegiatan Usaha	-	-	-
				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	95 %	180 %	-	-	-
				Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	95 %	180 %	-	-	-
				Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	5 Dokumen	5 Dokumen	-	-	-
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA	1. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2019 Tentang pemudaan; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	10 %	9,1457 %	-	-	-
				Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirusaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	700 Orang	176 Orang	-	-	-
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	25 Orang	37 Orang	Kegiatan dari Provinsi dilaksnakan di Triwulan 2	Rencana aksi lanjutan akan di cari dan didampingi calon Pemuda Pelopor pada Triwulan 4	-
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	100 Orang	100 Orang	Kesiapan dokumen kontrak belum siap sehingga di laksanakan pada Triwulan 3	-	-
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	80 Orang	0 Orang	-	-	-
				Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	25 Orang	27 Orang	Pelaksanaannya dilaksanakan pada Triwulan III	-	-
				Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21 Organisasi	20 Organisasi	-	-	-
				Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	14 Dokumen	Kelengkapan berkas belum selesai dan dicairkan pada Triwulan berikutnya	-	-
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	25 %	17 %	-	-	-
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			-	-	-
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	4 Unit	0 Unit	Pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan jadwal	-	-
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2 kali	2 kali	-	-	-
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	Karena ada beberapa Jadwal kalender Event yang mengalami perubahan	Akan disesuaikan dengan jadwal Kalender Event selanjutnya	-
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	10 kali	3 kali	-	-	-
				Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	Pelaksanaannya dilaksanakan pada Triwulan III	-	-
				Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	30 Orang	110 Orang	Pelaksanaannya dilaksanakan pada Triwulan IV	-	-
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	1 Dokumen	0 Dokumen	Pelaksanaannya dilaksanakan pada Triwulan IV	-	-
				Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	10 kali	12 kali	-	-	-
				Pengembangan Organisasi Keolahragaan	3 Organisasi	8 Organisasi	Pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan jadwal	-	-
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	5 kali	9 kali	-	-	-
				Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	2 Dokumen	1 Dokumen	Pelaksanaannya terlaksana sesuai dengan jadwal	-	-
				Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	2 Dokumen	10 Dokumen	Pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan jadwal Kalender Event	-	-
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	5 %	6 %	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	27 perkemahan	27 perkemahan	-	-	-
				Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Laporan	2 Laporan	Berkas kelengkapan baru terkumpul pada Trivulan 2	-	-
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	85 persen	85 persen	-	-	-
				Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	130 dokumen	150 dokumen	-	-	-
				Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	150 Dokumen	150 Dokumen	-	-	-
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	85 persen	85 persen	-	-	-
				Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	80 %	80 %	-	-	-
				Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	72 Perangkat Daerah	74 Perangkat Daerah	-	-	-
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA	1. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sumenep Tahun 2018-2025;	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	80 %	92,39 %	-	-	-
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	-	-	-
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8 Dok	8 Dok	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	41 Orang/bulan	-	-	-
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	43 Orang	2 Orang	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	9 Dok	9 Dok	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	-	-	-
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	1 Paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	1 Paket	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Dok	2 Dok	-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Unit	2 Unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Dok	4 Dok	-	-	-
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Dok	4 Dok	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4 Unit	4 Unit	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	2 Unit	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Unit	3 Unit	-	-	-
				PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	45 %	54 %	-	-	-
				Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	3 objek	13 objek	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	5 Objek	18 Objek	Pelaksanaannya terlaksana sesuai dengan jadwal Terdapat 6 OPK antara lain : Tradisi Lisan (macopat), Adat Istiadat (Nyadar), Ritus (jamasan), Permainan Rakyat (Klenengan Dolanan) Pengetahuan Tradisional (Pameran Keris, Akik dan UkirZan), Seni (Tari, Musik, Teater, Rupa , Seni Pertunjukan)	-	-
				PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	45 %	49,7 %	-	-	-
				Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	30 kali	163 kali	-	-	-
				Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	26 Lembaga	82 Lembaga	Pelaksanaannya terlaksana sesuai dengan jadwal 39 lembaga dimana 29 lembaga grup klenengan dan 9 lembaga penerima hibah seragam / alat Hadrah	-	-
				PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	70 %	6,39 %	-	-	-
				Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			-	-	-
				Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	100 Orang	3 Orang	Pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan jadwal Kalender Event 4 orang Pelaksana Bidang Kebudayaan, 6 orang cameramen + 10 orang Sanggar Rukun Pewartas + 665 orang acara MEC, Upacara 1200 orang , Haul 630 orang	-	-
				Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	6 Dokumen	10 Dokumen	Pelaksanaannya dilaksanakan pada Triwulan IV 1 Dokumen Sertifikat WBTB , mencetak 10 Dokumen Buku Kajian sebagai bantuan untuk 200 Perpustakaan di Kabupaten Sumenep	-	-
				PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	65 %	42 %	-	-	-
				Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	3 unit	3 unit	-	-	-
				Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	3 Unit	2 Unit	Pelaksanaannya dilaksanakan pada Triwulan IV Terdapat 3 unit museum yang dilakukan Perlindungan Pengembangan dan Pemanfaatan	-	-
				Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	3 Unit	6 Unit	Pelaksanaannya terlaksana sesuai dengan jadwal Terdapat 3 unit museum sebagai sarana akses masyarakat	-	-
				Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	3 Unit	1 Unit	Pelaksanaannya terlaksana sesuai dengan jadwal Terdapat 3 unit Sarana Prasarna Museum yang terpelihara	-	-
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	95 %	339,64 %	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Laporan	0 Laporan	Terdapat kekurangan anggaran pada belanja gaji dan tunjangan PPPK	Melakukan tambahan anggaran di PAK	Nihil
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	26 Orang/bulan	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Jenis	0 Jenis	-	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	0 Paket	nihil	nihil	nihil
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	86 %	89,52 %	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	dalam pelaksanaan kegiatan komponen instalasi listrik tidak ada masalah	meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang akan dicapai	nihil
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 Paket	1 Paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7 Paket	2 Paket	terdapat perubahan anggaran pada komponen belanja	perubahan anggaran di PAK	nihil
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3 Paket	0 Paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	22 Dokumen	21 Dokumen	anggaran terealisasi apabila ada tagihan oleh pihak distributor koran	Mempercepat tagihan dan realisasi anggaran	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46 Laporan	-	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88 %	85 %	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7 Laporan	7 Laporan	pada awal triwulan terdapat kekuurangan anggaran tagihan listrik	Melakukan perubahan anggaran untuk dapatnya Membayar tagihan listrik	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84 %	93 %	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 Unit	5 Unit	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	72 Unit	65 Unit	Dalam pelaksanaan tidak terdapat permasalahan yang menghambat realisasi kinerja yang menjadi target kinerja yang telah dibuat	dalam Setiap tahunnya meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 Unit	0 Unit	-	-	-
				PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	95 %	100 %	-	-	-
				Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	94 lembaga	33 lembaga	-	-	-
				Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	94 Layanan	0 Layanan	Dalam Pelaksanaannya Kode rekening Anggaran terdapat kekeliruan yang secara otomatis tidak dapat direalisasikan	Melakukan koordinasi dan perubahan anggaran kegiatan di PAK	-
				Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	86 Perpustakaan	45 Perpustakaan	Pada Sub Kegiatan terdapat belanja Modal Pengadaan buku yang dilakukan pengurangan anggaran atau efesiansi anggaran	melakukan koordinasi dan perubahan anggaran	-
				Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	11000 pengunjung	2250 pengunjung	-	-	-
				Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	90 Lokus	10 Lokus	-	-	-
				PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	85 %	50 %	-	-	-
				Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	6 Naskah Kuno	6 Naskah Kuno	-	-	-
				Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	5 Orang	5 Orang	-	-	-
				Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	3 Eksemplar	3 Eksemplar	-	-	-
				Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			-	-	-
Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	900 Eksemplar	-	-	-	-				
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	80 %	57 %	-	-	-
				Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	31 pencipta arsip	59 pencipta arsip	-	-	-
				Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	31 Berkas	0 Berkas	- Kurangnya SDM yang kurang dalam keilmuan - kurangnya dukungan sarpras pada pencipta arsip	- Menyediakan SDM kearsipan sesuai kompetensi kearsipan pada masing - masing pencipta arsip - Meningkatkan kompetensi SDM kearsipan dengan mengikuti pelatihan pelatihan kearsipan dan Diklat kearsipan	Nihil

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	31 Laporan	0 Laporan	- Kurangnya SDM yang kurang dalam keilmuan - kurangnya dukungan sarpras pada pencipta arsip	- Menyediakan SDM kearsipan sesuai kompetensi kearsipan pada masing - masing pencipta arsip - Meningkatkan kompetensi SDM kearsipan dengan mengikuti pelatihan pelatihan kearsipan dan Diklat kearsipan	- penyediaan anggaran dalam rangka memfasilitasi ketersediaan SDM kearsipan
				Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	14 series	1 series	- Masih kurangnya Kepedulian pencipta arsip dalam mengelola dan penataan arsip - kurangnya SDM dalam mengelola arsip statis dengan berbasis Teknologi informasi	- Dapatnya setiap OPD dapat meningkatkan sarana pengelolaan arsip berbasis IT - Dapatnya setiap OPD dapat meningkatkan SDM pengelolaan arsip berbasis IT	Nihil
				Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	14 Arsip	4 Arsip	a. Masih Kurangnya SDM kearsipan secara kualitas keilmuan b. Kurangnya dukungan dari pencipta arsip (Perangkat Daerah dan Kecamatan) dalam pengelolaan arsip yang diciptakan	- Pemerintah daerah dapatnya mendukung diklat tentang kearsipan - Pemerintah Daerah Menempatkan SDM sesuai dengan keilmuannya	Nihil
25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS PERIKANAN	1. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor : 2 tahun 2021 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	0 %	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10 laporan	10 laporan	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/bulan	39 Orang/bulan	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3 Laporan	3 Laporan	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 keg	6 keg	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	1 Paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	1 Paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 jasa	4 jasa	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 obyek	4 obyek	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	1 Unit	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	-	-	-
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	1,3 %	3,16 %	Tidak tercapainya target kinerja triwulan I dikarenakan cuaca buruk sehingga nelayan tidak dapat melakukan aktivitas penangkapan ikan	dilakukan pelatihan tentang pemeliharaan sarana dan prasarana sehingga apabila cuaca sudah membaik nelayan telah siap melakukan penangkapan ikan dengan sarana dan prasarana yang layak	-
				Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	65 kel	65 kel	Masih banyaknya nelayan yang belum mempunyai asuransi perlindungan diri	Terus mensosialisasikan akan pentingnya asuransi perlindungan diri dan juga pemberian asuransi secara gratis kepada nelayan	-
				Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	1780 Orang	1780 Orang	Minimnya pengetahuan nelayan terkait pentingnya asuransi perlindungan diri	meningkatkan sosialisasi kepada nelayan akan pentingnya asuransi diri dan memberikan asuransi kepada nelayan secara gratis	-
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	15 %	13,96 %	Menurunnya kualitas air budidaya ikan terutama untuk komoditas budidaya udang vanamei	meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk menanggulangi kerusakan lingkungan akibat limbah hasil budidays	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	11 pembudidaya	11 pembudidaya	Minimnya pengetahuan masyarakat terkait penggunaan teknologi budidaya	Meningkatkan kapasitas pembudidaya melalui pelatihan dan pemberian bantuan saran dan prasarana budidaya ikan	-
				Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	11 Kelompok	11 Kelompok	ketidaktahuan masyarakat untuk mengurus sertifikat tanah	mengintensifkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan BPN terkait kuota SEHA	-
				Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	4 Kelompok	11 Kelompok	masih kurangnya akses masyarakat terkait pelayanan Dinas Perikanan	Meningkatkan penggunaan teknologi informasi berbasis internet	-
26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA	1. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sumenep Tahun 2018-2025.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	5 %	1,68 %	-	-	-
				Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3 Lokasi	12 Lokasi	-	-	-
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	4 Laporan	-	-	-
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	5 %	5 %	-	-	-
				Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	1 Kali	1 Kali	-	-	-
				Bantuan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (Banper)	10 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha	-	-	-
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	5 %	6 %	-	-	-
				Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	3 kali	2 kali	-	-	-
				Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	1 Orang	76 Orang	-	-	-
				Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	10 Orang	100 Orang	-	-	-
				Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4 Laporan	51 Laporan	-	-	-
				Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	-	-	-	-	-
				Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	10 Orang	89 Orang	-	-	-
27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	100 %	Pada kode rekening tertentu, kebutuhan anggaran tidak mencukupi	Mengajukan penambahan anggaran pada proses PAK	Tidak ada rekomendasi DPRD
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 dokumen	7 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Tidak ada kendala	Percepatan pengajuan SPJ	Tidak ada
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Tidak ada kendala	Pengajuan menyesuaikan dengan AKAS	Tidak ada
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 laporan	2 laporan	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2760 Orang/bulan	2760 Orang/bulan	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 jenis	1 jenis	-	-	-
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2 Orang	2 Orang	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 jenis	5 jenis	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 Paket	4 Paket	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Paket	4 Paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Paket	12 Paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6 Dokumen	6 Dokumen	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	40 Laporan	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 jenis	3 jenis	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 Laporan	36 Laporan	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 jenis	3 jenis	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4 Unit	4 Unit	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 Unit	10 Unit	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	-	-	-
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	101,55 ton 5155 ton 82972 kw 6079 ton 160848 ton 10539 ton 458043 ton 767,55 ton 5653 ton 4282 ton 22463 ton 195930 ton 10045 kw 45268 ton 70136 kw	23,68 ton 5236,49 ton 175526 kw 11309,88 ton 100446,84 ton 13117,17 ton 448029,68 ton 957,56 ton 7317,3 ton 7301,76 ton 21739,68 ton 212397,76 ton 10007 kw 57547,43 ton 144422 kw	Hasil produksi pertanian sangat dipengaruhi oleh faktor iklim	Rekapitulasi data produksi dilakukan sampai dengan TW 4	Tidak ada rekomendasi DPRD
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	100 Klp	100 Klp	Belum semua bantuan hibah terealisasi. Beberapa barang harus indent	Percepatan proses pemberkasan SK penerima hibah dan berkas pengajuan pencairan bantuan hibah	Tidak ada rekomendasi DPRD
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	5 Laporan	5 Laporan	Pelaksanaan kegiatan P2L (DAK NF) sangat tergantung pencairan dana dari pusat.	Percepatan kegiatan awal P2L (rapat koordinasi dan pelatihan tematik tahap I). Proses pengadaan bahan-bahan pembibitan tembakau	Tidak ada rekomendasi DPRD
				Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	72 Laporan	72 Laporan	Tidak ada kendala.	Bantuan hibah uang telah dilaksanakan. Untuk hibah barang direncanakan pada TW 3	Tidak ada rekomendasi DPRD
				Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	3 unit	3 unit	Terdapat sub kegiatan yang dipindah alokasi anggarannya ke kegiatan yang lain, sesuai dengan ketentuan yang ada	Koordinasi dengan OPD terkait yang berwenang menangani sumber dana DBHCHT	Tidak ada rekomendasi DPRD
				Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	1 Dokumen	Dialokasikan ke sub kegiatan yang lain menyesuaikan dengan regulasi yang ada	Koordinasi dengan bagian keuangan u proses pemindahan alokasi anggaran	Tidak ada rekomendasi DPRD
				Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	1 Dokumen	Terdapat penundaan jadwal pengadaan bahan-2 budidaya tembakau	Melakukan upaya antisipasi mundurnya pelaksanaan budidaya di lahan	Tidak ada rekomendasi DPRD
				Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	1 Varietas Unggul Baru (VUB)	1 Varietas Unggul Baru (VUB)	Tidak ada kendala	Pelaksanaan pengadaan bahan untuk budidaya jagung	Tidak ada rekomendasi DPRD
				Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	0,5 %	0,5 %	Tidak ada kendala	Lebih mengintensifkan pelaksanaan IB dan monitoring hasil IB untuk meningkatkan polupasi	Tidak ada rekomendasi DPRD
				Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	12 Laporan	12 Laporan	Tidak ada kendala	Telah dilaksanakan rapat koordinasi bagi para petugas IB dan pendistribusian Straw dan N2 cair	Tidak ada rekomendasi DPRD
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	78 %	78 %	Tidak ada kendala	Melakukan monitoring secara berkelanjutan pelaksanaan pembangunan fisik dilapangan	Tidak ada rekomendasi DPRD

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pengembangan Prasarana Pertanian	26 Unit	26 Unit	Tidak ada kendala	Pemantauan proses pembangunan fisik (hibah) di lapangan	Tidak ada rekomendasi DPRD
				Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	29 Laporan	29 Laporan	Tidak ada kendala	Pelaksanaan pemantauan pelaksanaan bantuan hibah fisik di lapangan	Tidak ada rekomendasi DPRD
				Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Tidak ada kendala	Dilakukan monitoring pelaksanaan pembangunan fisik dilapangan	Tidak ada rekomendasi DPRD
				Pembangunan Prasarana Pertanian	152 unit	152 unit	Tidak ada kendala	Monitoring pelaksanaan pembanguan JUT dan proses pengajuan pencairan	Tidak ada rekomendasi DPRD
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	37 Unit	37 Unit	Tidak ada kendala	Dilakukan monitoring pelaksanaan pembangunan JUT di lapangan	Tidak ada rekomendasi DPRD
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	50 Unit	50 Unit	Tidak ada kendala	Dilakukan monitoring pelaksanaan pembangunan IATD	Tidak ada rekomendasi DPRD
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	65 Unit	65 Unit	Tidak ada kendala	Pemantauan pelaksanaan pembangunan RJIT di lapangan	Tidak ada rekomendasi DPRD
				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	25 %	25 %	Tidak ada kendala	Peningkatan pemantauan kesehatan hewan ternak oleh petugas paramedik	Tidak ada rekomendasi DPRD
				Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	20 Lokasi	20 Lokasi	Tidak ada kendala	Dilakukan pemantauan pengawasan kesehatan hewan secara berkelanjutan	Tidak ada rekomendasi DPRD
				Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	Tidak ada kendala	Pemberian edukasi kepada para peternak dalam budidaya ternak	Tidak ada rekomendasi DPRD
				Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Tidak ada kendala	Meningkatkan pengawasan keluar masuk hewan dengan memberikan SKKH	Tidak ada rekomendasi DPRD
				Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	12 laporan	12 laporan	-	-	-
				Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	175 sampel	175 sampel	Tidak ada kendala	Peningkatan pelayanan kesehatan hewan dan pengobatan hewan	Tidak ada rekomendasi DPRD
				Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	12 Laporan	Tidak ada kendala	Peningkatan pelayanan dan pengobatan penyakit PHMS	Tidak ada rekomendasi DPRD
				PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	3 %	3 %	Tidak ada kendala	Peningkatan pembinaan perizinan usaha tani	Tidak ada rekomendasi DPRD
				Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	4 Klp	4 Klp	Tidak ada kendala	Peningkatan pembinaan perizinan usaha tani	Tidak ada rekomendasi DPRD
				Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	4 Laporan	4 Laporan	-	-	-
				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2 %	2 %	-	-	-
				Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	50 Klp	50 Klp	Tidak ada kendala	Percepatan pelaksanaan pelatihan bagi petani dan penyuluh	Tidak ada rekomendasi DPRD
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	10 Unit	10 Unit	Tidak ada kendala	-	Tidak ada rekomendasi DPRD
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	27 Unit	27 Unit	Tidak ada kendala	Penyediaan bahan pengembangan budidaya bawang merah	Tidak ada rekomendasi DPRD				
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	12 Unit	15 Unit	Anggaran baru cair di akhir bulan Juni (Dana DAK NF)	Percepatan pelaksanaan kegiatan sekolah lapang di beberapa lokasi	Tidak ada rekomendasi DPRD				
28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512); 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277); 3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2024	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	5 %	5 %	-	-	-
				Penerbitan Tanda Daftar Gudang	2 dokumen	3 dokumen	-	-	-
				Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	2 Dokumen	3 Dokumen	-	-	-
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	15 %	15 %	-	-	-
				Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	47 Unit	48 Unit	-	-	-
				Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	2 Unit	2 Unit	-	-	-
				Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	45 Unit	45 Unit	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 Nomor 1).	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	85 % 36 Laporan 12 Laporan 25 Laporan 1 Laporan 8 Laporan 1 Laporan 17 % 2 % 1600 Unit 30 % 5 UMKM 2 UMKM	85 % 12 Laporan 3 Laporan 1 Laporan 3 Laporan 1 Laporan 17 % 2 % 1600 Unit 30 % 7 UMKM 2 UMKM	-	-	-
29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	100 % 8 Dok 2 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen	100 % 9 Dok 3 Dokumen 2 Dokumen	-	-	Pembangunan KIHT/ APHT pada tahun 2024 memasuki Tahap IV dan telah menyelesaikan pembangunan Gedung Bea Cukai dan 4 Gudang Produksi. Telah ada kerjasama dengan beberapa pelaku usaha IHT lokal untuk memproduksi produk tembakau di dalam KIHT/ APHT . terkait pengelola KIHT/ APHT . Pemerintah Kabupaten Sumenep telah menunjuk PD Sumekar sebagai pengelola dan akan mulai beroperasi setelah ijin operasional dari Bea Cukai keluar pada tahun 2025 ini.
30	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100 % 100 % 4 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 2 Laporan 100 % 210 Orang/bulan 12 Dokumen 12 Dokumen	96,25 % 100 % 4 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 2 Laporan 100 % 210 Orang/bulan 12 Dokumen 12 Dokumen	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	-	-	-
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	-	-	-
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	-	-	-
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7 Dokumen	7 Dokumen	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Paket	12 Paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11 Paket	11 Paket	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3 Paket	3 Paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	321 Dokumen	321 Dokumen	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600 Laporan	600 Laporan	-	-	-
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4500 Dokumen	4,5 Dokumen	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26 Unit	26 Unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Unit	12 Unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42 Unit	42 Unit	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	135 Unit	135 Unit	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8 Unit	7 Unit	-	-	-
				Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	100 %	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	-	-	-
				Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Paket	1 Paket	-	-	-
				Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang	0 Orang	-	-	-
				Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	-	-	-
				Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 %	100 %	-	-	-
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	4 Paket	4 Paket	-	-	-
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	3 Paket	3 Paket	-	-	-
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	9 Paket	9 Paket	-	-	-
					100 %	100 %	-	-	-
					100 %	100 %	-	-	-
				Penataan Organisasi	100 %	100 %	-	-	-
					100 %	100 %	-	-	-
				Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	107 Dokumen	107 Dokumen	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	15 Laporan	15 Laporan	-	-	-
				Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	14 Dokumen	8 Dokumen	-	-	-
				Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	55 Dokumen	55 Dokumen	-	-	-
				Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100 %	100 %	-	-	-
				Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
				Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	14 Laporan	14 Laporan	-	-	-
				Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	100 %	104,91 %	-	-	-
				Administrasi Tata Pemerintahan	100 %	100 %	-	-	-
				Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	5 Dokumen	5 Dokumen	-	-	-
				Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	-	-	-
				Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100 %	100 %	-	-	-
				Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	13 Dokumen	13 Dokumen	-	-	-
				Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	-
				Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	-
				Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100 %	100 %	-	-	-
				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	-
				Fasilitasi Bantuan Hukum	5 Kasus	5 Kasus	-	-	-
				Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	550 Dokumen	515 Dokumen	-	-	-
				Fasilitasi Kerja Sama Daerah			-	-	-
				Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	21 Dokumen	26 Dokumen	-	-	-
				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	100 %	114,94 %	-	-	-
				Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	100 %	100 %	-	-	-
				Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	10 Dokumen	10 Dokumen	-	-	-
				Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
				Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	-
				Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	100 %	100 %	-	-	-
				Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	-
				Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	6 Laporan	6 Laporan	-	-	-
				Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	4 Laporan	-	-	-
				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100 %	100 %	-	-	-
				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	75 Dokumen	119 Dokumen	-	-	-
				Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-
				Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	5 Orang	10 Orang	-	-	-
				Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	100 %	100 %	-	-	-
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
31	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	1. PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak-hak Keuangan dan Administratif Anggota DPRD; 2. Permenpan No 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100 % 18 Dokumen 4 Dokumen 1 Dokumen	99,55 % 18 Dokumen 4 Dokumen 0 Dokumen	- - - -	- - - -	- - - -

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	-	-	-
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	6 Laporan	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	966 Laporan	1044 Laporan	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	910 Orang/bulan	898 Orang/bulan	-	-	-
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	44 Laporan	44 Laporan	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	18 Dokumen	18 Dokumen	-	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	2 Paket	-	-	-
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	16 Orang	16 Orang	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	47 Dokumen	47 Dokumen	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 Paket	10 Paket	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Paket	5 Paket	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6 Paket	6 Paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	14 Laporan	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	29 Unit	29 Unit	-	-	-
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29 Unit	29 Unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28 Laporan	28 Laporan	-	-	-
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 Laporan	4 Laporan	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	113 Unit	112 Unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41 Unit	41 Unit	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Unit	5 Unit	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5 Unit	5 Unit	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	62 Unit	61 Unit	-	-	-
				Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	753 Orang/Bulan	752 Orang/Bulan	-	-	-
				Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	700 Orang/Bulan	700 Orang/Bulan	-	-	-
				Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	5 Paket	5 Paket	-	-	-
				Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	50 Orang	47 Orang	-	-	-
				Layanan Administrasi DPRD	21 Laporan	21 Laporan	-	-	-
				Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	20 Laporan	0 Laporan	-	-	-
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	1 Paket	1 Paket	-	-	-
				PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	100 %	94,93 %	-	-	-
				Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	19 Dokumen	19 Dokumen	-	-	-
				Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	-	-	-
				Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	8 Dokumen	8 Dokumen	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
				Penyusunan Tata Tertib DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-				
				Pembahasan Kebijakan Anggaran	5 Dokumen	5 Dokumen	-	-	-				
				Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-				
				Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-				
				Pembahasan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-				
				Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-				
				Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-				
				Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	65 Laporan	47 Laporan	-	-	-				
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	16 Laporan	12 Laporan	-	-	-				
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	16 Laporan	8 Laporan	-	-	-				
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	16 Laporan	11 Laporan	-	-	-				
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	16 Laporan	15 Laporan	-	-	-				
				Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-				
				Peningkatan Kapasitas DPRD	96 Dokumen	95 Dokumen	-	-	-				
				Orientasi DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-				
				Pendalaman Tugas DPRD	3 Dokumen	4 Dokumen	-	-	-				
				Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	4 Orang	4 Orang	-	-	-				
				Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang	7 Orang	-	-	-				
				Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dokumen	13 Dokumen	-	-	-				
				Publikasi dan Dokumentasi DPRD	69 Dokumen	48 Dokumen	-	-	-				
				Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	53 Dokumen	52 Dokumen	-	-	-				
				Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	50 Dokumen	50 Dokumen	-	-	-				
				Pelaksanaan Reses	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-				
				Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-				
				Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	0 Laporan	-	-	-				
				Pembahasan Kerja Sama Daerah	48 Dokumen	48 Dokumen	-	-	-				
				Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	48 Dokumen	44 Dokumen	-	-	-				
				Fasilitasi Tugas DPRD	19 Dokumen	15 Dokumen	-	-	-				
				Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	7 Dokumen	7 Dokumen	-	-	-				
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen	8 Dokumen	-	-	-				
				32	PERENCANAAN	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	100 %	-	-	-
								Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 Dokumen	14 Dokumen	-	-	-
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	-					-	-				
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-					-	-				
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-					-	-				
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-					-	-				
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-					-	-				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	-					-	-				
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	-					-	-				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	-					-	-				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/bulan	54 Orang/bulan	-					-	-				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	-					-	-				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	-					-	-				
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-					-	-				
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Orang	1 Orang	-					-	-				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Administrasi Umum Perangkat Daerah			-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9 Paket	9 Paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7 Paket	7 Paket	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4 Paket	4 Paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15 Dokumen	15 Dokumen	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	30 Laporan	-	-	-
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Jenis		-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Unit	5 Unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Unit		-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Laporan	4 Laporan	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	0 Laporan	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16 Unit	16 Unit	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	78 Unit	78 Unit	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	-	-	-
				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	100 %	100 %	-	-	-
				Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	-
				Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Pelaksanaan Konsultasi Publik	1 Berita Acara	1 Berita Acara	-	-	-
				Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 Berita Acara	2 Berita Acara	-	-	-
				Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	1 Berita Acara	-	-	-
				Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	1670 Usulan	1670 Usulan	-	-	-
				Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	-
				Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			-	-	-
				Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	51 Orang	51 Orang	-	-	-
				Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1 Buku	1 Buku	-	-	-
				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	6 Laporan		-	-	-
				Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	7 Laporan	7 Laporan	-	-	-
				Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	4 Laporan	4 Laporan	-	-	-
				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	100 %	100 %	-	-	-
				Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2 Laporan	0 Laporan	-	-	-
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	2 Laporan	0 Laporan	-	-	-
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	2 Laporan	0 Laporan	-	-	-
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
33	KEUANGAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH	1. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 2. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 59 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; 3. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 63 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; 4. Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor. 188/111/KEP/435.013/2024 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Sumenep; 5. Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor. 188/ 275/KEP/435.013/2024 tentang Nilai Jual Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak ; 6. Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor. 188/294/KEP/435.013/2024 tentang Tim Operasi Bersama Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	85 %	94,28 %	-	-	-
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	-	-	-
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4 jenis	4 jenis	-	-	-
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 jenis	7 jenis	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 Paket	4 Paket	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Paket	4 Paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4 Paket	4 Paket	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4 Paket	4 Paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	23 Laporan	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Unit	2 Unit	-	-	-
				Pengadaan Mebel	1 Paket	1 Paket	-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Paket	1 Paket	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 jasa	3 jasa	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15 Unit	14 Unit	-	-	-	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20 Unit	18 Unit	-	-	-	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Unit	12 Unit	-	-	-	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	-	-	-	
		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 Dokumen	14 Dokumen	-	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	-	-	-	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	-	-	-	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan	58 Orang/bulan	-	-	-	
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4 Jenis		-	-	-	
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5 Orang	0 Orang	-	-	-	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	10 Paket	10 Paket	-	-	-	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 Paket	10 Paket	-	-	-	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20 Paket	20 Paket	-	-	-	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10 Paket	10 Paket	-	-	-	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket	-	-	-	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	30 Laporan	-	-	-	
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 Dokumen	100 Dokumen	-	-	-	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	37 Unit	38 Unit	-	-	-	
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	1 Unit	-	-	-	
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36 Unit	36 Unit	-	-	-	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Jenis	16 Jenis	-	-	-	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Laporan	0 Laporan	-	-	-	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15 Unit	15 Unit	-	-	-	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40 Unit	40 Unit	-	-	-					
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20 Unit	20 Unit	-	-	-					
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	2 Unit	-	-	-					
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	93 %	95 %	-	-	-				
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 %	100 %	-	-	-			
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-			
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-			
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	55 Dokumen	55 Dokumen	-	-	-			
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	55 Dokumen	55 Dokumen	-	-	-			
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-			
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-			
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	95 %	95 %	-	-	-			
		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	-	-	-			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	183 Dokumen	183 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
				Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	95 Dokumen	95 Dokumen	-	-	-
				Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	55 Orang	55 Orang	-	-	-
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Laporan Keuangan Daerah	100 %	100 %	-	-	-
				Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	8 Laporan	8 Laporan	Terdapat kendala dalam proses di SIPD untuk rekon dengan OPD (Baik pencatatan Penerimaan dan Belanja)	Koordinasi dnegan Pusat dan membuat Berita Acara Rekon baik pendapatan dan belanja termasuk mengakomodir catatan selisih	tidak ada
				Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	3 Laporan	3 Laporan	Realisasi Dana Non RKUD (BLUD, BOK, BOS, DD) belum terakomodir di SIPD	Koordinasi dengan Pusat	tidak ada
				Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	55 Orang	55 Orang	-	-	-
				Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	95 %	95 %	-	-	-
				Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
				Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
				Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	93 %	93 %	-	-	-
				Pengelolaan Barang Milik Daerah	95 %	95 %	-	-	-
				Penyusunan Standar Harga	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Inventarisasi Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
				Pengamanan Barang Milik Daerah	10 Laporan	10 Laporan	-	-	-
				Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
			BADAN PENDAPATAN DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5 %	8,89 %	-	-	-
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5 %	11,89 %	-	-	-
				Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	-	-	-
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Unit	1 Unit	-	-	-
				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	7 Laporan	7 Laporan	-	-	-
				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
				Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	10 Obyek Pajak	8 Obyek Pajak	-	-	-
				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2 Layanan	2 Layanan	-	-	-
				Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	24 Dokumen	22 Dokumen	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pengelolaan Mutasi ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1700 Dokumen	828 Dokumen	1. Usul Pangkat dari Perangkat Daerah tidak sesuai dengan NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria); 2. Berkas tidak lengkap/tidak memenuhi syarat	Melakukan Sosialisasi ke Seluruh Perangkat Daerah terkait Pengajuan Kenaikan Pangkat	-
				Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Pengembangan Kompetensi ASN	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
				Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	75 Orang	102 Orang	Faktor Keberhasilan melampaui target disebabkan Pegawai yang melakukan usulan pengembangan kompetensi untuk melanjutkan pendidikan lebih banyak diusulkan dari Dinas Kesehatan khususnya tenaga kesehatan dokter yang melanjutkan PPDS	Melakukan Sosialisasi ke seluruh ASN di Lingkungan Pemkab Sumenep terkait Peraturan Bupati Sumenep Nomor 58 Tahun 2024 Tentang Pengembangan Kompetensi Melalui Jalur Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep	-
				Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	15 Orang	15 Orang	-	-	-
				Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	100 Orang	101 Orang	-	-	-
				Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
				Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
				Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	90 Orang	90 Orang	-	-	-
				Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	150 Orang	498 Orang	Faktor Keberhasilan melampaui target disebabkan karena Peserta penerima diprioritaskan pada pegawai yang akan memasuki masa pensiun	Melakukan Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Sekretariat Militer Presiden yang memverifikasi dan mengatur Penganugerahan Tanda Jasa	-
				Pembinaan Disiplin ASN	500 Orang	500 Orang	-	-	-
				Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	30 Laporan	20 Laporan	Menurunnya Pelanggaran Disiplin ASN di Lingkungan Pemkab Sumenep Tahun 2024	Menurunnya Pelanggaran Disiplin ASN disebabkan beberapa hal antara lain : 1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep melakukan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai ke semua ASN di Lingkungan Pemkab Sumenep; 2) Memberikan sanksi/tindakan secara tegas bilamana seorang ASN terbukti melakukan pelanggaran disiplin yang tujuan untuk memberikan efek jera dan shock terapi agar ASN yang lain tidak meniru atau melakukannya dan juga agar tidak melakukan pelanggaran yang hukumannya lebih berat lagi.	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	100 %	Pada program penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota permasalahan terjadi pada realisasi anggaran dimana terdapat beberapa Kegiatan/Sub Kegiatan pencapaian realisasinya berkisar 60 % dikarenakan : 1. Terjadinya keterlambatan pencairan dimana sebenarnya pelaksanaan kegiatan sudah dilaksanakan namun ketika mau proses pencairan tanggal terlalu lama (proses melalui Mbizz tidak sesuai tanggal pelaksanaan dan tanggal pemesanan dimana terkait dengan BAST tanggal terlalu lama) 2. Terdapat beberapa Kegiatan/Sub Kegiatan yang anggarannya merupakan penyediaan Namun pencapaian realisasi masih dikategorikan Tinggi dan target pada Program sudah tercapai	Untuk kedepan akan lebih memperhatikan proses pencairan, anggaran kas dan tanggal untuk melakukan proses pemesanan dengan tanggal pelaksanaan.	-
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	-	-	-
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan	13 Orang/bulan	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Layanan	1 Layanan	Terdapat satu kegiatan yang tidak terealisasi dikarenakan pada Triwulan IV ada pihak penyedia yang menawarkan Diklat/Bimtek namun anggaran tidak mencukupi	Akan melakukan pendataan secara selektif untuk seluruh ASN Brida yang layak/memenuhi syarat untuk mengikuti Diklat/Bimtek	-
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	1 Paket	-	-	-
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Orang	0 Orang	Realisasi anggaran 0 % dikarenakan anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk ASN Brida yang mengikuti diklat/bimtek.	Untuk pelaksanaan kegiatan ditahun 2025 akan lebih intensif melakukan koordinasi dengan pihak penyelenggara diklat/bimtek sehingga jumlah personel/ASN yang akan mengikuti dapat terfasilitasi	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Layanan	7 Layanan	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9 Paket	9 Paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11 Paket	11 Paket	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4 Paket	4 Paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17 Dokumen	17 Dokumen	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	15 Laporan	-	-	-
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 jenis	2 jenis	-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	138 Unit	138 Unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 jenis	3 jenis	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Laporan	3 Laporan	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Unit	3 Unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7 Unit	7 Unit	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 Unit	10 Unit	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	-	-	-
				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	75 %	78 %	Terdapat beberapa Kegiatan/Sub Kegiatan realisasi anggaran tidak mencapai 90-100 % yang dikarenakan : Anggaran belanja Mamin Rapat dan cetak sudah sesuai dengan kebutuhan terdapat perubahan pelaksanaan dimana sesuai dengan rencana adalah rapat/sosialisasi secara offline ada perubahan menjadi secara online (berupa Podcase).	Untuk kegiatan berikutnya/tahun 2025 anggaran yang sudah tersedia akan dipergunakan sesuai dengan pelaksanaan kegiatan dimana sesudah pelaksanaan Podcase akan dilakukan Rakor Evaluasi secara offline terhadap pelaksanaan Podcase	-
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	2 Laporan	2 Laporan	-	-	-
				Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Laporan	0 Laporan	-	-	-
				Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	1 Laporan	0 Laporan	-	-	-
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	11 Laporan	11 Laporan	-	-	-
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	-
				Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-
				Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	5 Dokumen	6 Dokumen	-	-	-
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	3 Laporan	3 Laporan	-	-	-
				Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	-
				Pengembangan Inovasi dan Teknologi	2 Laporan	2 Laporan	-	-	-
				Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan	0 Laporan	1. Komitmen pimpinan OPD terhadap pengembangan dan keberlanjutan inovasi OPD 2. Kurangnya partisipasi masyarakat untuk berkreasi menciptakan inovasi serta rendahnya pemahaman bagi masyarakat akan manfaat dari inovasi	1. Adanya Indeks Inovasi daerah yang memicu implementasi inovasi daerah 2. Koordinasi dan sinkronisasi ke seluruh OPD terkait inovasi yang telah diciptakan agar tetap berkelanjutan demi terciptanya pelayanan publik yang semakin maju	-
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	-	-	-	-				
37	INSPEKTORAT DAERAH	INSPEKTORAT DAERAH	1. Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/434/KEP/435.013/2024 tentang Program Kerja Pengawasan Berbasis Risiko Pada Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2023	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	95 %	50 %	-	-	-
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	-
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/bulan	72 Orang/bulan	-	-	-
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	-	-	-
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen	-	-	-
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	6 Laporan	-	-	-
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	72 Paket	72 Paket	-	-	-
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	72 Dokumen	72 Dokumen	-	-	-
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	72 Dokumen	20 Dokumen	-	-	-
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	35 Orang	46 Orang	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	10 jenis	10 jenis	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15 Paket	15 Paket	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20 Paket	20 Paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10 Paket	10 Paket	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20 Paket	20 Paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15 Dokumen	15 Dokumen	-	-	-
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	10 Laporan	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan	45 Laporan	-	-	-
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10 Dokumen	10 Dokumen	-	-	-
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	14 Dokumen	14 Dokumen	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Unit	1 Unit	-	-	-
				Pengadaan Mebel	1 Unit	1 Unit	-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Unit	1 Unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	3 Laporan	-	-	-
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2129 Laporan	2129 Laporan	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	1 Unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	0 Unit	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Unit	0 Unit	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	-	-	-
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	75 %	95 %	-	-	-
				Penyelenggaraan Pengawasan Internal	80 %	90 %	-	-	-
				Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	100 Laporan	100 Laporan	-	-	-
				Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	130 Laporan	130 Laporan	-	-	-
				Reviu Laporan Kinerja	56 Laporan	56 Laporan	-	-	-
				Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
				Pengawasan Desa	60 Laporan	60 Laporan	-	-	-
				Kerja Sama Pengawasan Internal	4 Kesepakatan		-	-	-
				Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
				Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	83 %	83 %	-	-	-			
				Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	14 Laporan	14 Laporan	-	-	-			
				Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	18 Laporan	18 Laporan	-	-	-			
				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	85 %	90 %	-	-	-			
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	28 Laporan	28 Laporan	-	-	-			
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	13 Rekomendasi	13 Rekomendasi	-	-	-			
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	13 Rekomendasi	13 Rekomendasi	-	-	-			
				Pendampingan dan Asistensi	95 %	95 %	-	-	-			
				Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	24 perangkat daerah	24 perangkat daerah	-	-	-			
				Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	18 perangkat daerah	18 perangkat daerah	-	-	-			
				Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	21 Kegiatan	21 Kegiatan	-	-	-			
				Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	25 perangkat daerah	25 perangkat daerah	-	-	-			
				38	KECAMATAN	KECAMATAN BLUTO		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	94,04 %	-	-
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Dokumen	24 Dokumen	-					-	-			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	-					-	-			
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen	-					-	-			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20 Dokumen	4 Dokumen	-					-	-			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	21 Orang/bulan	-					-	-			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	3 Laporan	-					-	-			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	-					-	-			
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	30 Paket	27 Paket	-					-	-			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	-					-	-			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	-					-	-			
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	1 Paket	-					-	-			
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Paket	12 Paket	-					-	-			
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Dokumen	12 Dokumen	-					-	-			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3 Laporan	-					-	-			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Unit	12 Unit	-					-	-			
Pengadaan Mebel	4 Unit	4 Unit	-					-	-			
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Unit	2 Unit	-					-	-			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	-					-	-			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3 Laporan	-					-	-			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 Laporan	9 Laporan	-					-	-			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36 Laporan	9 Laporan	-					-	-			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	136 M2	136 M2	-					-	-			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8 Unit	2 Unit	-					-	-			
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Unit	13 Unit	-			-		-				
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	2 Unit	-			-		-				
KECAMATAN KOTA SUMENEP						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		85 %	84,4 %	-	-	-
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6 dokumen	6 dokumen	-	-	-
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 laporan	12 laporan	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	150 Orang/bulan	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 jenis	1 jenis	-	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	30 Paket	30 Paket	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 jenis	4 jenis	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 Paket	4 Paket	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9 Paket	8 Paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2 Paket	2 Paket	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4 Paket	4 Paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20 unit	8 unit	-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8 Unit	8 Unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 jenis	3 jenis	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 unit	6 unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	0,25 Unit	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20 Unit	13 Unit	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	2 Unit	-	-	-
		KECAMATAN KALIANGET		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	100 %	-	-	-
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	6 Laporan	-	-	-
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14 Laporan	14 Laporan	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Jenis	2 Jenis	-	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	60 Paket	60 Paket	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	72 Jenis	72 Jenis	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	98 Paket	98 Paket	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	122 Paket	122 Paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	485 Paket	485 Paket	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4800 Paket	4800 Paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13 Dokumen	13 Dokumen	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8 Unit	8 Unit	-	-	-
				Pengadaan Mebel	4 Unit	4 Unit	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Unit	1 Unit	-	-	-
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	3 Unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48 Kali	48 Kali	-	-	-
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 Laporan	9 Laporan	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39 Unit	39 Unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24 Unit	24 Unit	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Unit	12 Unit	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	0 Unit	-	-	-
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	100 %	-	-	-
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	-	-	-
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-		
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	16 Orang/bulan	-	-	-		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Jenis	2 Jenis	-	-	-		
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	23 Paket	23 Paket	-	-	-		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Jenis	5 Jenis	-	-	-		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 Paket	2 Paket	-	-	-		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Paket	2 Paket	-	-	-		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2 Paket	2 Paket	-	-	-		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3 Paket	3 Paket	-	-	-		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5 Unit	5 Unit	-	-	-		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Unit	5 Unit	-	-	-		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Jenis	3 Jenis	-	-	-		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24 Laporan	24 Laporan	-	-	-		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24 Laporan	24 Laporan	-	-	-		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21 Unit	21 Unit	-	-	-		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	1 Unit	-	-	-		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16 Unit	16 Unit	-	-	-		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 Unit	4 Unit	-	-	-		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	100 %	-	-	-		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	13 Dokumen	-	-	-		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	13 Dokumen	-	-	-		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20 Dokumen	7 Dokumen	-	-	-		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	3 Orang/bulan	-	-	-				
		KECAMATAN MANDING							

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Bulan	1 Bulan	-	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	30 Paket	30 Paket	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	1 Paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	1 Paket	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5 Unit	5 Unit	-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Unit	5 Unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2000 Laporan	2000 Laporan	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Laporan	3 Laporan	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7 Laporan	7 Laporan	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	256 M2	16,38 M2	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4 Unit	4 Unit	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9 Unit	9 Unit	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 Unit	3 Unit	-	-	-
		KECAMATAN SARONGGI		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	100 %	-	-	-
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	-	-	-
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	Kendala dalam Penyerapan Anggaran	Meningkatkan kapasitas aparat pemerintah dalam merencanakan dan mengimplementasikan anggaran secara efektif dan efisien.	Progres penyerapan anggaran melalui rapat kerja dan meminta klarifikasi jika ada anggaran yang belum terserap dengan optimal.
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Proses penyusunan dokumen perencanaan yang tidak terstruktur dengan baik atau tidak melibatkan seluruh pihak terkait, menyebabkan ketidaksesuaian antara program yang direncanakan dengan kebutuhan riil di lapangan.	Menyusun pedoman dan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas untuk penyusunan dokumen perencanaan, baik dari segi format, waktu, dan tahapan penyusunan.	Gunakan sistem informasi berbasis teknologi untuk membantu proses penyusunan dokumen, mempermudah akses, dan meningkatkan akurasi data.
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD yang tidak terstruktur atau tidak sesuai dengan pedoman, mengakibatkan kebingungannya alokasi anggaran dan program yang akan dijalankan.	Dalam penyusunan perubahan RKA-SKPD, pastikan bahwa perubahan anggaran didasarkan pada prioritas pembangunan daerah yang telah disepakati. Jika ada perubahan kondisi yang signifikan, pastikan anggaran dapat diubah dengan mempertimbangkan urgensinya.	Setelah perubahan RKA-SKPD disusun, lakukan revisi dan validasi terhadap seluruh program yang ada, pastikan bahwa anggaran dialokasikan dengan tepat dan efisien.
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kekurangan kapasitas atau pemahaman tentang penyusunan DPA-SKPD di kalangan pegawai pemerintah daerah dapat menyebabkan kesalahan atau ketidaksesuaian dalam penyusunan anggaran.	pendampingan teknis bagi SKPD yang belum memiliki pengalaman atau pemahaman yang cukup dalam penyusunan DPA-SKPD. Ini bisa dilakukan oleh tim ahli dari BPKD atau lembaga lainnya yang berkompoten.	Evaluasi efektivitas pelatihan yang telah dilakukan, dan identifikasi kebutuhan pelatihan lanjutan atau penyesuaian untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam penyusunan DPA-SKPD.

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Penyusunan perubahan DPA-SKPD yang tidak terstruktur dengan baik dan tidak mengikuti jadwal yang telah ditetapkan, menyebabkan penundaan dalam pelaksanaan program.	Pastikan perubahan DPA-SKPD disusun dengan mengutamakan prioritas pembangunan daerah yang telah disepakati sebelumnya. Kegiatan yang bersifat mendesak atau prioritas tinggi harus mendapatkan alokasi anggaran yang sesuai, sementara kegiatan lain dapat disesuaikan atau ditunda.	Setelah penyusunan perubahan DPA-SKPD selesai, lakukan evaluasi terhadap tahapan penyusunan untuk mengetahui kendala apa yang muncul dan mencari solusi untuk proses penyusunan yang lebih efisien pada perubahan berikutnya.
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	Data yang tidak akurat atau tidak tersedia dapat menghambat evaluasi kinerja yang efektif.	Pastikan perangkat daerah memiliki akses yang memadai terhadap sistem untuk menginput data kinerja yang dapat digunakan dalam proses evaluasi.	Secara berkala evaluasi sistem dan proses pengumpulan data untuk memastikan data yang digunakan dalam evaluasi kinerja akurat dan tepat waktu.
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	Ketidaksesuaian antara alokasi anggaran dan jumlah gaji serta tunjangan yang dibayarkan kepada ASN dapat menyebabkan keterlambatan atau kesalahan dalam pembayaran.	Pastikan bahwa alokasi anggaran untuk gaji dan tunjangan ASN disusun dengan realistis dan sesuai dengan kebutuhan yang telah diidentifikasi. Anggaran ini harus memadai untuk membayar gaji pokok, tunjangan, dan lainnya secara tepat waktu.	Lakukan monitoring secara berkala terhadap penggunaan anggaran untuk gaji dan tunjangan, dan pastikan alokasi tersebut tidak mengalami kekurangan yang menyebabkan keterlambatan pembayaran.
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semester SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Masalah Koordinasi: Misalnya, ketidakjelasan dalam pembagian tugas antar bagian, komunikasi yang kurang lancar, atau keterlambatan dalam pengumpulan data dari masing-masing unit kerja. Masalah Penyusunan Laporan Keuangan: Termasuk kesalahan dalam pencatatan, kurangnya pemahaman terhadap standar akuntansi pemerintah (SAP), atau kesalahan teknis dalam penggunaan perangkat lunak keuangan.	Mengatasi Masalah Koordinasi: Lakukan rapat koordinasi reguler antara unit keuangan dan bagian lain yang terlibat dalam penyusunan laporan. Rapat ini bisa berupa rapat mingguan atau bulanan untuk memastikan seluruh informasi yang dibutuhkan terkumpul tepat waktu. Mengatasi Masalah Penyusunan Laporan Keuangan : Lakukan pelatihan untuk seluruh staf yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan, baik terkait dengan regulasi, teknik akuntansi, maupun pemahaman terhadap SAP.	Lakukan evaluasi setiap kali laporan selesai disusun. Tinjau apakah laporan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan dan apakah proses penyusunannya berjalan sesuai rencana.
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Jenis	1 Jenis	-	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	25 Paket	25 Paket	Identifikasi Masalah Utama: Keterlambatan Pengadaan, Waktu penyediaan pakaian dinas melebihi jadwal yang direncanakan.	Penyusunan Rencana Anggaran. Hitung estimasi biaya pengadaan berdasarkan spesifikasi yang telah ditentukan.	Mintalah masukan dari pegawai tentang kenyamanan dan kualitas pakaian dinas untuk perbaikan pengadaan berikutnya.
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Jenis	6 Jenis	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	192 Paket	192 Paket	Pemasangan komponen listrik yang tidak standar, berpotensi menyebabkan korsleting. Pencahayaan tidak optimal, terlalu redup untuk kenyamanan kerja.	Penggantian komponen rusak dengan mengganti segera komponen yang rusak dengan produk berkualitas dan sesuai standar.	Kerja sama dengan penyedia profesional: Pastikan hanya menggunakan jasa kontraktor listrik yang memiliki izin resmi dan pengalaman. Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas sistem listrik dan pencahayaan.
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	152 Paket	152 Paket	Manajemen inventaris lemah sehingga tidak ada sistem pencatatan barang yang rapi, sehingga sering terjadi kehilangan atau kerusakan barang.	Susun daftar kebutuhan barang berdasarkan prioritas dan urgensi.	Tetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk proses pengadaan, distribusi, dan perawatan barang. Pastikan semua pegawai memahami SOP tersebut.
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	786 Paket	806 Paket	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	200 Paket	200 Paket	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240 Laporan	240 Laporan	-	-	-			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7 Unit	7 Unit	-	-	-			
				Pengadaan Mebel	25 Unit	25 Unit	-	-	-			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Unit	1 Unit	-	-	-			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Layanan	5 Layanan	-	-	-			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 Laporan	2 Laporan	-	-	-			
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9 Laporan	9 Laporan	-	-	-			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15 Unit	15 Unit	-	-	-			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5 Unit	5 Unit	-	-	-			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33 Unit	33 Unit	-	-	-			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	-	-	-			
				KECAMATAN LENTENG			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	100 %	-	-	-
							Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	24,5 %	-	-	-
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-		
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-		
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-		
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-		
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	-	-	-		
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	3 Orang/bulan	-	-	-		
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3 Laporan	0 Laporan	-	karena pencapaian target sampai dengan triwulan III	akan diperbaiki ditahun yang akan datang		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	-	-	-		
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 Paket	3 Paket	-	-	-		
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Paket	12 Paket	-	-	-		
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-		
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3 Laporan	-	-	-		
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	3 Dokumen	-	-	-		
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	-	-	-		
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 Unit	0 Unit	-	-	-		
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	-	-	-		
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	437 Laporan	142 Laporan	-	-	-		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-				
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	110 Laporan	30 Laporan	-	-	-				
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 Laporan	4 Laporan	-	-	-				
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	-	-	-				
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4 Unit	1 Unit	-	-	-				
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30 Unit	5 Unit	-	-	-				
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 Unit	3 Unit	-	-	-				
		KECAMATAN GILIGENTING	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	100 %	-	-	-				
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	-	-	-				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14 Laporan	14 Laporan	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	2 Laporan	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15 Jenis	15 Jenis	-	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	15 Paket	15 Paket	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Jenis	6 Jenis	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 Paket	2 Paket	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Paket	3 Paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Paket	16 Paket	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Paket	16 Paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	16 Laporan	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7 Unit	7 Unit	-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7 Unit	7 Unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Layanan	5 Layanan	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 Laporan	2 Laporan	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	16 Laporan	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15 Unit	15 Unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Unit	16 Unit	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Unit	1 Unit	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	-	-	-
		KECAMATAN GULUK-GULUK		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	100 %	-	-	-
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 dok	7 dok	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4 Dokumen	5 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	6 Laporan	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 laporan	2 laporan	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	56 Orang/bulan	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 jenis	2 jenis	-	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	18 Paket	18 Paket	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 jenis	6 jenis	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6 Paket	6 Paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Paket	12 Paket	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Paket	12 Paket	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6 unit	6 unit	-	-	-
				Pengadaan Mebel	2 Unit	2 Unit	-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Unit	1 Unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 jenis	4 jenis	-	-	-
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Laporan	6 Laporan	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47 unit	47 unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6 Unit	6 Unit	-	-	-
				Pemeliharaan Mebel	6 Unit	6 Unit	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 Unit	6 Unit	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8 Unit	8 Unit	-	-	-
			KECAMATAN GANDING	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	99,39 %	-	-	-
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokuman	8 Dokuman	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20 Jenis Laporan	20 Jenis Laporan	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	216 Orang/bulan	216 Orang/bulan	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	24 Laporan	24 Laporan	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Jenis	6 Jenis	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	303 Paket	303 Paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7968 Paket	7968 Paket	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14998 Paket	14998 Paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	133 Laporan	133 Laporan	-	-	-
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	158 Dokumen	158 Dokumen	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Unit	4 Unit	-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9 Unit	9 Unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7 Jenis Layanan	7 Jenis Layanan	-	-	-
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	60 Laporan	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	514 Laporan	514 Laporan	-	-	-
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1215 Laporan	1215 Laporan	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35 Unit	35 Unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Unit	12 Unit	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28 Unit	28 Unit	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	425 Unit	425 Unit	-	-	-
			KECAMATAN PRAGAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	99,99 %	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	-	-	-
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	20 Laporan	20 Laporan	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Jenis	1 Jenis	-	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	17 Paket	17 Paket	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	27,261 Jenis	27261 Jenis	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	178 Paket	178 Paket	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	124 Paket	124 Paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15616 Paket	15616 Paket	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10800 Paket	10800 Paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	531 Laporan	531 Laporan	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5 Unit	5 Unit	-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Unit	5 Unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 Layanan	6 Layanan	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24 Laporan	24 Laporan	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	96 Laporan	96 Laporan	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20 Unit	20 Unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 Unit	5 Unit	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Unit	12 Unit	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 Unit	3 Unit	-	-	-
		KECAMATAN RUBARU		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	100 %	-	-	-
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	-	-	-
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	25 %	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	-	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	2 Paket	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9 Paket	2 Paket	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Paket	12 Paket	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Paket	12 Paket	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	2 Paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24 Dokumen	24 Dokumen	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 unit	100 unit	-	-	-
				Pengadaan Mebel	7 Unit	7 Unit	-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Unit	2 Unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	3 Laporan	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6 Unit	6 Unit	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14 Unit	14 Unit	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 Unit	0 Unit	-	-	-
		KECAMATAN AMBUNTEN		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	100 %	-	-	-
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	-	-	-
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15 Dokumen	15 Dokumen	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Jenis	1 Jenis	-	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	26 Paket	26 Paket	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Jenis	6 Jenis	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 Paket	4 Paket	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Paket	4 Paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4 Paket	4 Paket	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4 Paket	4 Paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	183 Laporan	183 Laporan	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5 Unit	7 Unit	-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Unit	7 Unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Jenis	2 Jenis	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24 Laporan	24 Laporan	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20 Unit	20 Unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 Unit	3 Unit	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15 Unit	15 Unit	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	2 Unit	-	-	-
		KECAMATAN PASONGSONGAN		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	100 %	-	-	-
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Sering kali terdapat perubahan kebijakan atau regulasi yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan. Hal ini dapat menyebabkan penundaan atau bahkan pembatalan kegiatan yang sudah direncanakan, sehingga berdampak pada rendahnya serapan anggaran.	Mengoptimalkan koordinasi antara instansi terkait (dinas, Bappeda, keuangan, dll.) agar pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran bisa berjalan lebih lancar.	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Pada triwulan IV, sering kali ada keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perencanaan yang kurang matang. Keterlambatan ini menghambat penyerapan anggaran dan dapat mempengaruhi pencapaian target kegiatan.	Menyusun jadwal kegiatan yang dapat diselesaikan sebelum akhir tahun anggaran untuk menghindari keterlambatan yang bisa menghambat penyerapan anggaran.	-
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18 Laporan	18 Laporan	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan	52 Orang/bulan	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Jenis	1 Jenis	-	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	2 Paket	Ketika perubahan ini terjadi mendekati akhir tahun anggaran, proses penyesuaian, seperti revisi dokumen anggaran, pemutakhiran rencana kerja, dan pengajuan perubahan ke tingkat yang lebih tinggi, memakan waktu. Akibatnya, penyerapan anggaran terhambat karena terlambatnya revisi yang disetujui.	Diperlukan upaya percepatan dalam proses revisi anggaran, optimalisasi koordinasi antarunit terkait, serta penyediaan sistem pengawasan yang lebih baik agar perubahan anggaran dapat direpons dengan cepat dan tepat, sehingga penyerapan anggaran dapat maksimal.	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	169 unit	169 unit	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9 Paket	9 Paket	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Paket	12 Paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Paket	12 Paket	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	2 Paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24 Dokumen	24 Dokumen	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	109 Laporan	109 Laporan	-	-	-
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2000 Dokumen	2000 Dokumen	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25 Unit	25 Unit	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pengadaan Mebel	11 Unit	11 Unit	Keterlambatan dari pihak penyedia mebel	Implementasi sistem pengawasan yang ketat terhadap jadwal dan pelaksanaan pengadaan juga sangat penting agar keterlambatan dapat diminimalisir	
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14 Unit	14 Unit	Keterlambatan pencairan anggaran	Rencana kebutuhan harus disusun sejak awal tahun anggaran dengan memperhatikan spesifikasi teknis yang jelas	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Jenis	2 Jenis	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23 Unit	23 Unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6 Unit	6 Unit	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14 Unit	14 Unit	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 Unit	3 Unit	-	-	-
		KECAMATAN DASUK		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	100 %	-	-	-
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	-	-	-
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Laporan	24 Laporan	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	25 %	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	156 Orang/bulan	39 Orang/bulan	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	-	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	20 Paket	17 Paket	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persentase	100 persentase	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Paket	12 Paket	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25 Paket	25 Paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32 Paket	32 Paket	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Paket	12 Paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persentase	100 Persentase	-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16 Unit	16 Unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persentase	100 Persentase	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persentase	100 Persentase	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8 Unit	8 Unit	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7 Unit	7 Unit	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5 Unit	5 Unit	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1		KECAMATAN BATANG-BATANG		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	100 %	-	-	-		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	-	-	-		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	-	-	-		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	-		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen	-	-	-		
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-		
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	-		
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	-	-	-		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	108 Orang/bulan	-	-	-		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6 Laporan	6 Laporan	-	-	-		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3 Jenis	3 Jenis	-	-	-		
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	27 Paket	27 Paket	-	-	-		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Jenis	6 Jenis	-	-	-		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 Paket	4 Paket	-	-	-		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Paket	12 Paket	-	-	-		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Paket	12 Paket	-	-	-		
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17 Laporan	17 Laporan	-	-	-		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7 Unit	7 Unit	-	-	-		
				Pengadaan Mebel	6 Unit	6 Unit	-	-	-		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Unit	12 Unit	-	-	-				
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Layanan	5 Layanan	-	-	-				
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-				
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15 Unit	15 Unit	-	-	-				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14 Unit	14 Unit	-	-	-				
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 Unit	6 Unit	-	-	-				
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4 Unit	4 Unit	-	-	-				
		KECAMATAN BATUPUTIH				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	100 %	-	-	-
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	-	-	-
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	-
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen					1 Dokumen	-	-	-		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan					4 Laporan	-	-	-		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun					1 Tahun	-	-	-		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	280 Orang/bulan					280 Orang/bulan	-	-	-		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25 buah					25 buah	-	-	-		
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	25 Paket					25 Paket	-	-	-		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 kali					100 kali	-	-	-		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	38 Paket	38 Paket	-	-	-						
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36 Paket	36 Paket	-	-	-						
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	-	-	-						
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25 Unit	25 Unit	-	-	-						

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Unit	3 Unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1 Tahun	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Laporan	3 Laporan	-	-	-
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25 Laporan	25 Laporan	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 Laporan	4 Laporan	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7 unit	7 unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8 Unit	8 Unit	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16 Unit	16 Unit	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	23 Unit	23 Unit	-	-	-
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	88 %	-	-	-
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 dokumen	99 dokumen	-	-	-		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24 bulan	87 bulan	-	-	-		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	336 Orang/bulan	-	-	-		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	20 Laporan	20 Laporan	-	-	-		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	26 stel	99 stel	-	-	-		
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	27 Paket	27 Paket	-	-	-		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Paket	91 Paket	-	-	-		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15 Paket	0 Paket	-	-	-		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Paket	10 Paket	-	-	-		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26 Paket	26 Paket	-	-	-		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24 Dokumen	24 Dokumen	-	-	-		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	204 Laporan	204 Laporan	-	-	-		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 unit	99 unit	-	-	-		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7 Unit	7 Unit	-	-	-		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 unit	93 unit	-	-	-		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 unit	99 unit	-	-	-		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Unit	12 Unit	-	-	-		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	2 Unit	-	-	-		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	100 %	-	-	-		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25 Dokumen	25 Dokumen	-	-	-		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	-				
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-				
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-				
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-				
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	-	-	-				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24 Laporan	6 Laporan	-	-	-				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1226864 Orang/bulan	362864133 Orang/bulan	-	-	-				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	-	-	-				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Jenis	2 Jenis	-	-	-	
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	20 Paket	16 Paket	-	-		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 Unit	4 Unit	-	-		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Paket	12 Paket	-	-		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28 Paket	26 Paket	-	-		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3 Paket	3 Paket	-	-		
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	2 Paket	-	-		
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24 Dokumen	24 Dokumen	-	-		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	150 Laporan	-	-		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7 Unit	7 Unit	-	-		
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Unit	5 Unit	-	-		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Jenis	2 Jenis	-	-		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24 Laporan	18 Laporan	-	-		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36 Laporan	36 Laporan	-	-		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Unit	4 Unit	-	-		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4 Unit	4 Unit	-	-		
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15 Unit	13 Unit	-	-		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	2 Unit	-	-		
		KECAMATAN GAYAM			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	100 %	-	-	-
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	-	-				
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-				
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-				
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-				
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-				
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-				
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	-	-				
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	-	-				
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	-	-				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	-	-				
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Jenis	2 Jenis	-	-				
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	50 Paket	50 Paket	-	-				
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Jenis	6 Jenis	-	-				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	178 Paket	178 Paket	-	-						
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	124 Paket	124 Paket	-	-						
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15,616 Paket	15,616 Paket	-	-						
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10800 Paket	10800 Paket	-	-						
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-						
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	24 Laporan	-	-						
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5 Unit	5 Unit	-	-						
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Unit	5 Unit	-	-						
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Layanan	5 Layanan	-	-						
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 Laporan	36 Laporan	-	-						
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	-	-						
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15 Unit	15 Unit	-	-						

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		KECAMATAN NONGGUNONG		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 Unit	5 Unit	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8 Unit	8 Unit	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 Unit	3 Unit	-	-	-
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	100 %	-	-	-
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	98 %	98 %	-	-	-
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	98 %	98 %	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	Permasalahan. Masih terdapat sebagian Anggaran yang tidak di realisasikan	Upaya Mengatasi Permasalahan. Harus mengisi kekosongan di beberapa jabatan Eselon IV (Kasi) sebanyak 2 Jabatan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD. Sudah Melakukan Permohonan Pengisian Jabatan ke BKBSDM Kab. Sumenep.
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	98 %	100 %	-	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	0 Paket	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	98 %	98 %	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15 Paket	15 Paket	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Paket	10 Paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26 Paket	26 Paket	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	204 Laporan	204 Laporan	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	98 %	99 %	-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Unit	4 Unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98 %	98 %	-	-	-
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98 %	98 %	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13 Unit	13 Unit	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	2 Unit	-	-	-
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	100 %	-	-	-
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-				
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-				
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	-	-	-				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	-	-	-				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-				
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3 Jenis	3 Jenis	-	-	-				
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	20 Paket	20 Paket	-	-	-				
		KECAMATAN RAAS							

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Jenis	6 Jenis	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	192 Paket	192 Paket	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	152 Paket	152 Paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	786 Paket	589 Paket	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	200 Paket	200 Paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240 Laporan	240 Laporan	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7 Unit	7 Unit	-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Unit	3 Unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Layanan	5 Layanan	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 Laporan	6 Laporan	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15 Unit	10 Unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33 Unit	33 Unit	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33 Unit	33 Unit	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	2 Unit	-	-	-
		KECAMATAN MASALEMBU		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	100 %	-	-	-
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	-	-	-
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang/bulan	10 Orang/bulan	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	20 Laporan	20 Laporan	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3 Jenis	3 Jenis	-	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	15 Paket	15 Paket	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Jenis	6 Jenis	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	178 Paket	178 Paket	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	124 Paket	124 Paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15,572 Paket	15,572 Paket	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10,800 Paket	10,800 Paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	495 Laporan	495 Laporan	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7 Unit	7 Unit	-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29 Unit	29 Unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Layanan	5 Layanan	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 Laporan	36 Laporan	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60 Laporan	60 Laporan	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15 Unit	15 Unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 Unit	5 Unit	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 Unit	6 Unit	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 Unit	3 Unit	-	-	-
		KECAMATAN ARJASA		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	100 %	-	-	-
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	-	-	-
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	20 Laporan	20 Laporan	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3 Jenis	3 Jenis	-	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	27 Paket	27 Paket	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Jenis	6 Jenis	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	178 Paket	178 Paket	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	124 Paket	124 Paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15560 Paket	15560 Paket	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10800 Paket	10800 Paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	560 Laporan	560 Laporan	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7 Unit	7 Unit	-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8 Unit	8 Unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Layanan	5 Layanan	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 Laporan	36 Laporan	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3 Laporan	3 Laporan	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15 Unit	15 Unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 Unit	5 Unit	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8 Unit	8 Unit	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 Unit	3 Unit	-	-	-
		KECAMATAN SAPEKEN		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	95,42 %	-	-	-
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	-	-	-
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20 Dokumen	20 Dokumen	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/bulan	80 Orang/bulan	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Bulan	1 Bulan	-	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	12 Paket	12 Paket	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15 Paket	15 Paket	-	-	-			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Paket	10 Paket	-	-	-			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26 Paket	26 Paket	-	-	-			
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4700 Paket	4700 Paket	-	-	-			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24 Dokumen	24 Dokumen	-	-	-			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	204 Laporan	204 Laporan	-	-	-			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8 Unit	8 Unit	-	-	-			
				Pengadaan Mebel	4 Unit	4 Unit	-	-	-			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Unit	4 Unit	-	-	-			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6 Laporan	6 Laporan	-	-	-			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6 Laporan	6 Laporan	-	-	-			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4 Unit	4 Unit	-	-	-			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Unit	4 Unit	-	-	-			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4 Unit	4 Unit	-	-	-			
				KECAMATAN BATUAN			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	100 %	-	-	-
							Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	-	-	-
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	-	-	-
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	-	-	-
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persentase	100 persentase	-	-	-
							Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	27 Paket	27 Paket	-	-	-
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 unit	5 unit	-	-	-
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9 Paket	9 Paket	-	-	-
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20 Paket	20 Paket	-	-	-
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27 Paket	27 Paket	-	-	-
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-				
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140 Laporan	8 Laporan	-	-	-				
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 unit	2 unit	-	-	-				
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Unit	2 Unit	-	-	-				
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persentase	100 persentase	-	-	-				
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1400 Laporan	1400 Laporan	-	-	-				
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 Laporan	2 Laporan	-	-	-				
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persentase	100 persentase	-	-	-				
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	1 Unit	-	-	-				
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14 Unit	14 Unit	-	-	-				
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	2 Unit	-	-	-				
		KECAMATAN KANGAYAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	80 %	-	-	-				
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 Dokumen	80 Dokumen	-	-	-				
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	-	-	-				
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-				
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-				
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-				
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-				
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20 Dokumen	20 Dokumen	-	-	-				
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	-	-	-				
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-				
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	99 Bulan	-	-	-				
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	12 Paket	99 Paket	-	-	-				
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Bulan	80 Bulan	-	-	-				
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	192 Paket	192 Paket	-	-	-				
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	152 Paket	152 Paket	-	-	-				
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	786 Paket	786 Paket	-	-	-				
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	200 Paket	200 Paket	-	-	-				
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-				
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240 Laporan	240 Laporan	-	-	-				
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8 Unit	99 Unit	-	-	-				
				Pengadaan Mebel	1 Unit	1 Unit	-	-	-				
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Unit	2 Unit	-	-	-				
				Pengadaan Aset Tetap Lainnya	1 Unit	5 Unit	-	-	-				
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	80 Bulan	-	-	-				
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 Laporan	2 Laporan	-	-	-				
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6 Laporan	6 Laporan	-	-	-				
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	128 M2	99 M2	-	-	-				
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5 Unit	5 Unit	-	-	-				
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33 Unit	33 Unit	-	-	-				
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	-	-	-				
				KECAMATAN BLUTO			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100 %	100 %	-	-	-	-
							Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	500 Dokumen	732 Dokumen	-	-	-	-
							Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-	-
				KECAMATAN KOTA SUMENEP			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100 %	100 %	-	-	-	-
							Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	2400 dokumen	2400 dokumen	-	-	-	-
							Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-	-
KECAMATAN KALIANGET			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100 %	100 %	-	-	-	-				
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-	-				
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-	-				
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-	-				
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-	-				
KECAMATAN TALANGO			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100 %	100 %	-	-	-	-				
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-	-				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-	
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-	
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-	
				KECAMATAN MANDING	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100 %	100 %	-	-	-
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
				KECAMATAN SARONGGI	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100 %	100 %	-	-	-
					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
					Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	4 Laporan	-	-	-
				KECAMATAN LENTENG	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100 %	100 %	-	-	-
					Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	4 kali	4 kali	-	-	-
				KECAMATAN GILIGENTING	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	60 dokumen	30 dokumen	-	-	-
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	286 Laporan	143 Laporan	-	-	-
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100 %	100 %	-	-	-
				KECAMATAN GULUK-GULUK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Kali	4 Kali	-	-	-
					Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	60 Dokumen	60 Dokumen	-	-	-
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	60 Dokumen	60 Dokumen	-	-	-
				KECAMATAN GANDING	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	95 skor	90 skor	-	-	-
					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	36 kali	36 kali	-	-	-
					Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	2 Laporan	-	-	-
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	350 laporan	350 laporan	-	-	-
				KECAMATAN PRAGAAN	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100 %	99 %	-	-	-
					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Kali	4 Kali	-	-	-
					Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
				KECAMATAN PRAGAAN	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	60 Dokumen	60 Dokumen	-	-	-
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	60 Laporan	60 Laporan	-	-	-
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100 %	100 %	-		-	-				
KECAMATAN PRAGAAN	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Kali	4 Kali	-	-	-				
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	4 Laporan	-	-	-				
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
		KECAMATAN RUBARU		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100 %	100 %	-	-	-
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	-	-	-
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	4 Laporan	-	-	-
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	100 %	-	-	-
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
		KECAMATAN AMBUNTEN		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100 %	100 %	-	-	-
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Kali	12 Kali	-	-	-
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	400 Dokumen	400 Dokumen	-	-	-
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	400 Laporan	400 Laporan	-	-	-
		KECAMATAN PASONGSONG		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100 %	64,84 %	-	-	-
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	-	-	-
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	2 Laporan	Kurangnya SDM yang memahami peran dan tanggung jawab masing-masing atau kurangnya kemampuan dalam menjalin komunikasi lintas instansi menjadi hambatan dalam mempercepat koordinasi	Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan yang relevan untuk memperkuat kapasitas koordinasi dan komunikasi lintas instansi.	-
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
		KECAMATAN DASUK		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100 %	100 %	-	-	-
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 kali	4 kali	-	-	-
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	4 Laporan	-	-	-
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 dokumen	100 dokumen	-	-	-
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	8 Laporan	8 Laporan	-	-	-
		KECAMATAN BATANG-BATANG		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100 %	100 %	-	-	-
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Kali	4 Kali	-	-	-
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	60 Dokumen	60 Dokumen	-	-	-
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	6 Laporan	0 Laporan	-	-	-
		KECAMATAN BATUPUTIH		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100 %	100 %	-	-	-
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	12 Laporan	0 Laporan	-	-	-
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	12 Laporan	0 Laporan	-	-	-
		KECAMATAN GAPURA		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100 %	80 %	-	-	-
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-	
				Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-	
				KECAMATAN DUNGKEK	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100 %	100 %	-	-	-
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	14 Dokumen	14 Dokumen	-	-	-	
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	14 Dokumen	14 Dokumen	-	-	-	
				KECAMATAN GAYAM	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100 %	100 %	-	-	-
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Kali	1 Kali	-	-	-	
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6 Laporan	6 Laporan	-	-	-	
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	3 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	1 Laporan	0 Laporan	-	-	-	
				KECAMATAN NONGGUNONG	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100 %	100 %	-	-	-
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-	
				Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-	
				KECAMATAN RAAS	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100 %	100 %	-	-	-
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Kali	4 Kali	-	-	-	
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	4 Laporan	-	-	-	
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	60 Dokumen	60 Dokumen	-	-	-	
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-	
				KECAMATAN MASALEMBU	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100 %	100 %	-	-	-
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Kali	4 Kali	-	-	-	
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6 Laporan	6 Laporan	-	-	-	
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	60 Dokumen	60 Dokumen	-	-	-	
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-	
				KECAMATAN ARJASA	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100 %	100 %	-	-	-
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Kali	4 Kali	-	-	-	
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6 Laporan	6 Laporan	-	-	-	
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	60 Dokumen	60 Dokumen	-	-	-	
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-	
				KECAMATAN SAPEKEN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100 %	99,92 %	-	-	-
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-	
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-					
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-					
Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-					
KECAMATAN BATUAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100 %	100 %	-	-	-				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
		KECAMATAN KANGAYAN		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100 %	99 %	-	-	-
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	-	-	-
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	4 Laporan	-	-	-
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
		KECAMATAN BLUTO		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 %	88,06 %	-	-	-
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	20 Lembaga Masyarakat	20 Lembaga Masyarakat	-	-	-
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20 Lembaga Masyarakat	20 Lembaga Masyarakat	-	-	-
				Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	10 Lembaga Masyarakat	10 Lembaga Masyarakat	-	-	-
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
				Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	120 Keluarga	130 Keluarga	-	-	-
		KECAMATAN KOTA SUMENEP		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 %	100 %	-	-	-
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4 Laporan	4 Laporan	-	-	-
				Evaluasi Kelurahan	4 Laporan	4 Laporan	-	-	-
				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	264 Keluarga	264 Keluarga	-	-	-
		KECAMATAN KALIANGET		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 %	100 %	-	-	-
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Lembaga Masyarakat	1 Lembaga Masyarakat	-	-	-
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Masyarakat	7 Lembaga Masyarakat	-	-	-
				Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	3 Laporan	3 Laporan	-	-	-
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	180 Keluarga	180 Keluarga	-	-	-
		KECAMATAN TALANGO		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 %	100 %	-	-	-
				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	546 Laporan	546 Laporan	-	-	-
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	486 Keluarga	486 Keluarga	-	-	-
				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	60 Keluarga	60 Keluarga	-	-	-
		KECAMATAN MANDING		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 %	100 %	-	-	-
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	11 Desa	11 Desa	-	-	-
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	11 Lembaga Masyarakat	11 Lembaga Masyarakat	-	-	-
				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	10 Laporan	10,6 Laporan	-	-	-
				Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	11 Keluarga	11 Keluarga	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		KECAMATAN SARONGGI		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 %	90 %	-	-	-			
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	28 Lembaga Masyarakat	28 Lembaga Masyarakat	-	-	-			
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	14 Lembaga Masyarakat	14 Lembaga Masyarakat	-	-	-			
				Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	28 Lembaga Masyarakat	28 Lembaga Masyarakat	-	-	-			
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	14 Laporan	14 Laporan	-	-	-			
				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	14 Keluarga	14 Keluarga	-	-	-			
				Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	14 Keluarga	14 Keluarga	-	-	-			
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 %	100 %	-	-	-			
		KECAMATAN LENTENG				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 kali	0 kali	-	-	-	
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20 Lembaga Masyarakat	20 Lembaga Masyarakat	-	-	-	
						Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100 %	100 %	-	-	-	
						Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	126 Keluarga	28 Keluarga	-	-	-	
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 %	100 %	-	-	-	
						Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	8 Kali	8 Kali	-	-	-	
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12 Lembaga Masyarakat	12 Lembaga Masyarakat	-	-	-	
						Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	12 Keluarga	12 Keluarga	-	-	-	
		KECAMATAN GILIGENTING				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	12 Keluarga	12 Keluarga	-	-	-	
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	80 %	80 %	-	-	-	
						Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	12 laporan	12 laporan	-	-	-	
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga Masyarakat	4 Lembaga Masyarakat	-	-	-	
						Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	12 laporan	12 laporan	-	-	-	
						Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	4 Lembaga Masyarakat	4 Lembaga Masyarakat	-	-	-	
						Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	-	-	-	
						Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-	
		KECAMATAN GULUK-GULUK				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	12 Keluarga	12 Keluarga	-	-	-	
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 %	100 %	-	-	-	
						Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	14 Kali	14 Kali	-	-	-	
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	14 Lembaga Masyarakat	14 Lembaga Masyarakat	-	-	-	
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	12 Laporan					12 Laporan	-	-	-			
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	80 Keluarga					80 Keluarga	-	-	-			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 %					100 %	-	-	-			
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	14 Kali					14 Kali	-	-	-			
KECAMATAN GANDING				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	14 Lembaga Masyarakat	14 Lembaga Masyarakat	-	-	-			
				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-			
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 %	100 %	-	-	-			
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	14 Kali	14 Kali	-	-	-			
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	14 Lembaga Masyarakat	14 Lembaga Masyarakat	-	-	-			
				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-			
				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	80 Keluarga	80 Keluarga	-	-	-			
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 %	100 %	-	-	-			
KECAMATAN PRAGAAN				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	14 Kali	14 Kali	-	-	-			
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	14 Lembaga Masyarakat	14 Lembaga Masyarakat	-	-	-			
				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-			
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	15 Keluarga	15 Keluarga	-	-	-			
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 %	100 %	-	-	-			
				KECAMATAN RUBARU								

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	11 kali	11 kali	-	-	-	
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	11 Lembaga Masyarakat	11 Lembaga Masyarakat	-	-	-	
				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-	
				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	111 Keluarga	111 Keluarga	-	-	-	
				KECAMATAN AMBUNTEN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 %	100 %	-	-	-
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	15 Kali	15 Kali	-	-	-	
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15 Lembaga Masyarakat	15 Lembaga Masyarakat	-	-	-	
				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-	
				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	360 Keluarga	360 Keluarga	-	-	-	
				KECAMATAN PASONGSONG	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 %	99,34 %	-	-	-
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	20 Laporan	20 Laporan	-	-	-	
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Masyarakat	10 Lembaga Masyarakat	Kekurangan tenaga /SDM yang berkompeten dalam melakukan koordinasi.	Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan yang relevan untuk memperkuat kapasitas koordinasi dan komunikasi.	-	
				Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-	
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-	
				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	10 Laporan	5 Laporan	-	-	-	
				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	500 Keluarga	500 Keluarga	-	-	-	
				KECAMATAN DASUK	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 %	100 %	-	-	-
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	15 kali	15 kali	-	-	-	
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15 Lembaga Masyarakat	15 Lembaga Masyarakat	-	-	-	
				Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	15 lembaga	15 lembaga	-	-	-	
				Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	15 Lembaga Masyarakat	15 Lembaga Masyarakat	-	-	-	
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	15 Laporan	15 Laporan	-	-	-	
				KECAMATAN BATANG-BATANG	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 %	100 %	-	-	-
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	16 Kali	16 Kali	-	-	-	
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12 Lembaga Masyarakat	12 Lembaga Masyarakat	-	-	-	
				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	15 lembaga	15 lembaga	-	-	-	
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	15 Keluarga	15 Keluarga	-	-	-	
				KECAMATAN BATUPUTIH	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 %	100 %	-	-	-
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	14 Lembaga Masyarakat	0 Lembaga Masyarakat	-	-	-	
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	14 Lembaga Masyarakat	0 Lembaga Masyarakat	-	-	-	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	0 Laporan	-	-	-					
KECAMATAN GAPURA	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 %	99 %	-	-	-				
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 kegiatan	0 kegiatan	-	-	-					
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	17 Lembaga Masyarakat	0 Lembaga Masyarakat	-	-	-					
Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	3 kegiatan	98 kegiatan	-	-	-					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-	
				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	17 Laporan	17 Laporan	-	-	-	
				Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	120 Keluarga	120 Keluarga	-	-	-	
				KECAMATAN DUNGKEK	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 %	100 %	-	-	-
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	15 Desa	15 Desa	-	-	-	
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15 Lembaga Kemasyarakatan	15 Lembaga Kemasyarakatan	-	-	-	
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	6 Laporan	-	-	-	
				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	75 Keluarga	75 Keluarga	-	-	-	
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	75 Keluarga	70 Keluarga	-	-	-	
				KECAMATAN GAYAM	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 %	100 %	-	-	-
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	10 Kali	10 Kali	-	-	-	
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	-	-	-	
				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	10 Lembaga	10 Lembaga	-	-	-	
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	11 Keluarga	11 Keluarga	-	-	-	
				KECAMATAN NONGGUNONG	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 %	100 %	-	-	-
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	98 %	98 %	-	-	-	
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	-	-	-	
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-	
				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	6 Laporan	6 Laporan	-	-	-	
				Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	120 Keluarga	120 Keluarga	-	-	-	
				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	50 Keluarga	50 Keluarga	-	-	-	
				KECAMATAN RAAS	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 %	100 %	-	-	-
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	9 Kali	9 Kali	-	-	-	
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	-	-	-	
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	10 Lembaga	10 Lembaga	-	-	-	
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	9 Laporan	9 Laporan	-	-	-	
				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	10 Laporan	10 Laporan	-	-	-	
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	9 Keluarga	9 Keluarga	-	-	-	
				KECAMATAN MASALEMBU	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 %	100 %	-	-	-
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	4 Kali	4 Kali	-	-	-	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	-	-	-					
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	5 Laporan	5 Laporan	-	-	-					
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	5 Keluarga	5 Keluarga	-	-	-					
KECAMATAN ARJASA	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 %	100 %	-	-	-				
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	4 Kali	4 Kali	-	-	-					
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Laporan	6 Laporan	-	-	-					
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	60 Dokumen	60 Dokumen	-	-	-					
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		KECAMATAN SAPEKEN		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 %	99,49 %	-	-	-
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	11 Laporan	99,56 Laporan	-	-	-
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	11 Lembaga Masyarakat	11 Lembaga Masyarakat	-	-	-
				Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	11 Laporan	11 Laporan	-	-	-
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	11 Laporan	11 Laporan	-	-	-
				Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	110 Keluarga	110 Keluarga	-	-	-
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 %	100 %	-	-	-
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	10 Laporan	10 Laporan	-	-	-
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Masyarakat	7 Lembaga Masyarakat	-	-	-		
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	10 Laporan	10 Laporan	-	-	-		
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	7 Keluarga	7 Keluarga	-	-	-		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 %	100 %	-	-	-		
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	9 Laporan	9 Laporan	-	-	-		
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9 Lembaga Masyarakat	9 Lembaga Masyarakat	-	-	-		
		Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	27 lembaga Masyarakat	27 lembaga Masyarakat	-	-	-		
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	9 Laporan	9 Laporan	-	-	-		
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	9 Laporan	9 Laporan	-	-	-		
		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	9 Keluarga	9 Keluarga	-	-	-		
		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100 %	100 %	-	-	-		
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-		
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	-	-	-		
		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100 %	100 %	-	-	-		
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 sektor	4 sektor	-	-	-		
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-		
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-		
		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100 %	100 %	-	-	-		
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	14 Laporan	14 Laporan	-	-	-		
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	9 Laporan	-	-	-		
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	-	-	-		
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100 %	100 %	-	-	-				
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Laporan	2 Laporan	-	-	-				
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-				
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-				
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100 %	100 %	-	-	-				
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Kali	2 Kali	-	-	-				
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				KECAMATAN SARONGGI	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100 %	100 %	-	-
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Laporan	12 Laporan	-	-	
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	
				Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	-	-	
				KECAMATAN LENTENG	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100 %	100 %	-	-
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	13 kali	3 kali	-	-	
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	3 Laporan	-	-	
				Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	1 Laporan	-	-	
				KECAMATAN GILIGENTING	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100 %	100 %	-	-
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	13 Kali	13 Kali	-	-	
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	16 Laporan	-	-	
				Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 Laporan	3 Laporan	-	-	
				KECAMATAN GULUK-GULUK	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	85 %	85 %	-	-
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Laporan	4 Laporan	-	-	
				Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	4 Laporan	-	-	
				KECAMATAN GANDING	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100 %	100 %	-	-
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	13 Kali	13 Kali	-	-	
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	-	-	
				Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5 Laporan	5 Laporan	-	-	
				KECAMATAN PRAGAAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100 %	100 %	-	-
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	15 Kali	15 Kali	-	-	
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	-	-	
				Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 Laporan	3 Laporan	-	-	
				KECAMATAN RUBARU	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100 %	100 %	-	-
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 kali	3 kali	-	-					
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 Laporan	3 Laporan	-	-					
KECAMATAN AMBUNTEN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100 %	100 %	-	-				
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 Kali	3 Kali	-	-					
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 Laporan	3 Laporan	-	-					
KECAMATAN PASONGSONGAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100 %	95,42 %	-	-				
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 Laporan	3 Laporan	-	-					
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 Laporan	3 Laporan	-	-					
KECAMATAN DASUK	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100 %	100 %	-	-				
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	13 kali	13 kali	-	-					
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	-	-					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		KECAMATAN BATANG-BATANG		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100 %	100 %	-	-	-
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	16 Kali	16 Kali	-	-	-
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
				Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	4 Laporan	-	-	-
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100 %	100 %	-	-	-
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	14 Laporan	14 Laporan	-	-	-
				Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	1 Laporan	-	-	-
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100 %	98 %	-	-	-
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 kegiatan	98 kegiatan	-	-	-
				Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	-	-	-
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100 %	100 %	-	-	-
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	15 Kali	15 Kali	-	-	-		
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	9 Laporan	-	-	-		
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	-	-	-		
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100 %	100 %	-	-	-		
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Kali	5 Kali	-	-	-		
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	6 Laporan	-	-	-		
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	-	-	-		
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100 %	100 %	-	-	-		
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	98 %	98 %	-	-	-		
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-		
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	-	-	-		
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100 %	100 %	-	-	-		
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Kali	5 Kali	-	-	-				
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	6 Laporan	-	-	-				
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-				
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100 %	100 %	-	-	-				
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	15 Kali	15 Kali	-	-	-				
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-				
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 Laporan	3 Laporan	-	-	-				
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100 %	100 %	-	-	-				
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	19 Kali	19 Kali	-	-	-				
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	19 Lembaga Kemasyarakatan	19 Lembaga Kemasyarakatan	-	-	-				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 kali	1 kali	-	-	-
		KECAMATAN SAPEKEN		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20 Keluarga	20 Keluarga	-	-	-
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Laporan	2 Laporan	-	-	-
				Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	-	-	-
		KECAMATAN BATUAN		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100 %	100 %	-	-	-
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 kegiatan	4 kegiatan	-	-	-
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
				Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
		KECAMATAN KANGAYAN		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100 %	100 %	-	-	-
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 laporan	1 laporan	-	-	-
				Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
		KECAMATAN BLUTO		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 %	89,75 %	-	-	-
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	3 Laporan	3 Laporan	-	-	-
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	100 Orang	-	-	-
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-
		KECAMATAN KOTA SUMENEP		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 %	100 %	-	-	-
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	30 Orang	30 Orang	-	-	-
				Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	100 Orang	-	-	-
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-
		KECAMATAN KALIANGET		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 %	100,01 %	-	-	-
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	13 Laporan	13 Laporan	-	-	-
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25 Orang	25 Orang	-	-	-
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-
		KECAMATAN TALANGO		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 %	100 %	-	-	-
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	-	-	-
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	500 Orang	500 Orang	-	-	-
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-
		KECAMATAN MANDING		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 %	100 %	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	100 Orang	-	-	-
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-
		KECAMATAN SARONGGI		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 %	100 %	-	-	-
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	14 Laporan	14 Laporan	-	-	-
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	12 Orang	12 Orang	-	-	-
				Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	12 Orang	12 Orang	-	-	-
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-
		KECAMATAN LENTENG		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 %	100 %	-	-	-
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	99,61 %	-	-	-
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	125 Orang	0 Orang	-	-	-
		KECAMATAN GILIGENTING		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 %	100 %	-	-	-
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	12 Dokumen	16 Dokumen	-	-	-
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	100 Orang	-	-	-
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	16 Dokumen	-	-	-
		KECAMATAN GULUK-GULUK		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	90 %	90 %	-	-	-
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	30 Laporan	30 Laporan	-	-	-
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	30 Orang	30 Orang	-	-	-
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-
		KECAMATAN GANDING		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 %	100 %	-	-	-
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	13 Laporan	13 Laporan	-	-	-
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	80 Orang	80 Orang	-	-	-
		KECAMATAN PRAGAAN		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 %	100 %	-	-	-
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	14 Laporan	14 Laporan	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	100 Orang	-	-	-
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-
		KECAMATAN RUBARU		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 %	100 %	-	-	-
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	13 Laporan	13 Laporan	-	-	-
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	100 Orang	-	-	-
		KECAMATAN AMBUNTEN		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 %	50 %	-	-	-
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	13 Laporan	13 Laporan	-	-	-
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	200 Orang	200 Orang	-	-	-
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-
		KECAMATAN PASONGSONG		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 %	99,31 %	-	-	-
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	100 Orang	-	-	-
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-
		KECAMATAN DASUK		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 %	100 %	-	-	-
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	100 Orang	-	-	-
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-
		KECAMATAN BATANG-BATANG		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	100 Orang	-	-	-
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-
		KECAMATAN BATUPUTIH		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 %	100 %	-	-	-
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
				Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	14 Orang	14 Orang	-	-	-
		KECAMATAN GAPURA		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 %	97 %	-	-	-
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	100 Orang	-	-	-
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-
		KECAMATAN DUNGKEK		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 %	100 %	-	-	-
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	-	-	-
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	75 Orang	75 Orang	-	-	-
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	-
		KECAMATAN GAYAM		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 %	100 %	-	-	-
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	0 Orang	-	-	-
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-
		KECAMATAN NONGGUNGONG		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 %	100 %	-	-	-
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25 Orang	25 Orang	-	-	-
				Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	25 Orang	25 Orang	-	-	-
				Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 Orang	50 Orang	-	-	-
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-
		KECAMATAN RAAS		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 %	100 %	-	-	-
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	13 Laporan	13 Laporan	-	-	-
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	100 Orang	-	-	-
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-
		KECAMATAN MASALEMBU		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 %	100 %	-	-	-
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	100 Orang	-	-	-
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-
		KECAMATAN ARJASA		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 %	100 %	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	100 Orang	-	-	-
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 %	99,75 %	-	-	-
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1 Orang	1 Orang	-	-	-
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 %	100 %	-	-	-
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	13 Laporan	13 Laporan	-	-	-
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	60 Orang	60 Orang	-	-	-
				Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	60 Orang	60 Orang	-	-	-
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 %	100 %	-	-	-
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	100 Orang	-	-	-
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100 %	95,38 %	-	-	-
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20 Dokumen	20 Dokumen	-	-	-
				Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100 %	100 %	-	-	-
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	85 %	98,48 %	-	-	-				
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-				
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-				
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-				
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100 %	100 %	-	-	-				
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	-				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
		KECAMATAN TALANGO		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100 %	100 %	-	-	-
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	-
				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 Dokumen	8 Dokumen	-	-	-
				Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	8 Dokumen	8 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	8 Laporan	8 Laporan	-	-	-
		KECAMATAN MANDING		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100 %	100 %	-	-	-
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11 Desa	11 Desa	-	-	-
				Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
		KECAMATAN SARONGGI		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100 %	100 %	-	-	-
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
		KECAMATAN LENTENG		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100 %	100 %	-	-	-
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %	-	-	-
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	20 Dokumen	20 Dokumen	-	-	-
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	20 Dokumen	20 Dokumen	-	-	-
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	-
				Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	5 Dokumen	5 Dokumen	-	-	-
				Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	5 Dokumen	5 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
		KECAMATAN GILIGENTING		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100 %	100 %	-	-	-
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3 Kegiatan	3 Kegiatan	-	-	-
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	8 Dokumen	8 Dokumen	-	-	-
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	8 Dokumen	8 Dokumen	-	-	-
				Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	8 Dokumen	8 Dokumen	-	-	-
		KECAMATAN GULUK-GULUK		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	75 %	75 %	-	-	-
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8 laporan	8 laporan	-	-	-
				Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-
				Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-
		KECAMATAN GANDING		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100 %	99 %	-	-	-
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4 Kegiatan	4 Kegiatan	-	-	-
				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	14 Dokumen	14 Dokumen	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14 Dokumen	14 Dokumen	-	-	-	
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	14 Dokumen	14 Dokumen	-	-	-	
				Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	8 Dokumen	8 Dokumen	-	-	-	
				Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	14 Dokumen	14 Dokumen	-	-	-	
				Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	14 Laporan	14 Laporan	-	-	-	
				KECAMATAN PRAGAAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100 %	100 %	-	-	-
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4 Kegiatan	4 Kegiatan	-	-	-	
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	14 Dokumen	14 Dokumen	-	-	-	
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	14 Dokumen	14 Dokumen	-	-	-	
				Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	14 Dokumen	14 Dokumen	-	-	-	
				Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	14 Laporan	14 Laporan	-	-	-	
				KECAMATAN RUBARU	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100 %	100 %	-	-	-
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11 Orang	11 Orang	-	-	-	
				Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	11 Dokumen	11 Dokumen	-	-	-	
				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11 Dokumen	11 Dokumen	-	-	-	
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11 Dokumen	11 Dokumen	-	-	-	
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	11 Dokumen	11 Dokumen	-	-	-	
				Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	11 Dokumen	11 Dokumen	-	-	-	
				Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	11 Dokumen	11 Dokumen	-	-	-	
				Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	11 Dokumen	11 Dokumen	-	-	-	
				KECAMATAN AMBUNTEN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100 %	100 %	-	-	-
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persentase	100 Persentase	-	-	-	
				Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	15 Dokumen	15 Dokumen	-	-	-	
				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15 Dokumen	15 Dokumen	-	-	-	
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15 Dokumen	15 Dokumen	-	-	-	
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	15 Dokumen	4 Dokumen	-	-	-	
				Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	15 Laporan	15 Laporan	-	-	-	
KECAMATAN PASONGSONGAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100 %	96,3 %	-	-	-				
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	70 Laporan	69 Laporan	-	-	-					
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	10 Dokumen	10 Dokumen	-	-	-					
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10 Dokumen	10 Dokumen	-	-	-					
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10 Dokumen	10 Dokumen	-	-	-					
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	10 Dokumen	19 Dokumen	Keterbatasan dan Kurang SDM di Kecamatan Pasongsongan.	Butuh Penambahan staf/karyawan dengan letak geografis yang sangat sulit.	-					
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10 Dokumen	10 Dokumen	Kurangnya SDM dan Tenaga di Kecamatan Pasongsongan dengan letak geografis yang sangat sulit.	Penambahan SDM yang diperlukan di Kecamatan	-					
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	10 Dokumen	10 Dokumen	-	-	-					
Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	10 Dokumen	10 Dokumen	-	-	-					
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-					
KECAMATAN DASUK	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100 %	100 %	-	-	-				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %	-	-	-			
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-			
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	15 Dokumen	15 Dokumen	-	-	-			
				Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	10 Dokumen	10 Dokumen	-	-	-			
				Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	15 Dokumen	15 Dokumen	-	-	-			
				Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-			
				KECAMATAN BATANG-BATANG	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100 %	100 %	-	-	-	-	-
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3 Kegiatan	3 Kegiatan	-	-	-			
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	16 Dokumen	16 Dokumen	-	-	-			
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	16 Dokumen	16 Dokumen	-	-	-			
				Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	16 Dokumen	16 Dokumen	-	-	-			
				KECAMATAN BATUPUTIH	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100 %	100 %	-	-	-	-	-
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Dokumen	3 Dokumen	-	-	-			
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-			
				Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-			
				KECAMATAN GAPURA	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100 %	99 %	-	-	-	-	-
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3 kegiatan	99 kegiatan	-	-	-			
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-			
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-			
				Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	17 Dokumen	17 Dokumen	-	-	-			
				KECAMATAN DUNGKEK	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100 %	100 %	-	-	-	-	-
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %	-	-	-			
				Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	30 Dokumen	30 Dokumen	-	-	-			
				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15 Dokumen	14 Dokumen	-	-	-			
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15 Dokumen	14 Dokumen	-	-	-			
				Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	15 Dokumen	15 Dokumen	-	-	-			
				KECAMATAN GAYAM	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100 %	100 %	-	-	-	-	-
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3 Kegiatan	3 Kegiatan	-	-	-			
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-							
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-							
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-							
KECAMATAN NONGGUNONG	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100 %	100 %	-	-	-	-	-				
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	98 %	98 %	-	-	-							
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8 Dokumen	8 Dokumen	-	-	-							
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 Dokumen	8 Dokumen	-	-	-							
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8 Dokumen	8 Dokumen	-	-	-							
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	8 Dokumen	8 Dokumen	-	-	-							
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	8 Dokumen	8 Dokumen	-	-	-							
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-							

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	8 Dokumen	8 Dokumen	-	-	-	
				KECAMATAN RAAS	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100 %	100 %	-	-	-
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3 Kegiatan	3 Kegiatan	-	-	-	
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	
				Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	
				Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	
				KECAMATAN MASALEMBU	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100 %	100 %	-	-	-
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3 Kegiatan	3 Kegiatan	-	-	-	
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	-	
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	-	
				Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	8 Dokumen	8 Dokumen	-	-	-	
				KECAMATAN ARJASA	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100 %	100 %	-	-	-
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3 Kegiatan	3 Kegiatan	-	-	-	
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	19 Dokumen	19 Dokumen	-	-	-	
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	19 Dokumen	19 Dokumen	-	-	-	
				Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	19 Dokumen	19 Dokumen	-	-	-	
				KECAMATAN SAPEKEN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100 %	99,98 %	-	-	-
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-	
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	-	
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	-	
				Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	-	
				KECAMATAN BATUAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100 %	100 %	-	-	-
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Prosentase	100 Prosentase	-	-	-	
				Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	
				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	-	
				KECAMATAN KANGAYAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100 %	100 %	-	-	-
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9 Dokumen	9 Dokumen	-	-	-	
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	-	
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	
				Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	3 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	
39	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	93 %	-	-	-	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 Dokumen	14 Dokumen	-	-	-	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	-	-	-	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	4 Dokumen	-	-	-	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	2 Laporan	-	-	-	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	2 Laporan	-	-	-	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Orang	0 Orang	-	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	0 Paket	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	3 Orang	3 Orang	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 Paket	2 Paket	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Paket	2 Paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6 Paket	5 Paket	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40 Paket	30 Paket	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38 Laporan	38 Laporan	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5 Unit	6 Unit	-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 Unit	6 Unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Orang	4 Orang	-	-	-
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2000 Laporan	2000 Laporan	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Laporan	3 Laporan	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20 Unit	20 Unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	13 Unit	13 Unit	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Unit	4 Unit	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	-	-	-
				PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %	99,5 %	-	-	-
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	-	-	-
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	16 Dokumen	16 Dokumen	-	-	-
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	800 Orang	800 Orang	-	-	-
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1200 Orang	1200 Orang	-	-	-
				Pembentukan Paskibraka	150 Orang	150 Orang	-	-	-
				PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100 %	99 %	-	-	-
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	-	-
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	860 Orang	860 Orang	-	-	-
				PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100 %	95 %	-	-	-
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	600 Orang	550 Orang	-	-	-
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4 Laporan	4 Laporan	-	-	-
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	100 %	98 %	-	-	-
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	2 Kegiatan	2 Kegiatan	-	-	-
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	800 Orang	800 Orang	-	-	-
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	725 Orang	725 Orang	-	-	-
				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	100 %	93 %	-	-	-
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	3 Kegiatan	3 Kegiatan	-	-	-
				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	20 Dokumen	20 Dokumen	-	-	-
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	800 Orang	800 Orang	-	-	-
				Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Di antara pranata dan asas negara kesatuan Republik Indonesia yang diabadikan dalam UUD 1945, asas pemerintahan sendiri dan asas pemerintahan bersama mempunyai arti tersendiri. Di antaranya, hakikat otonomi daerah adalah hak masyarakat untuk mengatur keluarganya sendiri secara bebas. Kebebasan pengaturan merupakan bagian dari sistem distribusi kekuasaan, yang dilaksanakan melalui pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah. Sebagai cara pemerintah mengalihkan urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah, desentralisasi kekuasaan selalu ditekankan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tugas Pembantuan adalah bahwa pemerintah yang lebih tinggi mempercayakan kepada unit pemerintah yang lebih rendah untuk menangani urusan yang sebenarnya menjadi kewenangan pemerintah yang lebih tinggi, dan sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah yang berwenang di tingkat yang sama.

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan merupakan cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/ atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum.

Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada kabupaten/kota dan/atau desa meliputi sebagian tugas tugas provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta sebagian tugas pemerintahan dalam bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten dan kota. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada desa mencakup sebagian

tugas-tugas kabupaten/kota di bidang pemerintahan yang menjadi wewenang kabupaten/kota.

4.1. Urusan Pemerintahan yang Ditugas Pembantuan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan disebutkan pada Pasal 11 ayat (1) Pemerintah Pusat dapat menugaskan sebagian Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangannya kepada daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan, dan ayat (2) Pemerintah Daerah provinsi dapat menugaskan sebagian Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangannya kepada daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan.

Tugas pembantuan dapat juga diartikan sebagai tugas pemerintah daerah untuk mengurus urusan pemerintahan pusat atau pemerintah yang lebih tinggi, dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskannya. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum sedangkan Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk

melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Sebagai konsekuensi penyelenggaraan tugas pembantuan ini, pemerintah pusat sebagai pemberi tugas mengalokasikan anggaran serta pedoman pelaksanaannya dari masing-masing Kementerian/Lembaga melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Bendahara Umum Negara) berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada Satuan Kerja (Satker) Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di daerah, demikian pula pemerintah daerah berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaannya kepada pemberi tugas pembantuan.

Dasar hukum penyelenggaraan tugas pembantuan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 908);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa setiap desa, penyaluran dan penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
14. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa kepada setiap Desa Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 Nomor 66).

4.1.1. Identifikasi Tugas Pembantuan urusan Pemerintahan yang diterima dari Pemerintah Tingkat di atasnya

Pada Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Sumenep menerima Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat, yang terdiri dari Dana Dekonsentrasi yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 40.555.790.000,- dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 39.178.450.000,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 96,60 % dan Dana Tugas Pembantuan yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 87.080.000,- dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 86.350.000,- dengan

persentase realisasi keuangan sebesar 99,16%. Anggaran Tugas Pembantuan tersebut dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melalui program : 1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Berkualitas dengan total alokasi anggaran yang diterima sebesar Rp. 301.650.000,- (*Tiga Ratus Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu*), 2) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dengan total alokasi anggaran yang diterima sebesar Rp. 40.555.790.000,- (*Empat Puluh Milyar Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu*), 3) Kegiatan Penyusunan Prognosa Neraca Pangan, kegiatan Pelaporan Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP), kegiatan Penguatan Cadangan Pangan (CPP), kegiatan Fasilitas Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) dengan total alokasi anggaran yang diterima sebesar Rp. 301.650.000,- (*Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Puluh Ribu*).

Alokasi anggaran ini diperuntukkan untuk peningkatan infrastruktur pertanian seperti Pengelolaan Jaringan Irigasi, embung dan dalam rangka memfasilitasi prasarana pasca panen hortikultura untuk mewujudkan penumbuhan/pengembangan UMKM pada pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura. Disamping itu, untuk kegiatan Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian, Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian dan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PSP. Alokasi anggaran serta realisasi Tugas Pembantuan yang diterima Pemerintah Kabupaten Sumenep, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4. 1
Alokasi dan Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program Urusan Pertanian
Tahun 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYE RAPAN (%)	DASAR HUKUM
1	2	3	4	5	6	7
1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran	301.650.000	301.650.000	100	SP DIPA-018.04.4.059 1/2024

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYE RAPAN (%)	DASAR HUKUM
1	2	3	4	5	6	7
		Hasil Hortikultura				
2	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Berkualitas	40.254.140.000	38.876.800.000	96,58	SP DIPA-018.04.4.0591/2023
3	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kegitan Penyusunan Prognosa Neraca Pangan, kegiatan Pelaporan Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP), kegiatan Penguatan Cadangan Pangan (CPP), kegiatan Fasilitas Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA)	87.080.000	86.350.000	96,16	SP DIPA-125.01.3.690703/2024

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYE RAPAN (%)	DASAR HUKUM
1	2	3	4	5	6	7
Total			40.642.870.000	39.264.800.000	96,61	

4.1.2. Identifikasi Tugas Pembantuan urusan Pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan Pemerintahan dibawahnya

Tugas Pembantuan urusan Pemerintahan yang diberikan kepada Pemerintahan desa berupa Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

1. Dana Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen Pemerintah dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Dana Desa diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan. Prioritas Dana Desa dialokasikan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya

Transfer Dana Desa yang diberikan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia untuk 330 desa yang tersebar di 27 Kecamatan Kabupaten Sumenep, sebesar Rp. 363.197.008.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 363.197.008.000,- dengan persentase realisasinya sebesar 100 %.

Pelaksanaan dan penyaluran Dana Desa di Kabupaten Sumenep didasarkan pada peraturan sebagai berikut :

- a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1425);
- b. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 36 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan PertanggungJawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2017 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 82 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 36 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan PertanggungJawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2018 Nomor 82);
- c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
- d. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963).
- e. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sumenep.
- f. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 66 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024.
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Alokasi anggaran serta realisasi Dana Desa yang diterima Pemerintah Kabupaten Sumenep, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2
Alokasi dan Realisasi Anggaran Dana Desa di Kabupaten Sumenep
Tahun 2024

DESA/KECAMATAN		PAGU	REALISASI	CAPAIAN
KOTA SUMENEP				
1	Kolor	1.494.854.000	1.494.854.000	100%
2	Pabian	1.387.417.000	1.387.417.000	100%
3	Marengan Daya	955.696.000	955.696.000	100%
4	Kacongan	1.154.241.000	1.154.241.000	100%
5	Paberasan	1.413.907.000	1.413.907.000	100%
6	Parsanga	1.318.731.000	1.318.731.000	100%
7	Bangkal	883.385.000	883.385.000	100%
8	Kebunan	1.044.683.000	1.044.683.000	100%
9	Pamolokan	1.594.982.000	1.594.982.000	100%
10	Pangarangan	1.274.316.000	1.274.316.000	100%
11	Pandian	1.414.177.000	1.414.177.000	100%
12	Kebunagung	1.317.693.000	1.317.693.000	100%
KALIANGET				
1	Pinggirpapas	1.707.105.000	1.707.105.000	100%
2	Karanganyar	876.758.000	876.758.000	100%
3	Marengan Laok	1.143.351.000	1.143.351.000	100%
4	Kertasada	1.296.185.000	1.296.185.000	100%
5	Kalimook	1.329.198.000	1.329.198.000	100%
6	Kalianget Barat	1.576.548.000	1.576.548.000	100%
7	Kalianget Timur	1.689.037.000	1.689.037.000	100%
MANDING				
1	Kasengan	1.078.591.000	1.078.591.000	100%
2	Lalangon	882.890.000	882.890.000	100%
3	Tenonan	1.058.720.000	1.058.720.000	100%
4	Lanjuk	905.273.000	905.273.000	100%
5	Gadding	1.109.729.000	1.109.729.000	100%
6	Giring	1.188.953.000	1.188.953.000	100%
7	Gunung Kembar	884.412.000	884.412.000	100%
8	Jaba'an	810.239.000	810.239.000	100%
9	Manding Laok	933.353.000	933.353.000	100%
10	Manding Timur	882.333.000	882.333.000	100%
11	Manding Daya	990.405.000	990.405.000	100%
TALANGO				
1	Talango	1.495.082.000	1.495.082.000	100%
2	Padike	1.060.484.000	1.060.484.000	100%
3	Cabbiya	900.579.000	900.579.000	100%
4	Essang	1.111.860.000	1.111.860.000	100%
5	Kombang	933.467.000	933.467.000	100%
6	Poteran	954.849.000	954.849.000	100%
7	Palasa	1.694.788.000	1.694.788.000	100%

DESA/KECAMATAN		PAGU	REALISASI	CAPAIAN
8	Gapurana	1.252.147.000	1.252.147.000	100%
BLUTO				
1	Guluk Manjung	1.064.596.000	1.064.596.000	100%
2	Kapedi	1.632.249.000	1.632.249.000	100%
3	Pakandangan Barat	1.210.167.000	1.210.167.000	100%
4	Pakandangan Tengah	1.077.608.000	1.077.608.000	100%
5	Pakandangan Sangra	811.458.000	811.458.000	100%
6	Aeng Dake	1.250.652.000	1.250.652.000	100%
7	Aeng Baja Kenek	966.938.000	966.938.000	100%
8	Bluto	723.715.000	723.715.000	100%
9	Lobuk	1.428.938.000	1.428.938.000	100%
10	Bumbungan	795.967.000	795.967.000	100%
11	Masaran	953.519.000	953.519.000	100%
12	Palongan	1.056.819.000	1.056.819.000	100%
13	Aeng Baja Raja	767.328.000	767.328.000	100%
14	Karang Campaka	698.619.000	698.619.000	100%
15	Sera Barat	802.301.000	802.301.000	100%
16	Sera Tengah	656.798.000	656.798.000	100%
17	Sera Timur	818.684.000	818.684.000	100%
18	Gingging	778.354.000	778.354.000	100%
19	Errabu	678.411.000	678.411.000	100%
20	Gilang	930.477.000	930.477.000	100%
SARONGGI				
1	Pagar Batu	1.399.301.000	1.399.301.000	100%
2	Tanjung	1.247.965.000	1.247.965.000	100%
3	Kebundadap Timur	937.023.000	937.023.000	100%
4	Langsar	995.023.000	995.023.000	100%
5	Kebundadap Barat	834.054.000	834.054.000	100%
6	Saroka	1.084.074.000	1.084.074.000	100%
7	Tanamerah	1.029.176.000	1.029.176.000	100%
8	Nambakor	802.619.000	802.619.000	100%
9	Saronggi	837.558.000	837.558.000	100%
10	Moangan	934.614.000	934.614.000	100%
11	Juluk	1.043.821.000	1.043.821.000	100%
12	Aengtongtong	746.996.000	746.996.000	100%
13	Talang	1.591.386.000	1.591.386.000	100%
14	Kambingan Timur	787.477.000	787.477.000	100%
LENTENG				
1	Moncek Barat	758.774.000	758.774.000	100%
2	Moncek Tengah	878.865.000	878.865.000	100%
3	Moncek Timur	852.810.000	852.810.000	100%
4	Banaresep Timur	1.305.547.000	1.305.547.000	100%

DESA/KECAMATAN		PAGU	REALISASI	CAPAIAN
5	Tarogan	681.757.000	681.757.000	100%
6	Kambingan Barat	787.237.000	787.237.000	100%
7	Poreh	1.050.649.000	1.050.649.000	100%
8	Lenteng Timur	1.578.207.000	1.578.207.000	100%
9	Lembung Timur	1.050.553.000	1.050.553.000	100%
10	Lenteng Barat	2.234.845.000	2.234.845.000	100%
11	Banaresep Barat	843.186.000	843.186.000	100%
12	Billapora Rebba	1.377.141.000	1.377.141.000	100%
13	Lembung Barat	1.004.611.000	1.004.611.000	100%
14	Ellak Laok	999.257.000	999.257.000	100%
15	Ellak Daya	1.280.983.000	1.280.983.000	100%
16	Daramista	1.057.187.000	1.057.187.000	100%
17	Jambu	651.862.000	651.862.000	100%
18	Cangkreng	802.759.000	802.759.000	100%
19	Meddelan	1.016.637.000	1.016.637.000	100%
20	Sendir	717.655.000	717.655.000	100%
GILI GINTING				
1	Galis	1.014.278.000	1.014.278.000	100%
2	Gedugan	1.099.476.000	1.099.476.000	100%
3	Bringsang	903.229.000	903.229.000	100%
4	Aenganyar	1.058.140.000	1.058.140.000	100%
5	Lombang	1.038.091.000	1.038.091.000	100%
6	Jate	940.590.000	940.590.000	100%
7	Banbaru	1.007.631.000	1.007.631.000	100%
8	Banmaleng	1.232.394.000	1.232.394.000	100%
GULUK- GULUK				
1	Bakeong	1.569.847.000	1.569.847.000	100%
2	Payudan Dundang	964.734.000	964.734.000	100%
3	Pordapor	1.205.045.000	1.205.045.000	100%
4	Guluk-guluk	2.612.028.000	2.612.028.000	100%
5	Ketawang Laok	891.048.000	891.048.000	100%
6	Pananggungan	747.504.000	747.504.000	100%
7	Bragung	1.843.776.000	1.843.776.000	100%
8	Tambuko	981.268.000	981.268.000	100%
9	Payudan Nangger	895.160.000	895.160.000	100%
10	Payudan Daleman	935.218.000	935.218.000	100%
11	Payudan Karangsokon	1.171.794.000	1.171.794.000	100%
21	Batuampar	1.270.753.000	1.270.753.000	100%
GANDING				
1	Bataal Barat	766.575.000	766.575.000	100%
2	Bataal Timur	754.441.000	754.441.000	100%
3	Rombiya Barat	751.165.000	751.165.000	100%
4	Rombiya Timur	969.511.000	969.511.000	100%
5	Talaga	1.129.271.000	1.129.271.000	100%

DESA/KECAMATAN		PAGU	REALISASI	CAPAIAN
6	Billapora Barat	780.868.000	780.868.000	100%
7	Billapora Timur	781.395.000	781.395.000	100%
8	Ganding	1.071.840.000	1.071.840.000	100%
9	Gadu Timur	986.715.000	986.715.000	100%
10	Gadu Barat	1.342.977.000	1.342.977.000	100%
11	Ketawang Larangan	1.264.295.000	1.264.295.000	100%
12	Ketawang Parebaan	1.005.730.000	1.005.730.000	100%
13	Ketawang Daleman	816.750.000	816.750.000	100%
14	Ketawang Karay	1.356.567.000	1.356.567.000	100%
PRAGAAN				
1	Kaduara Timur	1.205.610.000	1.205.610.000	100%
2	Sendang	806.299.000	806.299.000	100%
3	Rombasan	745.778.000	745.778.000	100%
4	Sentol Laok	836.775.000	836.775.000	100%
5	Larangan Perreng	1.459.436.000	1.459.436.000	100%
6	Sentol Daya	1.336.412.000	1.336.412.000	100%
7	Pakamban Daya	1.114.582.000	1.114.582.000	100%
8	Pakamban Laok	1.163.336.000	1.163.336.000	100%
9	Jaddung	1.683.763.000	1.683.763.000	100%
10	Pragaan Laok	1.647.173.000	1.647.173.000	100%
11	Pragaan Daya	2.328.210.000	2.328.210.000	100%
12	Prenduan	2.106.062.000	2.106.062.000	100%
13	Aeng Panas	1.109.134.000	1.109.134.000	100%
14	Karduluk	2.902.206.000	2.902.206.000	100%
AMBUNTEN				
1	Ambunten Barat	1.004.941.000	1.004.941.000	100%
2	Ambunten Tengah	1.749.642.000	1.749.642.000	100%
3	Ambunten Timur	1.070.464.000	1.070.464.000	100%
4	Tambaagung Barat	919.499.000	919.499.000	100%
5	Tarnbaagung Tengah	1.178.184.000	1.178.184.000	100%
6	Tambaagung Ares	1.035.523.000	1.035.523.000	100%
7	Sogian	980.452.000	980.452.000	100%
8	Tambaagung Timur	922.188.000	922.188.000	100%
9	Bukabu	843.940.000	843.940.000	100%
10	Campor Barat	811.283.000	811.283.000	100%
11	Keles	796.861.000	796.861.000	100%
12	Campor Timur	743.964.000	743.964.000	100%
13	Belluk Ares	737.437.000	737.437.000	100%
14	Belluk Kenek	882.650.000	882.650.000	100%
15	Belluk Raja	936.884.000	936.884.000	100%
PASONGSONGAN				
1	Montorna	1.701.605.000	1.701.605.000	100%
2	Prancak	1.255.262.000	1.255.262.000	100%
3	Campaka	1.742.882.000	1.742.882.000	100%

DESA/KECAMATAN		PAGU	REALISASI	CAPAIAN
4	Rajun	955.017.000	955.017.000	100%
5	Lebeng Timur	1.063.536.000	1.063.536.000	100%
6	Lebeng Barat	1.212.235.000	1.212.235.000	100%
7	Soddara	1.202.939.000	1.202.939.000	100%
8	Pasongsongan	1.913.290.000	1.913.290.000	100%
9	Padangdangan	994.820.000	994.820.000	100%
10	Panaongan	1.182.050.000	1.182.050.000	100%
DASUK				
1	Slopeng	806.490.000	806.490.000	100%
2	Semaan	834.815.000	834.815.000	100%
3	Batubellah Barat	951.602.000	951.602.000	100%
4	Batubellah Timur	1.017.421.000	1.017.421.000	100%
5	Kecer	871.518.000	871.518.000	100%
6	Bates	884.307.000	884.307.000	100%
7	Bringin	1.304.625.000	1.304.625.000	100%
8	Jelbudan	990.160.000	990.160.000	100%
9	Kerta Barat	761.943.000	761.943.000	100%
10	Kerta Timur	907.232.000	907.232.000	100%
11	Nyapar	1.123.119.000	1.123.119.000	100%
12	Dasuk Barat	914.882.000	914.882.000	100%
13	Dasuk Timur	695.915.000	695.915.000	100%
14	Dasuk Laok	989.646.000	989.646.000	100%
15	Mantajun	1.131.273.000	1.131.273.000	100%
RUBARU				
1	Mandala	1.260.667.000	1.260.667.000	100%
2	Pakondang	1.174.124.000	1.174.124.000	100%
3	Matanair	1.221.089.000	1.221.089.000	100%
4	Tambaksari	869.894.000	869.894.000	100%
5	Banasare	947.246.000	947.246.000	100%
6	Bunbarat	1.029.877.000	1.029.877.000	100%
7	Karang Nangka	1.096.530.000	1.096.530.000	100%
8	Basoka	1.256.316.000	1.256.316.000	100%
9	Duko	1.412.529.000	1.412.529.000	100%
10	Rubaru	1.310.480.000	1.310.480.000	100%
11	Kalebengan	1.121.836.000	1.121.836.000	100%
BATANG BATANG				
1	Kolpo	1.283.886.000	1.283.886.000	100%
2	Tamidung	1.099.678.000	1.099.678.000	100%
3	Batang-batang Laok	1.224.721.000	1.224.721.000	100%
4	Batang-batang Daya	1.273.814.000	1.273.814.000	100%
5	Totosan	1.091.460.000	1.091.460.000	100%
6	Banuaju Barat	805.159.000	805.159.000	100%
7	Banuaju Timur	811.441.000	811.441.000	100%
8	Jenangger	1.018.445.000	1.018.445.000	100%
9	Nyabakan Timur	1.262.271.000	1.262.271.000	100%

	DESA/KECAMATAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
10	Nyabakan Barat	1.591.440.000	1.591.440.000	100%
11	Jangkong	906.182.000	906.182.000	100%
12	Legung Barat	1.038.703.000	1.038.703.000	100%
13	Legung Timur	1.297.923.000	1.297.923.000	100%
14	Dapenda	1.266.764.000	1.266.764.000	100%
15	Bilangan	708.173.000	708.173.000	100%
16	Lombang	865.908.000	865.908.000	100%
BATU PUTIH				
1	Aengmerah	1.350.754.000	1.350.754.000	100%
2	Tengedan	783.341.000	783.341.000	100%
3	Juruan Laok	1.295.280.000	1.295.280.000	100%
4	Juruan Daya	1.113.068.000	1.113.068.000	100%
5	Badur	794.380.000	794.380.000	100%
6	Gedang-Gedang	1.008.125.000	1.008.125.000	100%
7	Batuputih Kenek	1.239.946.000	1.239.946.000	100%
8	Batuputih Laok	1.311.643.000	1.311.643.000	100%
9	Batuputih Daya	1.083.282.000	1.083.282.000	100%
10	Bantelan	1.026.368.000	1.026.368.000	100%
11	Larangan Barma	985.087.000	985.087.000	100%
12	Larangan Kerta	788.489.000	788.489.000	100%
13	Bulla'an	1.464.162.000	1.464.162.000	100%
14	Sergang	795.850.000	795.850.000	100%
DUNGKEK				
1	Candi	817.017.000	817.017.000	100%
2	Jadung	951.486.000	951.486.000	100%
3	Romben Barat	793.529.000	793.529.000	100%
4	Romben Rana	762.107.000	762.107.000	100%
5	Romben Guna	963.789.000	963.789.000	100%
6	Taman Sare	872.142.000	872.142.000	100%
7	Bicabbi	1.154.211.000	1.154.211.000	100%
8	Dungkek	1.311.378.000	1.311.378.000	100%
9	Bunpenang	956.101.000	956.101.000	100%
10	Bungin-bungin	621.581.000	621.581.000	100%
11	Lapa Taman	840.682.000	840.682.000	100%
12	Lapa Laok	786.643.000	786.643.000	100%
13	Lapa Daya	696.318.000	696.318.000	100%
14	Bancamara	873.855.000	873.855.000	100%
15	Banra'as	1.023.446.000	1.023.446.000	100%
GAPURA				
1	Grujugan	1.408.633.000	1.408.633.000	100%
2	Longos	1.425.258.000	1.425.258.000	100%
3	Andulang	1.475.280.000	1.475.280.000	100%
4	Gapura Timur	1.124.460.000	1.124.460.000	100%
5	Mandala	690.876.000	690.876.000	100%

DESA/KECAMATAN		PAGU	REALISASI	CAPAIAN
6	Gersik Putih	959.920.000	959.920.000	100%
7	Gapura Tengah	859.165.000	859.165.000	100%
8	Gapura Barat	1.204.935.000	1.204.935.000	100%
9	Panagan	991.306.000	991.306.000	100%
10	Palo'lo'an	896.919.000	896.919.000	100%
11	Banjar Timur	690.362.000	690.362.000	100%
12	Banjar Barat	1.131.000.000	1.131.000.000	100%
13	Batudinding	1.017.125.000	1.017.125.000	100%
14	Baban	873.776.000	873.776.000	100%
15	Karangbudi	1.084.676.000	1.084.676.000	100%
16	Braji	783.011.000	783.011.000	100%
17	Poja	888.792.000	888.792.000	100%
GAYAM				
1	Pancor	1.304.336.000	1.304.336.000	100%
2	Prambanan	1.305.336.000	1.305.336.000	100%
3	Gendang Timur	1.114.578.000	1.114.578.000	100%
4	Karang Tengah	979.181.000	979.181.000	100%
5	Jambuir	925.147.000	925.147.000	100%
6	Gayam	1.347.559.000	1.347.559.000	100%
7	Kalawang	994.150.000	994.150.000	100%
8	Nyamplong	865.054.000	865.054.000	100%
9	Gendang Barat	1.063.694.000	1.063.694.000	100%
10	Tarebung	933.124.000	933.124.000	100%
NONGGUNONG				
1	Nonggunong	820.601.000	820.601.000	100%
2	Somber	759.196.000	759.196.000	100%
3	Tanah Merah	783.558.000	783.558.000	100%
4	Sokaramme Timur	887.738.000	887.738.000	100%
5	Sokarami Paseser	1.227.223.000	1.227.223.000	100%
6	Talaga	838.151.000	838.151.000	100%
7	Rosong	752.816.000	752.816.000	100%
8	Sonok	1.146.276.000	1.146.276.000	100%
RA'AS				
1	Ketupat	1.115.693.000	1.115.693.000	100%
2	Jungkat	746.334.000	746.334.000	100%
3	Kropoh	1.117.205.000	1.117.205.000	100%
4	Karangnangka	960.922.000	960.922.000	100%
5	Alas Malang	869.681.000	869.681.000	100%
6	Poteran	829.544.000	829.544.000	100%
7	Brakas	1.592.610.000	1.592.610.000	100%
8	Tonduk	1.495.170.000	1.495.170.000	100%
9	Guwa-Guwa	1.132.953.000	1.132.953.000	100%
MASALEMBU				
1	Sukajeruk	983.112.000	983.112.000	100%

DESA/KECAMATAN		PAGU	REALISASI	CAPAIAN
2	Masalima	1.661.072.000	1.661.072.000	100%
3	Masakambing	866.572.000	866.572.000	100%
4	Kramian	1.548.792.000	1.548.792.000	100%
ARJASA				
1	Pajanangger	1.140.236.000	1.140.236.000	100%
2	Sawah Sumur	1.283.060.000	1.283.060.000	100%
3	Paseraman	1.224.265.000	1.224.265.000	100%
4	Gelaman	1.793.586.000	1.793.586.000	100%
5	Buddi	1.111.932.000	1.111.932.000	100%
6	Kolo-kolo	1.214.530.000	1.214.530.000	100%
7	Angkatan	1.071.259.000	1.071.259.000	100%
8	Kalisangka	911.532.000	911.532.000	100%
9	Bilis-bilis	858.120.000	858.120.000	100%
10	Laok Jang-Jang	1.023.724.000	1.023.724.000	100%
11	Sumbernangka	890.099.000	890.099.000	100%
12	Duko	995.332.000	995.332.000	100%
13	Kalikatak	906.337.000	906.337.000	100%
14	Arjasa	1.027.135.000	1.027.135.000	100%
15	Kalinganyar	813.018.000	813.018.000	100%
16	Angon-angon	1.113.280.000	1.113.280.000	100%
17	Sambakati	1.095.565.000	1.095.565.000	100%
18	Pandeman	1.026.717.000	1.026.717.000	100%
19	Pabean	699.887.000	699.887.000	100%
SAPEKEN				
1	Sepanjang	2.163.346.000	2.163.346.000	100%
2	Tanjung Kiaok	1.984.954.000	1.984.954.000	100%
3	Sakala	960.692.000	960.692.000	100%
4	Pagerungan Besar	1.827.593.000	1.827.593.000	100%
5	Pagerungan Kecil	2.169.594.000	2.169.594.000	100%
6	Saseel	1.432.219.000	1.432.219.000	100%
7	Sapeken	2.086.610.000	2.086.610.000	100%
8	Sabunten	1.378.061.000	1.378.061.000	100%
9	Paliat	1.198.568.000	1.198.568.000	100%
10	Sadulang	1.211.194.000	1.211.194.000	100%
11	Saur Saebus	1.388.447.000	1.388.447.000	100%
BATUAN				
1	Patean	934.349.000	934.349.000	100%
2	Babbalan	1.251.301.000	1.251.301.000	100%
3	Gedungan	1.048.457.000	1.048.457.000	100%
4	Gunggung	1.007.799.000	1.007.799.000	100%
5	Batuan	1.270.485.000	1.270.485.000	100%
6	Torbang	854.329.000	854.329.000	100%
7	Gelugur	967.075.000	967.075.000	100%
KANGAYAN				

DESA/KECAMATAN		PAGU	REALISASI	CAPAIAN
1	Saobi	1.138.272.000	1.138.272.000	100%
2	Kangayan	1.483.416.000	1.483.416.000	100%
3	Torjek	1.221.227.000	1.221.227.000	100%
4	Cangkramaan	854.809.000	854.809.000	100%
5	Tembayangan	797.777.000	797.777.000	100%
6	Batuputih	942.798.000	942.798.000	100%
7	Daandung	1.156.588.000	1.156.588.000	100%
8	Timur Jang-Jang	1.139.648.000	1.139.648.000	100%
9	Jukong-jukong	1.011.297.000	1.011.297.000	100%
TOTAL		363.197.008.000	363.197.008.000	100%

2. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk mengalokasikan kedalam APBD melalui dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kemudian disalurkan ke Rekening Kas Desa (RKD). Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) juga telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 yang mengatur tentang besaran penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dibiayai dari sumber dana ADD. Pada tahun 2023 Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sumenep yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan di 330 Pemerintah Desa yang tersebar di 27 Kecamatan wilayah daratan dan kepulauan dengan mekanisme melalui RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) ke (Rekening Kas Desa), adalah sebesar Rp. 131.683.768.430,- dan terealisasi sebesar Rp. 131.683.768.430,00 dengan persentase realisasinya sebesar 100 %.

Pelaksanaan dan penyaluran Dana Desa di Kabupaten Sumenep didasarkan pada peraturan sebagai berikut :

- a. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961).
- b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1425);

- c. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 36 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan PertanggungJawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2017 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 82 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 36 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan PertanggungJawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2018 Nomor 82);
- d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
- e. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963).
- f. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sumenep.
- g. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 66 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024.
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Alokasi anggaran serta realisasi Alokasi Dana Desa yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten Sumenep kepada Pemerintah Desa, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4. 3
Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten
Sumenep Tahun 2024

DESA/KECAMATAN		PAGU	REALISASI	CAPAIAN
KOTA SUMENEP				
1	Kolor	415.191.000	415.191.000	100%
2	Pabian	390.484.000	390.484.000	100%
3	Marengan Daya	375.098.000	375.098.000	100%
4	Kacongan	375.848.000	375.848.000	100%
5	Paberasan	390.141.000	390.141.000	100%
6	Parsanga	365.766.000	365.766.000	100%
7	Bangkal	350.512.000	350.512.000	100%
8	Kebunan	365.455.000	365.455.000	100%
9	Pamolokan	390.847.000	390.847.000	100%
10	Pangarangan	365.158.000	365.158.000	100%
11	Pandian	365.267.000	365.267.000	100%
12	Kebunagung	350.549.000	350.549.000	100%
KALIANGET				
1	Pinggirpapas	366.987.000	366.987.000	100%
2	Karanganyar	390.488.000	390.488.000	100%
3	Marengan Laok	391.630.000	391.630.000	100%
4	Kertasada	390.035.000	390.035.000	100%
5	Kalimook	367.118.000	367.118.000	100%
6	Kalianget Barat	393.007.000	393.007.000	100%
7	Kalianget Timur	392.200.000	392.200.000	100%
MANDING				
1	Kasengan	366.249.000	366.249.000	100%
2	Lalangan	336.659.000	336.659.000	100%
3	Tenonan	391.824.000	391.824.000	100%
4	Lanjuk	377.117.000	377.117.000	100%
5	Gadding	467.683.000	467.683.000	100%
6	Giring	440.612.000	440.612.000	100%
7	Gunung Kembar	376.152.000	376.152.000	100%
8	Jaba'an	425.004.000	425.004.000	100%
9	Manding Laok	390.609.000	390.609.000	100%
10	Manding Timur	402.861.000	402.861.000	100%
11	Manding Daya	337.058.000	337.058.000	100%
TALANGO				
1	Talango	441.319.000	441.319.000	100%
2	Padike	465.312.000	465.312.000	100%
3	Cabbiya	426.909.000	426.909.000	100%
4	Essang	465.463.000	465.463.000	100%
5	Kombang	442.440.000	442.440.000	100%
6	Poteran	491.902.000	491.902.000	100%

DESA/KECAMATAN		PAGU	REALISASI	CAPAIAN
7	Palasa	491.717.000	491.717.000	100%
8	Gapurana	639.153.000	639.153.000	100%
BLUTO				
1	Guluk Manjung	327.815.000	327.815.000	100%
2	Kapedi	448.377.000	448.377.000	100%
3	Pakandangan Barat	417.776.000	417.776.000	100%
4	Pakandangan Tengah	337.982.000	337.982.000	100%
5	Pakandangan Sangra	354.442.000	354.442.000	100%
6	Aeng Dake	392.841.000	392.841.000	100%
7	Aeng Baja Kenek	369.512.000	369.512.000	100%
8	Bluto	351.017.000	351.017.000	100%
9	Lobuk	392.129.000	392.129.000	100%
10	Bumbungan	353.147.000	353.147.000	100%
11	Masaran	313.595.000	313.595.000	100%
12	Palongan	328.328.000	328.328.000	100%
13	Aeng Baja Raja	312.380.000	312.380.000	100%
14	Karang Campaka	312.584.000	312.584.000	100%
15	Sera Barat	362.670.000	362.670.000	100%
16	Sera Tengah	312.095.000	312.095.000	100%
17	Sera Timur	337.114.000	337.114.000	100%
18	Gingging	338.242.000	338.242.000	100%
19	Errabu	312.271.000	312.271.000	100%
20	Gilang	312.274.000	312.274.000	100%
SARONGGI				
1	Pagar Batu	393.412.000	393.412.000	100%
2	Tanjung	393.017.000	393.017.000	100%
3	Kebundadap Timur	391.905.000	391.905.000	100%
4	Langsar	489.781.000	489.781.000	100%
5	Kebundadap Barat	311.731.000	311.731.000	100%
6	Saroka	375.254.000	375.254.000	100%
7	Tanamerah	417.243.000	417.243.000	100%
8	Nambakor	338.588.000	338.588.000	100%
9	Saronggi	376.524.000	376.524.000	100%
10	Moangan	312.733.000	312.733.000	100%
11	Juluk	352.113.000	352.113.000	100%
12	Aengtongtong	337.838.000	337.838.000	100%
13	Talang	443.603.000	443.603.000	100%
14	Kambingan Timur	312.310.000	312.310.000	100%
LENTENG				

DESA/KECAMATAN		PAGU	REALISASI	CAPAIAN
1	Moncek Barat	313.280.000	313.280.000	100%
2	Moncek Tengah	352.613.000	352.613.000	100%
3	Moncek Timur	353.603.000	353.603.000	100%
4	Banaresep Timur	443.683.000	443.683.000	100%
5	Tarogan	311.963.000	311.963.000	100%
6	Kambangan Barat	312.953.000	312.953.000	100%
7	Poreh	391.361.000	391.361.000	100%
8	Lenteng Timur	440.380.000	440.380.000	100%
9	Lembung Timur	392.478.000	392.478.000	100%
10	Lenteng Barat	543.537.000	543.537.000	100%
11	Banaresep Barat	312.998.000	312.998.000	100%
12	Billapora Rebba	418.801.000	418.801.000	100%
13	Lembung Barat	327.765.000	327.765.000	100%
14	Ellak Laok	440.327.000	440.327.000	100%
15	Ellak Daya	415.988.000	415.988.000	100%
16	Daramista	375.854.000	375.854.000	100%
17	Jambu	336.394.000	336.394.000	100%
18	Cangkrenng	351.878.000	351.878.000	100%
19	Meddelan	377.451.000	377.451.000	100%
20	Sendir	336.512.000	336.512.000	100%
GILI GINTING				
1	Galis	443.996.000	443.996.000	100%
2	Gedugan	466.947.000	466.947.000	100%
3	Bringsang	362.290.000	362.290.000	100%
4	Aenganyar	441.146.000	441.146.000	100%
5	Lombang	442.662.000	442.662.000	100%
6	Jate	377.386.000	377.386.000	100%
7	Banbaru	351.900.000	351.900.000	100%
8	Banmaleng	391.048.000	391.048.000	100%
GULUK- GULUK				
1	Bakeong	495.501.000	495.501.000	100%
2	Payudan Dundang	380.483.000	380.483.000	100%
3	Pordapor	378.964.000	378.964.000	100%
4	Guluk-guluk	647.812.000	647.812.000	100%
5	Ketawang Laok	402.535.000	402.535.000	100%
6	Pananggungan	312.470.000	312.470.000	100%
7	Bragung	472.930.000	472.930.000	100%
8	Tambuko	353.629.000	353.629.000	100%
9	Payudan Nangger	378.411.000	378.411.000	100%
10	Payudan Daleman	394.726.000	394.726.000	100%

DESA/KECAMATAN		PAGU	REALISASI	CAPAIAN
11	Payudan Karangsokon	379.187.000	379.187.000	100%
21	Batuampar	570.995.000	570.995.000	100%
GANDING				
1	Bataal Barat	361.543.000	361.543.000	100%
2	Bataal Timur	385.652.000	385.652.000	100%
3	Rombiya Barat	387.339.000	387.339.000	100%
4	Rombiya Timur	475.550.000	475.550.000	100%
5	Talaga	426.696.000	426.696.000	100%
6	Billapora Barat	361.852.000	361.852.000	100%
7	Billapora Timur	387.474.000	387.474.000	100%
8	Ganding	468.204.000	468.204.000	100%
9	Gadu Timur	466.339.000	466.339.000	100%
10	Gadu Barat	467.996.000	467.996.000	100%
11	Ketawang Larangan	377.695.000	377.695.000	100%
12	Ketawang Parebaan	312.050.000	312.050.000	100%
13	Ketawang Daleman	377.890.000	377.890.000	100%
14	Ketawang Karay	416.665.000	416.665.000	100%
PRAGAAN				
1	Kaduara Timur	378.071.000	378.071.000	100%
2	Sendang	336.995.000	336.995.000	100%
3	Rombasan	311.927.000	311.927.000	100%
4	Sentol Laok	312.365.000	312.365.000	100%
5	Larangan Perreng	442.237.000	442.237.000	100%
6	Sentol Daya	395.567.000	395.567.000	100%
7	Pakamban Daya	467.443.000	467.443.000	100%
8	Pakamban Laok	376.953.000	376.953.000	100%
9	Jaddung	422.034.000	422.034.000	100%
10	Pragaan Laok	444.393.000	444.393.000	100%
11	Pragaan Daya	447.882.000	447.882.000	100%
12	Prenduan	442.418.000	442.418.000	100%
13	Aeng Panas	392.350.000	392.350.000	100%
14	Karduluk	618.747.000	618.747.000	100%
AMBUNTEN				
1	Ambunten Barat	392.337.000	392.337.000	100%
2	Ambunten Tengah	492.508.000	492.508.000	100%
3	Ambunten Timur	366.551.000	366.551.000	100%
4	Tambaagung Barat	338.669.000	338.669.000	100%
5	Tarnbaagung Tengah	369.753.000	369.753.000	100%

DESA/KECAMATAN		PAGU	REALISASI	CAPAIAN
6	Tambaagung Ares	354.861.000	354.861.000	100%
7	Sogian	352.289.000	352.289.000	100%
8	Tambaagung Timur	377.196.000	377.196.000	100%
9	Bukabu	336.900.000	336.900.000	100%
10	Campor Barat	351.242.000	351.242.000	100%
11	Keles	363.032.000	363.032.000	100%
12	Campor Timur	311.885.000	311.885.000	100%
13	Belluk Ares	337.390.000	337.390.000	100%
14	Belluk Kenek	338.173.000	338.173.000	100%
15	Belluk Raja	391.463.000	391.463.000	100%
PASONGSONGAN				
1	Montorna	496.825.000	496.825.000	100%
2	Prancak	497.774.000	497.774.000	100%
3	Campaka	445.357.000	445.357.000	100%
4	Rajun	392.432.000	392.432.000	100%
5	Lebeng Timur	492.394.000	492.394.000	100%
6	Lebeng Barat	468.053.000	468.053.000	100%
7	Soddara	493.938.000	493.938.000	100%
8	Pasongsongan	444.280.000	444.280.000	100%
9	Padangdangan	440.285.000	440.285.000	100%
10	Panaongan	465.707.000	465.707.000	100%
DASUK				
1	Slopeng	375.585.000	375.585.000	100%
2	Semaan	361.658.000	361.658.000	100%
3	Batubellah Barat	363.133.000	363.133.000	100%
4	Batubellah Timur	337.225.000	337.225.000	100%
5	Kecer	363.107.000	363.107.000	100%
6	Bates	337.328.000	337.328.000	100%
7	Bringin	392.498.000	392.498.000	100%
8	Jelbudan	392.226.000	392.226.000	100%
9	Kerta Barat	360.809.000	360.809.000	100%
10	Kerta Timur	361.583.000	361.583.000	100%
11	Nyapar	352.272.000	352.272.000	100%
12	Dasuk Barat	336.988.000	336.988.000	100%
13	Dasuk Timur	336.821.000	336.821.000	100%
14	Dasuk Laok	352.455.000	352.455.000	100%
15	Mantajun	440.831.000	440.831.000	100%
RUBARU				
1	Mandala	396.551.000	396.551.000	100%
2	Pakondang	370.327.000	370.327.000	100%
3	Matanair	369.830.000	369.830.000	100%
4	Tambaksari	378.250.000	378.250.000	100%

DESA/KECAMATAN		PAGU	REALISASI	CAPAIAN
5	Banasare	353.082.000	353.082.000	100%
6	Bunbarat	353.026.000	353.026.000	100%
7	Karang Nangka	370.252.000	370.252.000	100%
8	Basoka	396.053.000	396.053.000	100%
9	Duko	366.410.000	366.410.000	100%
10	Rubaru	393.936.000	393.936.000	100%
11	Kalebengan	353.630.000	353.630.000	100%
BATANG BATANG				
1	Kolpo	442.628.000	442.628.000	100%
2	Tamidung	468.699.000	468.699.000	100%
3	Batang-batang Laok	466.317.000	466.317.000	100%
4	Batang-batang Daya	616.980.000	616.980.000	100%
5	Totosan	376.924.000	376.924.000	100%
6	Banuaju Barat	401.891.000	401.891.000	100%
7	Banuaju Timur	400.878.000	400.878.000	100%
8	Jenangger	426.899.000	426.899.000	100%
9	Nyabakan Timur	443.591.000	443.591.000	100%
10	Nyabakan Barat	445.221.000	445.221.000	100%
11	Jangkong	362.487.000	362.487.000	100%
12	Legung Barat	401.627.000	401.627.000	100%
13	Legung Timur	489.946.000	489.946.000	100%
14	Dapenda	516.200.000	516.200.000	100%
15	Bilangan	336.764.000	336.764.000	100%
16	Lombang	362.099.000	362.099.000	100%
BATU PUTIH				
1	Aengmerah	468.024.000	468.024.000	100%
2	Tengedan	361.889.000	361.889.000	100%
3	Juruan Laok	491.672.000	491.672.000	100%
4	Juruan Daya	442.078.000	442.078.000	100%
5	Badur	387.197.000	387.197.000	100%
6	Gedang-Gedang	417.722.000	417.722.000	100%
7	Batuputih Kenek	415.851.000	415.851.000	100%
8	Batuputih Laok	489.954.000	489.954.000	100%
9	Batuputih Daya	441.358.000	441.358.000	100%
10	Bantelan	377.740.000	377.740.000	100%
11	Larangan Barma	419.730.000	419.730.000	100%
12	Larangan Kerta	386.486.000	386.486.000	100%
13	Bulla'an	419.177.000	419.177.000	100%
14	Sergang	402.328.000	402.328.000	100%
DUNGKEK				
1	Candi	425.457.000	425.457.000	100%
2	Jadung	415.535.000	415.535.000	100%
3	Romben Barat	386.933.000	386.933.000	100%

DESA/KECAMATAN		PAGU	REALISASI	CAPAIAN
4	Romben Rana	336.199.000	336.199.000	100%
5	Romben Guna	415.919.000	415.919.000	100%
6	Taman Sare	351.540.000	351.540.000	100%
7	Bicabbi	400.529.000	400.529.000	100%
8	Dungkek	415.215.000	415.215.000	100%
9	Bunpenang	336.873.000	336.873.000	100%
10	Bungin-bungin	312.041.000	312.041.000	100%
11	Lapa Taman	377.036.000	377.036.000	100%
12	Lapa Laok	376.420.000	376.420.000	100%
13	Lapa Daya	336.654.000	336.654.000	100%
14	Bancamara	464.118.000	464.118.000	100%
15	Banra'as	439.469.000	439.469.000	100%
GAPURA				
1	Grujugan	390.817.000	390.817.000	100%
2	Longos	441.625.000	441.625.000	100%
3	Andulang	415.552.000	415.552.000	100%
4	Gapura Timur	376.045.000	376.045.000	100%
5	Mandala	311.540.000	311.540.000	100%
6	Gersik Putih	337.090.000	337.090.000	100%
7	Gapura Tengah	337.099.000	337.099.000	100%
8	Gapura Barat	415.296.000	415.296.000	100%
9	Panagan	312.003.000	312.003.000	100%
10	Palo'lo'an	352.140.000	352.140.000	100%
11	Banjar Timur	311.818.000	311.818.000	100%
12	Banjar Barat	352.309.000	352.309.000	100%
13	Batudinding	337.017.000	337.017.000	100%
14	Baban	350.871.000	350.871.000	100%
15	Karangbudi	352.299.000	352.299.000	100%
16	Braji	336.784.000	336.784.000	100%
17	Poja	337.136.000	337.136.000	100%
GAYAM				
1	Pancor	518.668.000	518.668.000	100%
2	Prambanan	542.111.000	542.111.000	100%
3	Gendang Timur	388.342.000	388.342.000	100%
4	Karang Tengah	337.838.000	337.838.000	100%
5	Jambuir	338.641.000	338.641.000	100%
6	Gayam	368.408.000	368.408.000	100%
7	Kalawang	540.445.000	540.445.000	100%
8	Nyamplong	337.319.000	337.319.000	100%
9	Gendang Barat	453.871.000	453.871.000	100%
10	Tarebung	402.654.000	402.654.000	100%
NONGGUNONG				
1	Nonggunong	337.648.000	337.648.000	100%
2	Somber	312.334.000	312.334.000	100%

DESA/KECAMATAN		PAGU	REALISASI	CAPAIAN
3	Tanah Merah	312.699.000	312.699.000	100%
4	Sokaramme Timur	362.896.000	362.896.000	100%
5	Sokarami Paseser	417.245.000	417.245.000	100%
6	Talaga	312.604.000	312.604.000	100%
7	Rosong	312.494.000	312.494.000	100%
8	Sonok	514.470.000	514.470.000	100%
RA'AS				
1	Ketupat	393.180.000	393.180.000	100%
2	Jungkat	312.708.000	312.708.000	100%
3	Kropoh	394.053.000	394.053.000	100%
4	Karangnangka	392.349.000	392.349.000	100%
5	Alas Malang	353.592.000	353.592.000	100%
6	Poteran	401.450.000	401.450.000	100%
7	Brakas	490.419.000	490.419.000	100%
8	Tonduk	397.857.000	397.857.000	100%
9	Guwa-Guwa	391.306.000	391.306.000	100%
MASALEMBU				
1	Sukajeruk	369.218.000	369.218.000	100%
2	Masalima	370.136.000	370.136.000	100%
3	Masakambing	313.282.000	313.282.000	100%
4	Kramian	367.020.000	367.020.000	100%
ARJASA				
1	Pajanangger	592.249.000	592.249.000	100%
2	Sawah Sumur	453.336.000	453.336.000	100%
3	Paseraman	542.075.000	542.075.000	100%
4	Gelaman	519.858.000	519.858.000	100%
5	Buddi	392.202.000	392.202.000	100%
6	Kolo-kolo	592.670.000	592.670.000	100%
7	Angkatan	514.956.000	514.956.000	100%
8	Kalisangka	514.188.000	514.188.000	100%
9	Bilis-bilis	539.394.000	539.394.000	100%
10	Laok Jang-Jang	440.159.000	440.159.000	100%
11	Sumbernangka	336.540.000	336.540.000	100%
12	Duko	514.797.000	514.797.000	100%
13	Kalikatak	537.913.000	537.913.000	100%
14	Arjasa	514.232.000	514.232.000	100%
15	Kalinganyar	474.959.000	474.959.000	100%
16	Angon-angon	514.674.000	514.674.000	100%
17	Sambakati	514.316.000	514.316.000	100%
18	Pandeman	376.503.000	376.503.000	100%
19	Pabean	410.476.000	410.476.000	100%
SAPEKEN				
1	Sepanjang	450.464.000	450.464.000	100%

DESA/KECAMATAN		PAGU	REALISASI	CAPAIAN
2	Tanjung Kiaok	394.191.000	394.191.000	100%
3	Sakala	403.578.000	403.578.000	100%
4	Pagerungan Besar	443.541.000	443.541.000	100%
5	Pagerungan Kecil	394.414.000	394.414.000	100%
6	Saseel	395.326.000	395.326.000	100%
7	Sapeken	571.566.000	571.566.000	100%
8	Sabunten	395.326.000	395.326.000	100%
9	Paliat	407.138.000	407.138.000	100%
10	Sadulang	442.079.000	442.079.000	100%
11	Saur Saebus	468.679.000	468.679.000	100%
BATUAN				
1	Patean	336.257.000	336.257.000	100%
2	Babbalan	336.683.000	336.683.000	100%
3	Gedungan	311.438.430	311.438.430	100%
4	Gunggung	336.862.000	336.862.000	100%
5	Batuan	391.239.000	391.239.000	100%
6	Torbang	385.455.000	385.455.000	100%
7	Gelugur	336.379.000	336.379.000	100%
KANGAYAN				
1	Saobi	516.413.000	516.413.000	100%
2	Kangayan	495.437.000	495.437.000	100%
3	Torjek	470.806.000	470.806.000	100%
4	Cangkramaan	338.471.000	338.471.000	100%
5	Tembayangan	313.322.000	313.322.000	100%
6	Batuputih	339.008.000	339.008.000	100%
7	Daandung	393.194.000	393.194.000	100%
8	Timur Jang-Jang	427.274.000	427.274.000	100%
9	Jukong-jukong	363.947.000	363.947.000	100%
TOTAL		131.683.768.430	131.683.768.430	100%

4.2. Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas pembantuan, baik yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya maupun yang berikan kepada pemerintahan tingkat bawahnya, teridentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah sebagai pelaksana program kegiatan.

1. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Permasalahan :

- Harga satuan yang tidak sama dengan harga satuan di daerah.

Upaya Penyelesaian

- Menyesuaikan dengan anggaran yang ada dan fisik tetap sesuai target;
- SPJ menyesuaikan dengan harga satuan di daerah.

BAB V

P E N U T U P

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun Anggaran 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran, yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban berisikan Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan tahun 2024 yang meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU); kebijakan pemerintah kabupaten; kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah; penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang; penyelenggaraan tugas pembantuan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, yang akan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi DPRD Kabupaten Sumenep untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun berikutnya.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumenep tahun 2024 tumbuh namun mengalami perlambatan sebesar 3,77% jika dibandingkan tahun 2023, dengan pertumbuhan tertinggi di lapangan usaha konstruksi sebesar 12,11%. Persentase penduduk miskin tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023. Jika di tahun 2023 persentase penduduk miskin Kabupaten Sumenep adalah 18,70% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 206.100 jiwa, maka di tahun 2024 berkurang menjadi 17,78% dengan jumlah penduduk miskin 196.420 jiwa. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sumenep mengalami peningkatan, jika pada tahun sebelumnya IPM Kabupaten Sumenep sebesar 69,13, maka di tahun 2024 menjadi 69,78. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kualitas layanan di bidang Pendidikan, Kesehatan serta daya beli Masyarakat yang tetap terjaga. Di sisi ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

yang semula di tahun 2023 sebesar 1,71 di tahun 2024 menjadi 1,69. Di sisi tata Kelola pemerintahan, capaian MCP (Monitoring Center For Prevention) Kabupaten Sumenep tahun 2024 sebesar 95% atau mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 94,31%.

Selanjutnya beberapa keberhasilan pada tahun 2024 juga telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep yang ditorehkan dalam bentuk penghargaan – penghargaan dari berbagai pihak antara lain :

1. Penghargaan Sertifikat Adipura Tahun 2024 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;
2. Penghargaan Sport Achievement Award Kategori Pembina Cabang Olahraga Terbaik dari PWI Jawa Timur;
3. Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 7 Tahun berturut-turut;
4. Penghargaan Juara 1 dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kategori Pagu Sedang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Keluarga Berencana dalam Mendukung Program Bangga Kencana dan Penurunan Tangkes;
5. Penghargaan Inspirasi 2024 Kategori Penggerak Ekonomi Masyarakat dari Beritasatu.com;
6. Penghargaan UHC Award Tahun 2024, dari Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
7. Anugerah Pandu Negeri 2024 Juara Kategori Gold Pemerintah Daerah dengan Kinerja dan Governansi Sangat Memuaskan;
8. Penghargaan Apresiasi Tokoh Indonesia 2024 dari Tempo Media Group;
9. Penghargaan Outstanding in Maximizing Village Potensial dalam ajang Anugerah CNN Indonesia Awards 2024;
10. Penghargaan SAKIP Award Tahun 2024, dengan Raihan predikat BB;
11. Penghargaan KI Award Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur;

Secara umum, atas berbagai keberhasilan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah tidak lepas dari kerja keras serta partisipasi aktif dari semua pihak. Seluruh hal yang telah dicapai merupakan

keberhasilan bersama baik Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta masyarakat Kabupaten Sumenep. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada segenap pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep sebagai mitra yang selama ini terus menjalin sinergitas hubungan yang harmonis serta memberikan dukungan, masukan serta kritik yang membangun kepada kami dalam menjalankan roda pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ucapan terima kasih juga tak lupa kami haturkan pada segenap komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Sumenep atas partisipasi dan dukungan yang diberikan untuk ikut bersama-sama mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Sumenep.

Namun demikian, kami menyadari masih terdapat kekurangan selama pelaksanaan pembangunan di tahun 2024. Oleh karenanya melalui penyampaian LKPJ ini semoga dapat menjadi media evaluasi untuk peningkatan kinerja kedepan agar lebih produktif, inovatif, efektif dan efisien.

Demikian penyampaian LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2024 ini, apabila dalam penyelenggaraan pemerintahan hingga penyampaian laporan masih terdapat kekurangan maupun kekeliruan, baik yang mencakup substansi maupun redaksional, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan kinerja kita pada tahun-tahun berikutnya dalam rangka mewujudkan “SUMENEP UNGGUL, MAJU DAN SEJAHTERA”.



The Soul of Madura
Sumenep

SUMENEP, TAHUN 2025